

DISERTASI

**ANALISIS DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN
DI INDONESIA**

***ANALYSIS OF THE DETERMINANTS LEVEL OF POVERTY
IN INDONESIA***

**ANDI MUHAMMAD IQBAL WALINONO
A013192002**



**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

DISERTASI

ANALISIS DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA

ANALYSIS OF THE DETERMINANTS LEVEL OF POVERTY IN INDONESIA

Disertasi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar doktor
program studi doktor ilmu ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI MUHAMMAD IQBAL WALINONO
A013192002**



Kepada

**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

DISERTASI

ANALISIS DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh

ANDI MUHAMMAD IQBAL WALINONO
A013192002

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Doktor Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
pada tanggal **19 Desember 2022**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Promotor



Prof. Dr. Arifuddin, SE., Ak., M.Si., CA.

NIP 19640609 199203 1 003

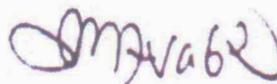
Kopromotor 1



Prof. Dr. Musran Munizu, SE., M.Si.

NIP 19750909 200012 1 001

Kopromotor 2



Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si.

19710619 200003 1 001

Ketua Program Studi
Doktor Ilmu Ekonomi



Dr. Madris, SE., DPS., M.Si.

NIP 19601231 198811 1 002



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abbas Rahman Kadir, SE., M.Si.

NIP 19640205 198810 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Muhammad Iqbal Walinono

NIM : A013192002

Jurusan/Program Studi : Ilmu Ekonomi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa disertasi yang berjudul:

Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 26 Desember 2022



buat pernyataan,

Andi Muhammad Iqbal Walinono

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas segala Petunjuk dan HidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan disertasi dengan judul ***Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan di Indonesia.***

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, namun disiniah bukti batas kemampuan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan disertasi ini sangat penulis harapkan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Arifuddin. SE., Ak., M.Si., CA selaku Promotor; Prof. Dr. Musran Munizu, SE., M.Si. selaku Kopromotor I dan Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si. selaku Kopromotor II, dengan segala ketulusan dan keikhlasan yang tidak mengenal waktu dan tempat untuk memberikan bimbingan dengan penuh kecermatan dalam memberikan petunjuk-petunjuk perihal penulisan karya ilmiah sehingga penulisan disertasi ini dapat dirampungkan.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CIPM, CWM, CRA., CRP. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dan jajaran pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS serta Guru Besar dan dosen-dosen pada Program Doktor Ilmu Ekonomi UNHAS yang telah memberikan izin, kesempatan, fasilitas dan terutama ilmu pengetahuan yang sangat berharga

dan tak ternilai kepada Penulis selama mengikuti Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

3. Dr. Madris, DPS., SE., M.Si. selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi, yang telah memberikan kemudahan dalam menempuh pendidikan di Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin.
4. Tim Penguji dan Penilai Eksternal Prof. Drs. Waridin, M.S., Ph.D. dan tim penguji penilai internal, yaitu: Ibu Dr. Fatmawati, SE., M.Si.; Dr. Anas Iswanto Anwar., SE., MA; Dr. Andi Kusumawati, SE., Ak., M.Si., CA; Dr. Sabir, SE., M.Si. sebagai penguji dan penilai internal, atas segala perhatian, pertanyaan, saran masukan maupun kritikan dengan segala pengetahuan dan motivasinya selama proses ujian berlangsung demi penyempurnaan disertasi ini.
5. Teristimewa ucapan terima kasih setulus-tulusnya dan tak terhingga untuk Ayanda tercinta A. Walinono (Almarhum) dan Ibunda tercinta Hj. A. Nuzuliah atas doa dan kasih sayangnya, serta saudara-saudaraku atas segala dukungan, kasih sayang dan ketulusannya yang senantiasa memberi motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan studi, sehingga penulis terus berjuang untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Doktor.
6. Istri tercinta Sry Wulandari, SH., M.Kn. yang begitu sabar dan ikhlas mendampingi serta memberi motivasi dan dukungan tak terhingga kepada penulis, serta teristimewa kepada anak-anakku Andi Yusuf Al Hadi Walinono dan Shebyka We Zahira Walinono yang memberikan spirit selama menempuh pendidikan Program Doktor Ilmu Ekonomi.
7. Segenap staf administrasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin.

8. Teman-teman angkatan 2019 Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin dan Tim Avenger Bidang Perencanaan Anggaran BKAD Kab. Bone atas kebersamaan dan dukungannya.
9. Semua pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan doa, bantuan, dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sepanjang proses penyelesaian studi.

Akhirnya penulis berharap semoga dengan hadirnya Disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Ekonomi di Indonesia, semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan merahmati kita dalam setiap aktivitas keseharian sebagai bentuk ibadah di sisinya.

Aamiin Yaa Rabl Alamin....

Makassar, 26 Desember 2022



Andi Muhammad Iqbal Walinono

ABSTRAK

ANDI MUHAMMAD IQBAL WALINONO. *Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015-2021* (dibimbing oleh Arifuddin, Musran Munizu, dan Mursalim Nohong).

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia yang cukup tinggi diharapkan dalam mengatasinya dengan memanfaatkan pengelolaan dana perimbangan, dana desa, anggaran infrastruktur, investasi, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung dana perimbangan, dana desa, anggaran infrastruktur, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan melalui investasi, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan, serta mengeksploitasinya ke dalam model konseptual yang berpijak kepada teori utama, yaitu teori Keynes, Adolf Wagner, Myrdal, dan Harrod Domar. Penelitian ini menggunakan desain eksplanatoris. Jenis data yang digunakan adalah data panel yang merupakan data 33 provinsi di Indonesia tahun 2015 - 2021. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur dengan menggunakan program AMOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan secara tidak langsung terhadap kemiskinan berpengaruh negatif melalui investasi dan berpengaruh positif melalui pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Dana desa secara langsung berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Anggaran infrastruktur berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui investasi dan berpengaruh positif melalui ketimpangan pendapatan. Inflasi secara tidak langsung dapat berpengaruh positif terhadap kemiskinan melalui investasi. Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan secara langsung berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap kemiskinan melalui ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan secara langsung berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Secara umum dana perimbangan dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya dapat menekan angka kemiskinan, namun dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan. Dana desa yang tidak dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat justru tidak dapat menekan angka kemiskinan. Anggaran infrastruktur dapat meningkatkan investasi, namun justru dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan. Inflasi yang tinggi dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, namun justru meningkatkan ketimpangan pendapatan. Tingginya investasi dan rendahnya ketimpangan pendapatan dapat menurunkan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata justru akan meningkatkan ketimpangan pendapatan yang selanjutnya akan meningkatkan angka kemiskinan.

Kata kunci: tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, investasi, dana perimbangan, dana desa, anggaran infrastruktur dan inflasi



ABSTRACT

ANDI MUHAMMAD IQBAL WALINONO. *Analysis of The Determinant Level of Poverty in Indonesia (2015-2021)* (Supervised by Arifuddin, Musran Munizu, and Mursalim Nohong).

Poverty and income inequality in Indonesia, which are quite high, are expected to be overcome by utilizing the management of balance funds, village funds, infrastructure budget, investment, economic growth, and inflation. The study aims to determine and analyze the direct and indirect effects of balancing funds, village funds, infrastructure budget, and inflation on poverty levels through investment, economic growth and income inequality and exploit them into a conceptual model based on the main theory, namely the theory of Keynes, Adolf Wagner, Myrdal, and Harrod Domar. This study used an explanatory design. The type of data used was panel data which were data from 33 provinces in Indonesia in 2015-2021. The analysis technique used was path analysis using the AMOS program. The results of the study show that balancing funds have an indirect negative effect on poverty through investment and a positive effect through economic growth and income inequality. Village funds directly have a positive effect on poverty. The infrastructure budget has a negative effect on poverty, both directly and indirectly through investment, and has a positive effect through income inequality. Inflation can indirectly have a positive effect on poverty through investment, economic growth and income inequality. Investment has a direct negative effect on poverty. Economic growth indirectly has a positive effect on poverty through income inequality. Income inequality has a direct positive effect on poverty. In general, balancing funds can increase investment and economic growth, which in turn can reduce poverty, but can increase income inequality. Village funds that are not used for community empowerment cannot actually reduce poverty. The infrastructure budget can increase investment, but it can actually increase income inequality. High inflation can increase investment and economic growth, but it actually increases income inequality. High investment and low income inequality can reduce poverty. Unequal economic growth will actually increase income inequality which in turn will increase the poverty rate.

Keywords: poverty rate, income inequality, economic growth, investment, balancing funds, village funds, infrastructure budget, and inflation



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	23
1.3 Tujuan Penelitian	25
1.4 Manfaat Penelitian	26
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
2.1 Tinjauan Teoritis	29
2.1.1 Kajian Teoritis Tingkat Kemiskinan	29
2.1.2 Kajian Teoritis Ketimpangan Pendapatan	44
2.1.3 Kajian Teoritis Pertumbuhan Ekonomi	49
2.1.4 Kajian Teoritis Investasi	54
2.1.5 Kajian Teoritis Inflasi	60
2.1.6 Kajian Teoritis Pengeluaran Pemerintah	68
2.2 Keterkaitan Antar Variabel	94
2.2.1 Dana Perimbangan dan Tingkat Kemiskinan	94

2.2.2 Dana Desa dan Tingkat Kemiskinan	97
2.2.3 Anggaran Infrastruktur dan Tingkat Kemiskinan	100
2.2.4 Inflasi dan Tingkat Kemiskinan	103
2.2.5 Investasi dan Tingkat Kemiskinan	105
2.2.6 Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan	113
2.2.7 Ketimpangan Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan	118
2.3 Penelitian Terdahulu	124
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	136
3.1 Kerangka Konseptual	136
3.2 Hipotesis Penelitian	141
BAB IV METODE PENELITIAN	146
4.1 Rancangan Penelitian	146
4.2 Jenis dan Sumber Data	147
4.3 Metode Analisis Data	147
4.4 Definisi Operasional Variabel	150
BAB V ANALISIS HASIL PENELITIAN	153
5.1 Gambaran Umum Variabel Penelitian	153
5.1.1 Perkembangan Dana Perimbangan	153
5.1.2 Perkembangan Dana Desa	156
5.1.3 Perkembangan Anggaran Infrastruktur	161
5.1.4 Perkembangan Inflasi	167
5.1.5 Perkembangan Investasi	171
5.1.6 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi	175
5.1.7 Perkembangan Ketimpangan Pendapatan	178
5.1.8 Perkembangan Tingkat Kemiskinan	180
5.2 Statistik Deskriptif	184
5.3 Hasil Estimasi Pengaruh Dana Perimbangan, Dana Desa, Anggaran Infrastruktur, Inflasi, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia	191
5.4 Pengujian Pengaruh Langsung, Evaluasi Koefisien Jalur dan Persamaan Jalur serta besaran Koefisien Determinasi	199
5.4.1 Model regresi dengan variabel dependen Investasi (Y1)	202

5.4.2 Model regresi dengan variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi (Y2)	204
5.4.3 Model regresi dengan variabel dependen ketimpangan pendapatan daerah (Y3)	206
5.4.4 Model regresi dengan variabel dependen Tingkat Kemiskinan (Y4)	208
5.5 Pengaruh Tidak Langsung dan Uji Mediasi dengan Metode VAF	210
5.6 Estimasi Model Analisis Jalur dengan menggunakan data lag 1	212
5.7 Estimasi Model Analisis Jalur dengan menggunakan data lag 2	215
5.8 Pengujian Hipotesis Penelitian	218
BAB VI PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	221
6.1 Analisis dan Implikasi Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Baik Langsung maupun Tidak Langsung Melalui Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan	221
6.2 Analisis dan Implikasi Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Baik Langsung maupun Tidak Langsung Melalui Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan	229
6.3 Analisis dan Implikasi Pengaruh Anggaran Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Baik Langsung maupun Tidak Langsung Melalui Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan	247
6.4 Analisis dan Implikasi Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Baik Langsung maupun Tidak Langsung Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan	260
6.5 Analisis dan Implikasi Pengaruh Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Baik Langsung maupun Tidak Langsung Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan	271
6.6 Analisis dan Implikasi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Baik Langsung	

Maupun Tidak Langsung Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan	278
6.7 Analisis dan Implikasi Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Baik Langsung Maupun Tidak Langsung	282
BAB VII PENUTUP	285
7.1 Kesimpulan	285
7.2 Saran	286
DAFTAR PUSTAKA	289

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 5.1	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	184
Tabel 5.2	Deteksi <i>Outlier</i> dalam model diagram jalur	195
Tabel 5.3	Hasil Uji Normalitas	196
Tabel 5.4	Hasil Uji Multikolinearitas	196
Tabel 5.5	Hasil Pengujian Pengaruh antar Variabel	200
Tabel 5.6	<i>Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)</i>	200
Tabel 5.7	Hasil Pengujian Pengaruh Langsung	201
Tabel 5.8	Hasil Pengujian Pengaruh Tidak Langsung	210
Tabel 5.9	Hasil Uji Mediasi dengan metode VAF	211
Tabel 5.10	Hasil uji Model Analisis Jalur Lag 1	213
Tabel 5.11	Hasil uji Model Analisis Jalur Lag 2	216
Tabel 5.12	Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis	218

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Persentase penduduk miskin masing-masing Provinsi di Indonesia, Tahun 2022.....	4
Gambar 1.2 Tren Dana Perimbangan, DD dan Anggaran Infrastruktur Daerah Tahun 2015-2021 (Rp.Triliun).....	14
Gambar 1.3 Tren inflasi, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia Tahun 2011-2021..	20
Gambar 3.1 Skema Kerangka Konseptual.....	140
Gambar 4.1 Kerangka Model Analisis.....	150
Gambar 5.1 Spesifikasi Model Analisis Jalur Pengaruh X1, X2, X3 dan X4 terhadap Y4 Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung Melalui Y1, Y2 dan Y3.....	192
Gambar 5.2 Hasil estimasi model analisis jalur	197
Gambar 5.3 Hasil Estimasi Model Analisis Jalur dengan menggunakan nilai-nilai X1, X2 dan X3 lag 1	212
Gambar 5.4 Hasil Estimasi Model Analisis Jalur dengan menggunakan nilai-nilai X1, X2 dan X3 lag 2	215

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Biodata.....	308
Lampiran 2 Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia Tahun 2015 - 2021.....	311
Lampiran 3 Tingkat Kemiskinan Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2021 (Persen)	312
Lampiran 4 Gini Ratio Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2021	313
Lampiran 5 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2021 (Persen).....	314
Lampiran 6 Investasi Per Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2021 (Triliun Rupiah)	315
Lampiran 7 Dana Perimbangan di Indonesia Tahun 2015-2021 (Rupiah).	317
Lampiran 8 Realisasi Anggaran Infrastruktur di Indonesia Tahun 2015-2021 (Rupiah).....	319
Lampiran 9 Inflasi di Indonesia Tahun 2015-2021 (Rupiah).....	321
Lampiran 10 Dana desa di Indonesia Tahun 2015-2021 (Rupiah).....	322
Lampiran 11 Tabulasi Data Penelitian	324
Lampiran 12 <i>Reduced Form</i>	335
Lampiran 13 Pengujian Variabel	344
Lampiran 14 Penelitian Terdahulu	356

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah global yang dihadapi dan menjadi perhatian setiap negara di dunia karena berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan. Pertumbuhan yang tidak merata dan perbedaan pendapatan tetap menjadi masalah di beberapa negara berkembang. Sebaliknya, banyak negara berkembang justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat disertai dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Sejak kedatangan penjajah kolonial, bangsa Indonesia selalu dibayangi oleh kembar kemiskinan (Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, 2006; Mudrajad Kuncoro, 2003). Masyarakat Indonesia hidup dalam kemiskinan di tengah kekayaan alam Indonesia yang melimpah.

Indonesia sebagai negara berkembang dihadapkan pada dilema kemiskinan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Setelah perang dunia II, negara-negara berkembang berusaha mengejar pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator primer pembangunan. Kemiskinan menjadi masalah sosial yang kompleks dan multidimensi yang masih diperdebatkan oleh berbagai kelompok, baik skolastik, organisasi, elit politik, maupun praktisi pembangunan.

Runtuhnya perekonomian Indonesia disebabkan oleh krisis ekonomi global pada tahun 1998 yang ditandai dengan melemahnya rupiah, meningkatnya inflasi, tingginya pengangguran seiring dengan menurunnya lapangan pekerjaan, sehingga menyebabkan tingkat kemiskinan. Hal ini diakibatkan oleh ketidakmampuan untuk mengakses sumber permodalan, juga karena infrastruktur yang belum mendukung untuk dimanfaatkan oleh rakyat, dan diperkuat dengan tidak adanya dukungan mikro yang kuat, meningkatnya

praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta sumber daya manusia yang kurang kompetitif, dan sebagainya (Boediono, 1992).

Diantara problematika persoalan kompleks yang sangat rumit dibenahi hingga saat ini di tanah air terutama di provinsi maupun kabupaten/kota yaitu permasalahan kemiskinan yang semakin merenggut perekonomian masyarakat di daerah (Balqis & Suriani, 2021). Kemiskinan menjadi problem yang sangat sering terjadi di Indonesia dan menarik untuk ditelaah secara mendalam sebagai ajang untuk beradu argumen di berbagai kegiatan seminar dan dijadikan sebagai materi inti dalam forum diskusi. Menanggulangi persoalan kemiskinan harus dilakukan dengan cara menyatukan berbagai dimensi lainnya yang membuat permasalahan ini semakin mudah untuk diatasi (Meilen Paseki et al., 2014). Dimensi lain yang sering terikat dengan kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang masih rendah untuk meningkatkan kualitas hidup lebih layak, tingkat kesehatan yang masih belum memadai untuk menambah angka harapan hidup, bertambahnya total penduduk yang membuat kebutuhan masyarakat menjadi bertambah dan total pengangguran yang semakin meningkat akibat dari berkurangnya lapangan kerja (T Nurhidayah & P Hendikawati, 2018).

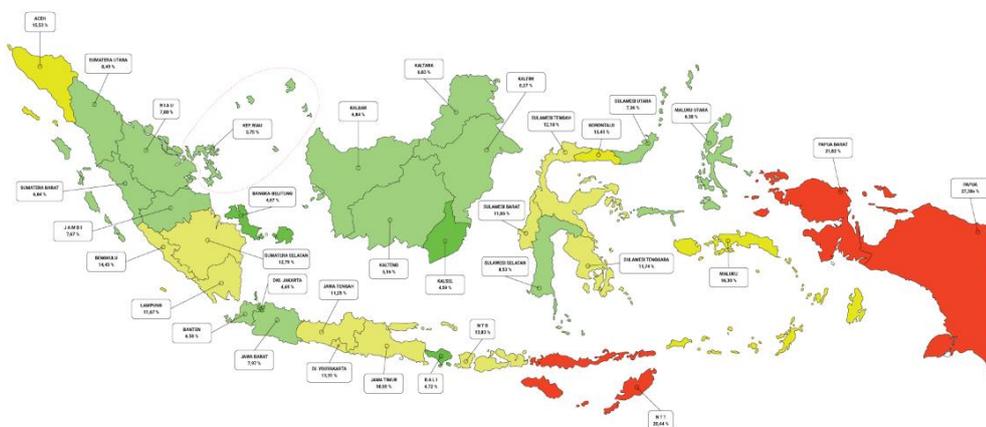
Peristiwa bertambahnya jumlah masyarakat miskin selalu dikaitkan dengan premis dan persoalan kesewenang-wenangan pihak yang menyebabkan masyarakat merasa diperlakukan tidak adil dan membuat perpecahan di Indonesia, seharusnya semua pihak saling memberikan dukungan dan bantuan kepada orang miskin. Masyarakat yang semakin terkait satu sama lain akan memiliki pengaruh jaringan yang positif. Jumlah penduduk miskin di daerah akan terus bertambah saat terjadinya keberpihakan terhadap kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kebencian, kecemburuan, dan mengurangi persaudaraan, sehingga nantinya juga akan timbul masalah lain

seperti disintegrasi bangsa dan ketidakadilan masyarakat (Ni Ketut Anindya Permatasari & A.A.N.B. Dwirandra, 2016).

Berbagai definisi kemiskinan telah dikemukakan serta menjadi bahan perdebatan diantara para pengamat kemiskinan. Badan Pusat Statistik, (2021), kemiskinan menjadi ketidakmampuan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan serta bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan dapat terjadi akibat perampasan kapabilitas (*capability deprivation*), yakni kebebasan untuk mencapai sesuatu dalam hidup seseorang (Amartya Sen, 1999). Dilihat dari penyebabnya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah biasa terjadi akibat kurangnya sumber daya alam sehingga efisiensi daerah menjadi rendah, sedangkan kemiskinan struktural terjadi karena alokasi sumber daya yang ada tidak merata.

Fenomena kemiskinan telah terjadi cukup lama, meskipun berbagai upaya telah dilakukan dalam menanggulangnya. Bank Dunia menyatakan bahwa sedikitnya tercatat sekitar 767 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan global. Dimana mereka mengatasi kebutuhannya dengan pengeluaran USD1,9 per orang perharinya. Hampir dari setiap orang di dunia atau 10,7% dari total populasi global berada di bawah garis kemiskinan yang paling parah. Jumlah terbesar orang miskin berada di wilayah sub-sahara Afrika di mana mencapai 388,7 juta orang. Sementara itu, yang kedua ada di Asia bagian selatan di mana mencapai 256,2 juta orang. Asia timur dan pasifik berada di posisi ketiga dengan 71 juta orang disusul Amerika Latin dan Karibia yang tercatat 33,6 juta orang. Adapun bagian Eropa dan Asia Tengah tercatat yang paling minim sebanyak 10,8 juta (Laucereno, 2017).

Jumlah penduduk Indonesia secara absolut mencapai 273.5 juta orang, meskipun dapat mengurangi jumlah penduduk miskin setiap tahun, masih ada sekitar 26,50 juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2021. Pemerintah belum mampu menghadapi atau mengurus masalah ini dengan memiliki tingkat kemiskinan rata-rata 9,78%, ini belum bisa dikatakan berhasil karena masih jauh dari target yang diharapkan. Berikut gambaran persentase penduduk miskin masing-masing provinsi di Indonesia:



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 1.1 Persentase penduduk miskin masing-masing Provinsi di Indonesia, Tahun 2022

Gambar 1.1 menunjukkan pada tahun 2022 persentase penduduk miskin di Pulau Jawa lebih rendah dibanding provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa. Persentase tertinggi pada Provinsi Papua sebanyak 27,38%, Papua Barat sebanyak 21,82% dan NTT sebanyak 20,44%. Sedangkan jumlah penduduk miskin terbanyak berada pada Provinsi Jawa Timur sebanyak 4,26 juta jiwa, Jawa Barat sebanyak 4,04 juta jiwa dan Jawa Tengah sebanyak 3,93 juta jiwa dengan total penduduk miskin di Pulau Jawa mencapai 14,02 juta jiwa, atau separuh total penduduk miskin di Indonesia. Analisis kemiskinan harus mempertimbangkan kepadatan penduduk, bukan hanya persentase saja.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan secara nasional sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2021, dan selama kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2021 telah terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 1,05 juta jiwa atau 0,04%, yaitu 28.59 juta jiwa penduduk miskin pada tahun 2015 turun menjadi 27,54 juta jiwa penduduk miskin pada tahun 2021. Perkembangan penduduk miskin di Indonesia masih didominasi oleh penduduk yang tinggal di pedesaan dibandingkan dengan perkotaan. Tahun 2021 menunjukkan persentase total penduduk miskin sebesar 10,14%, dimana yang tinggal di perkotaan sebesar 7,89% atau 12,18 juta orang, selebihnya di pedesaan sebanyak 13,10% atau sebesar 15,37 juta orang (BPS, 2021).

Kelompok miskin ini akan menimbulkan masalah sosial dan kemelaratan yang berkelanjutan, jika tidak ditanggapi secara serius, terutama bagi generasi penerus. Masalah ini semakin rumit dan akan membentuk laju penurunan kemiskinan yang lebih lambat dari sebelumnya, karena disparitas atau ketimpangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Terlihat bahwa ketimpangan di Indonesia meningkat lebih dari 30% selama 2001-2011, dimana proporsi gini ratio bergerak dari 0,331 ke 0,413 yang merupakan proporsi paling tinggi di Indonesia dan angka ini tidak berubah hingga tahun 2014. Nilai proporsi gini ratio berkisar antara 0-1, semakin mendekati angka 1, ini menyiratkan bahwa proporsi gini ratio menunjukkan ketimpangan yang lebih tinggi. Pada tahun 2015, proporsi gini ratio tercatat sebesar 0,402, menjadi 0,384 pada tahun 2021.

Permasalahan kemiskinan serta ketimpangan pendapatan juga akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Selain itu, kemiskinan serta ketimpangan pendapatan juga akan mempengaruhi kelemahan sosial, kerentanan, dan peristiwa kemanusiaan seperti kelaparan, kesehatan yang

buruk, serta kekurangan gizi. Dengan asumsi bahwa jika keadaan saat ini berlanjut, pada akhirnya akan merusak stabilitas makro ekonomi dan kelangsungan pemerintahan saat ini.

Pemerataan tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah provinsi pun dapat membuka peluang bisnis yang setara karena SDM yang dimiliki masing-masing daerah provinsi sangat besar. Dalam hal terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan yang tinggi antar daerah provinsi, hal ini dikarenakan SDM dengan berbagai tingkat efisiensi kerja berbeda pada masing-masing daerah di Indonesia sepanjang dekade. Ketimpangan pendapatan yang rendah mempengaruhi kemiskinan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Ketimpangan dan kemiskinan memiliki hubungan secara signifikan (Julie A. Litchfield, 1999) menyatakan dalam penelitiannya bahwa, ketimpangan berdampak pada kemiskinan, pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dan juga beberapa ukuran kemiskinan seperti Indeks Pembangunan Gender (GDI) memasukkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Meskipun kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia berubah dan secara umum akan berkurang, angka ini bisa dibilang tidak terlalu besar, mengingat tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia masih sangat tinggi. Hal ini mempengaruhi kebijakan pemerintah yang tidak bersinergi dengan pemilik modal atau investor untuk menanamkan modal di daerah-daerah. Dengan demikian ketimpangan pendapatan berdampak terhadap kemiskinan, ketika ketimpangan pendapatan meningkat, kemiskinan juga akan meningkat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kinerja makro ekonomi yang bisa menjadi barometer pencapaian keberhasilan pembangunan

yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, investasi yang tinggi, inflasi yang rendah, pengangguran dan penurunan kemiskinan (Ingratubun, 2019). Sedangkan tujuan utama dari pembangunan adalah pengentasan kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi atau melalui redistribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat penting dalam pengentasan kemiskinan, sedangkan syarat yang memadai adalah bahwa pertumbuhan ekonomi harus efektif dalam mengurangi kemiskinan. Ini menyiratkan bahwa pertumbuhan harus menyebar ke semua kelompok pendapatan, termasuk orang miskin. Hanya saja, ini menyiratkan bahwa pertumbuhan pasti akan terjadi di daerah-daerah di mana orang-orang tempat penduduk miskin bekerja (sektor pertanian atau padat karya). Berkenaan hal tersebut, menyiratkan bahwa strategi atau kebijakan pemerintah yang relatif dalam merealokasi manfaat pertumbuhan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Francois Bourguignon, 2004; H. Son & N. Kakwani, 2003; Lestari, 2014; M. Ravallion & S. Chen, 1997; Mulawati, 2009; Saputra & Mahmudi, 2012) meninjau hubungan antara pertumbuhan dan kemiskinan bahwa dampak pertumbuhan terhadap penurunan kemiskinan terjadi ketika ada ketidakseimbangan yang secara umum tinggi yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi mengakibatkan peningkatan pendapatan sehingga berpengaruh pada pengentasan kemiskinan karena besarnya jumlah pencari pekerjaan di pasar kerja.

Dengan demikian, efek pertumbuhan ekonomi pada penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan dampak menyimpang dari orang kaya ke orang miskin. Ini juga berarti bahwa kemiskinan akan berkurang untuk skala kecil. Orang miskin hanya mendapatkan sedikit manfaat dari seluruh manfaat yang muncul dari pertumbuhan ekonomi. Keadaan ini juga membuka

peluang yang potensial bagi perluasan kemiskinan karena meluasnya ketimpangan pendapatan yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi yang condong ke orang kaya dibandingkan dengan orang miskin. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi berdampak positif terhadap pengentasan kemiskinan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang terjadi berpihak pada penduduk miskin (*pro-poor growth*).

Majunya suatu bangsa atau daerah sangat ditentukan dengan hadirnya investasi yang seharusnya semakin mengembangkan *income per capita* (pendapatan per kapita) masyarakat akan meningkat dan stabil. Apabila perkembangan iklim investasi kedepan akan memiliki prospek lebih baik, otomatis menurunkan angka kemiskinan dengan pendekatan peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka perluasan lapangan kerja tercipta sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja dan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan yang merata dan penurunan angka kemiskinan (Ingratubun, 2019).

Kemajuan investasi swasta terhadap kemiskinan dengan implikasi mempengaruhi perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan ketimpangan pendapatan sebagai pilar pembangunan ekonomi suatu daerah. Investasi merupakan salah satu poin utama dukungan dalam pembangunan ekonomi. Investasi swasta memainkan peranan penting dalam proses pertumbuhan dalam mengembangkan perekonomian (Juthathip Jongwanich, 2007).

Melalui investasi swasta, perkembangan modal yang digunakan untuk peningkatan bisnis dan membangun usaha yang baru dapat meningkatkan peluang kerja, mendukung proses produksi, transfer teknologi, mengakses sektor bisnis di seluruh dunia melalui produk-produk ekspor, serta pengendalian mutu. Investasi swasta merupakan pendorong fundamental dari pertumbuhan ekonomi.

Di LDCs, memperluas pertumbuhan investasi swasta adalah tujuan yang diinginkan untuk mencapai rencana pembangunan pasca 2015. Untuk tujuan ini, pembuat kebijakan perlu menemukan keselarasan yang tepat antara menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi dan menghilangkan batasan untuk investasi. Mereka perlu menemukan mekanisme untuk menarik investor swasta.

Menurut Agung Istri Diah Paramita & Bagus Putu Purbadharmaja, (2015); Mulawati, (2009) menyatakan bahwa investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sebaliknya, Pradnyadewi & Purbadharmaja, (2017) mengidentifikasi bahwa IPM dan investasi tidak memiliki pengaruh dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan tetapi output (pendapatan nasional) positif meningkatkan investasi.

Studi penelitian menyelidiki dampak investasi publik dipusatkan pada pengembangan negara-negara berdasarkan data kualitas investasi yang lebih luas dan lebih baik. Sebagian kecil penelitian lebih fokus pada negara berkembang, khususnya pembatasan aksesibilitas dan kualitas informasi. S. Straub, (2008) berpendapat bahwa di negara-negara berkembang, infrastruktur memiliki masalah akut dan kebijakan pokok. Jika investasi publik dan investasi swasta bersifat komplementer, maka investasi publik akan dominan pada investasi individu. Selanjutnya, upaya untuk membangun stok modal publik melalui investasi publik akan mendorong ekspansi investasi swasta karena sektor swasta berusaha memperluas stok modalnya

Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah investasi PMA sebesar USD19,4 atau Rp.280.229 triliun, apabila dikalikan kurs Rp.14.331,- jauh lebih tinggi dibandingkan PMDN sebesar Rp.76.000 triliun pada tahun 2011. Namun PMDN mengalami peningkatan rata-rata 50,1% setiap tahun, sehingga mencapai

Rp.447,1 triliun tahun 2021. Dalam periode yang sama, pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan.

Sejumlah penelitian telah dilakukan sehubungan dengan efisiensi SDM dalam kaitannya dengan infrastruktur investasi. Misalnya penelitian seperti Santi et al., (2021) bahwa dana perimbangan dan investasi yang memadai akan meningkatkan perekonomian. Modal akan tersedia apabila ada investasi, dan produksi akan meningkat seiring dengan semakin banyaknya investor yang menanamkan modal. Pada akhirnya, produksi akan memberikan hasil yang tinggi dan meningkatkan pendapatan daerah dari pajak yang akan diberikan kepada pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan dibutuhkan investasi, dana untuk membiayai investasi berasal dari tabungan domestik. Namun, karena keterbatasan sumber daya finansial, maka pemerintah terlebih dahulu melakukan investasi publik terutama dalam bentuk penyediaan *Social Overhead Capital* (SOC) berupa jalan, jembatan, kelistrikan, telekomunikasi, pengairan, pendidikan dan sebagainya untuk mendorong investasi swasta dalam bentuk *Direct Productive Activities* (DPA) atau kegiatan produktif yang langsung menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Kebijakan seperti ini oleh Hirschman disebut *Inbalance Through SOC-DPA* (P.A. Yotopoulos & J.B. Nugent, 1976).

Fenomena desentralisasi fiskal terhadap pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan dipisahkan oleh cara yang paling umum dengan proses pengalihan sumber keuangan bagi daerah dalam jumlah yang sangat signifikan. Menurunnya tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Indonesia tentunya tidak terlepas dari dampak yang berasal dari bagian pendapatan daerah. Pendapatan yang dimaksud adalah dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) (Konny Joula

Ellen Rasu et al., 2019). Pendapatan daerah yang diperoleh dari transfer pemerintah pusat tersebut dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan kemandirian daerah, salah satunya untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Pengeluaran pemerintah adalah salah satu bagian dari kebijaksanaan fiskal yang bertujuan untuk memperluas laju investasi, kesempatan kerja memelihara kestabilan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Dengan asumsi bahwa apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Guritno Mangkoesoebroto, 2002).

Banyak penelitian empiris menunjukkan hubungan yang signifikan antara penguatan sektor desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kesejahteraan. Di samping itu, desentralisasi fiskal mengambil peran penting dalam pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, kebijakan desentralisasi fiskal yang efektif akan memberdayakan masyarakat, memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, mengintegrasikan masyarakat dengan perekonomian serta memberikan jaminan terhadap ketidakstabilan moneter. Beberapa penelitian yang berbeda juga menekankan pentingnya hubungan antara peningkatan desentralisasi fiskal dan penurunan kemiskinan, misalnya studi oleh Bashir, (2011); Saputra & Mahmudi, (2012) menyatakan bahwa ekspansi dalam desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap PDB per kapita melalui alokasi dana perimbangan dan mendorong pemerataan pembangunan serta dapat mengundang masuknya investor. Hal ini karena pelaksanaan

desentralisasi fiskal memiliki andil yang signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Desentralisasi fiskal dalam hal dana perimbangan, dana desa, anggaran infrastruktur serta inflasi menjadi *urgent* (penting) karena adanya perbedaan geografis dan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah dan jumlah penduduk yang tidak merata. Dengan demikian, kebijakan fiskal adalah salah satu upaya untuk meredam dan menstabilkan inflasi agar mempermudah keputusan masyarakat dalam melakukan pembelian barang dan jasa, investasi dan produksi, oleh karenanya setiap warga negara berhak untuk memenuhi kebutuhannya dengan biaya yang terjangkau dan kualitas yang baik.

Permasalahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, namun selama laju pertumbuhan penduduk Indonesia terus berkembang setiap tahun, secara langsung angka kemiskinan pun tetap ada dan itu terjadi di daerah yang lambat tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran tinggi, penyerapan tenaga kerja menurun, karena sempitnya lapangan kerja mengakibatkan lesunya iklim investasi untuk penanaman modal di daerah, tentu akan menimbulkan ketimpangan pendapatan sangat tinggi khususnya yang terjadi pada daerah (Agussalim, 2009).

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa atau daerah tidak lepas dari pelaksanaan desentralisasi fiskal yang efektif, dalam hal ini meningkatkan kemandirian keuangan daerah dapat membantu semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Desentralisasi fiskal pada departemen dan pemerintahan daerah mengambil bagian yang signifikan melalui kebijakan pengeluaran pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah-daerah, terutama di daerah-daerah terpencil yang

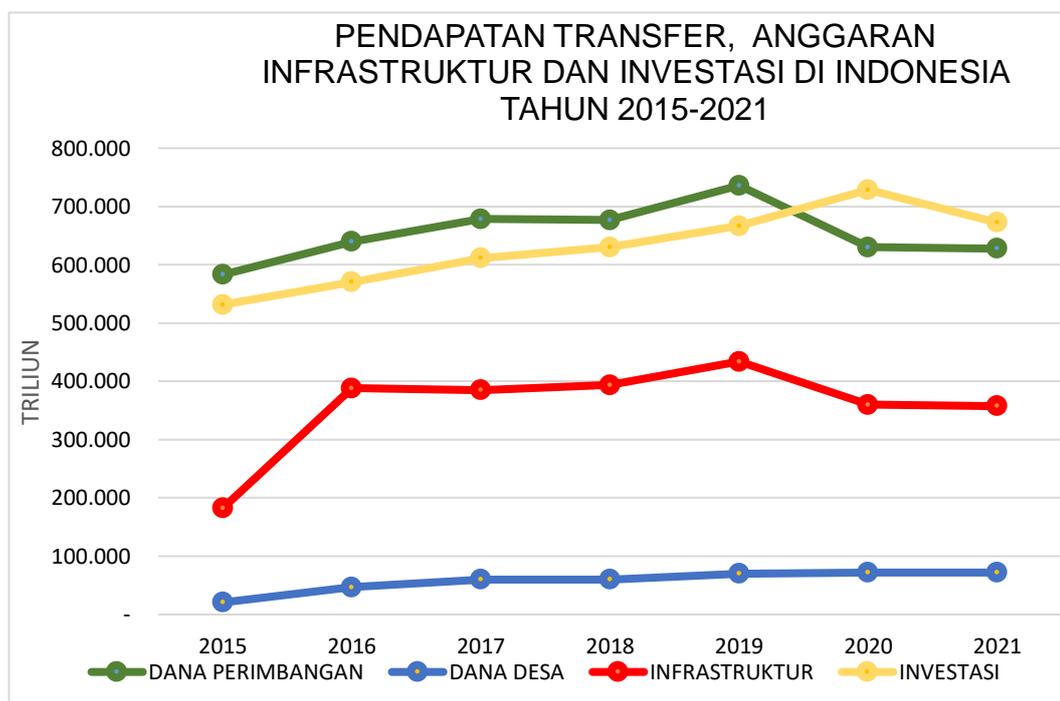
terputus dari segi pembangunan ekonomi daerah di Indonesia. Amalia et al., (2015) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki efek langsung terhadap penurunan tingkat kemiskinan dalam bentuk manfaat yang diterima dari pengeluaran pada program kerja dan kesejahteraan.

Adanya wewenang yang luas untuk pemerintahan daerah untuk mengatur kewenangan publik, penting untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat dapat tercapai lebih cepat. Jadi penelitian ini mendefinisikan desentralisasi fiskal yaitu pelimpahan kewenangan sebagai proses pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Desentralisasi fiskal bertujuan untuk memenuhi aspirasi daerah dalam hal penguasaan aset keuangan negara, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, meningkatkan kerjasama masyarakat dalam proses kemajuan wilayahnya, mengurangi ketimpangan antar daerah, menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Robert A. Simanjuntak, 2002). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan SDM dan pengelolaan sumber daya alam untuk memperluas potensi pendapatan dan pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI pada awal desentralisasi fiskal, transfer ke daerah berupa dana perimbangan, yang antara lain terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), nilainya sebesar Rp.191.85 triliun, dan meningkat pada tahun 2011 menjadi Rp.335.711 triliun. Tahun 2021 dana perimbangan mencapai

Rp.628.004 triliun atau meningkat sebesar 38,84%, dana desa mengalami peningkatan rata-rata setiap tahunnya sebesar Rp.57.349 triliun atau 3,24%. Anggaran infrastruktur meningkat rata-rata sebesar Rp.357.334 triliun atau 21,11% dari Rp.182.640 triliun di tahun 2015 menjadi Rp.357.521 triliun di tahun 2021, investasi mengalami peningkatan rata-rata setiap tahunnya sebesar Rp.630.125 triliun atau 36,81% dari Rp.531.634 triliun di tahun 2015 menjadi Rp.672.665 triliun di tahun 2021. Nantinya anggaran tersebut dialokasikan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan perluasan lapangan pekerjaan, bantuan UMKM, pelatihan dan lain-lain, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik (Teja Rinanda & Subambang Harsono, 2020). Tren dana perimbangan, dana desa dan anggaran infrastruktur daerah di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2022

Gambar 1. 2 Tren Dana Perimbangan, DD dan Anggaran Infrastruktur Daerah Tahun 2015-2021 (Rp.Triliun)

Berdasarkan gambar 1.2 terlihat bahwa dari sisi pendapatan daerah sebagian besar dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk dana perimbangan antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa (DD) mengalami peningkatan rata-rata setiap tahunnya sebesar Rp.828.931 triliun atau 29,62%. Dana perimbangan mengalami peningkatan setiap tahunnya dan mencapai rata-rata 41,84% dari total pendapatan daerah selama periode 2015-2021, serta dana desa mengalami peningkatan setiap tahunnya dan mencapai rata-rata 3,38% dari total pendapatan daerah selama periode 2015-2021. Di sisi lain, belanja infrastruktur mengalami peningkatan setiap tahunnya dan mencapai rata-rata 21,04% dari total pendapatan daerah selama periode 2015-2021 serta investasi mengalami peningkatan setiap tahunnya dan mencapai rata-rata 37,11% dari total pendapatan daerah selama periode 2015-2021. Hal ini menunjukkan pemerintah cukup serius dalam mendorong proses percepatan pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia.

Peningkatan dana perimbangan dan dana desa secara konsisten menunjukkan tanggungjawab dari pemerintah pusat seiring dengan meningkatnya jumlah urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mencapai efektifitas dan kesetaraan dalam menyediakan pelayanan publik. Dalam mengurangi kemiskinan, salah satu fokus pemerintah adalah mengurangi kemiskinan di daerah perdesaan. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa belum lama ini, tingkat kemiskinan di perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Kemiskinan perdesaan menjadi masalah utama dalam

proses pelaksanaan pembangunan di daerah perdesaan dan sebagian besar penduduk miskin tinggal di perdesaan (Sartika et al., 2016).

Ukuran yang digunakan dalam penghitungan dana desa berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa diberikan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat yaitu dengan menciptakan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan dan mengentaskan kemiskinan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Banyaknya strategi yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan namun strategi itu belum mampu menekan angka kemiskinan (Dariwardani, 2014). Pemerintah pusat dan daerah memegang peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Mulai sekitar tahun 2015, pemerintah telah memberikan dana desa kepada desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten, dimana desa memiliki hak untuk mengelola kewenangan dan pendanaannya. Kemudian, pada saat itu, pemerintah desa dapat mempertahankan keinginan masyarakat secara langsung sehingga dapat memprogramkan pembangunan fisik dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja melalui mekanisme padat karya serta pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui dana desa pembangunan yang merata dan pemberdayaan masyarakat, dapat meningkatkan peluang kerja yang menyerap tenaga kerja dan meningkatkan daya dukung desa melalui seluruh potensi desa yang dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Di Indonesia, pengelolaan dana desa yang efektif adalah tujuan yang ideal untuk mencapai rencana pembangunan yang berkelanjutan dari

tepi perbatasan dan desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta mengurangi kemiskinan. Menurut Dewi & Novi Irama, (2018); Krisna et al., (2019) bahwa dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, artinya bahwa semakin tinggi dana desa maka akan semakin tinggi kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Sebaliknya, Sigit & Kosasih, (2020) mengidentifikasi bahwa dana desa berpengaruh negatif dan mampu secara efektif menurunkan jumlah penduduk miskin. Kebijakan pemerintah terkait dana desa menjadi salah satu motor penggerak penurunan tingkat kemiskinan (Ritonga et al., 2021). Ini adalah salah satu pendapatan desa untuk menunjang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan berbasis perdesaan yang berkeadilan dan merata akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat suatu kebijakan dalam pengelolaan dana desa yang tepat sasaran dan tepat guna. Hal ini ditujukan untuk memperluas dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dan meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal serta pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan.

Aksesibilitas infrastruktur merupakan salah satu variabel pendorong produktivitas daerah. Saat ini, pembangunan infrastruktur menjadi rencana krusial yang harus ditangani oleh pemerintah pusat serta daerah. Hal ini dikarenakan infrastruktur menjadi faktor penentu utama keberlangsungan kegiatan pembangunan, salah satunya adalah untuk mencapai target pembangunan ekonomi baik secara subjektif maupun kuantitatif. Untuk sementara, pembangunan infrastruktur akan membentuk lapangan pekerjaan pada sektor konstruksi, dalam jangka menengah dan panjang akan mendukung

peningkatan kemampuan dan efisiensi serta produktivitas pada sektor ekonomi terkait. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dianggap sebagai metodologi untuk mendukung peningkatan hasil ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, meningkatkan pengembangan tenaga kerja, dan mengurangi biaya bagi investor dalam serta luar negeri. Upaya pemerintah pusat dan daerah dalam melindungi dan membantu meringankan beban kelas menengah ke bawah yang mengalami kesulitan ekonomi (R. B. Prasetyo & Firdaus, 2009).

Salah satu titik fokus pemerintahan Presiden Jokowi yang sedang berjalan adalah pembangunan infrastruktur terlepas dari kemajuan SDM. Salah satu strategi pemerintah untuk mendukung kemajuan pembangunan infrastruktur di daerah adalah melalui alokasi anggaran infrastruktur sebanyak 25% dari Dana Transfer Umum yang meliputi Dana Alokasi umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Strategi ini diharapkan dapat menjamin bahwa belanja pemerintah daerah tidak hanya untuk belanja pegawai, tetapi lebih untuk belanja yang ditujukan untuk pelayanan publik. Pembangunan infrastruktur hingga pelosok Indonesia terus dilakukan dalam pemberdayaan pertumbuhan ekonomi daerah serta mengejar tingkat ketimpangan ekonomi antar daerah yang terjadi antar provinsi di Pulau Jawa maupun di daerah di luar Pulau Jawa.

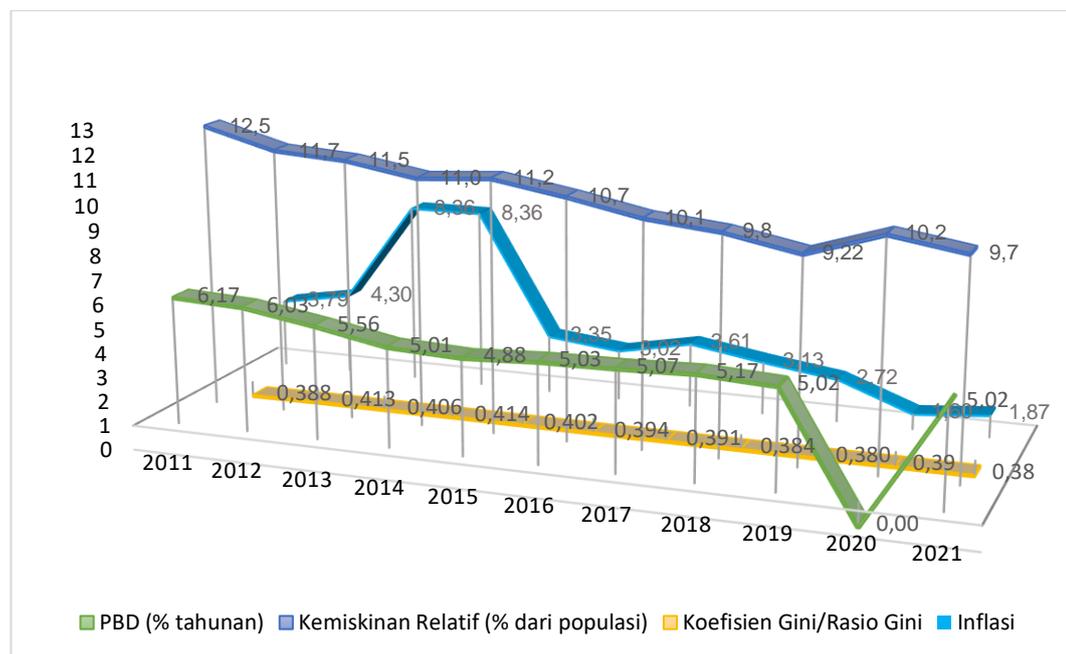
Banyak penelitian eksperimental telah menunjukkan hubungan yang signifikan antara penguatan bidang infrastruktur dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Selain itu, peningkatan infrastruktur berperan penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan angka kemiskinan. Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi karena dengan adanya infrastruktur yang baik berakibat baik pula terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga terciptanya lapangan kerja

baru, serta menurunkan tingkat kemiskinan dan pendapatan perkapita semakin meningkat (Hendra Andy Mulia Panjaitan et al., 2020).

Dengan demikian, pengembangan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja baru, mempermudah mobilisasi penyaluran barang dan jasa serta dapat mengurangi akses masyarakat yang terisolasi secara langsung meningkatkan pendapatan perkapita dan menurunkan tingkat kemiskinan. Beberapa peneliti seperti Nugraheni & Priyarsono, (2012); Purnomo et al., (2021); Wibowo, (2014) melakukan penelitian antara hubungan infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan, dan menyatakan bahwa penyediaan infrastruktur dasar dengan angka kemiskinan ternyata negatif. Sedangkan Mardiana et al., (2017) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur akan membuka lapangan kerja dan pengurangan angka pengangguran sehingga akan menekan angka kemiskinan. Hal ini memperkuat keyakinan perlunya mendorong lebih kuat lagi pembangunan infrastruktur untuk dapat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan dan angka kemiskinan.

Menyimak dana perimbangan, dana desa, anggaran infrastruktur sebagai penggerak kemajuan ekonomi pembangunan di Indonesia, jika dapat berjalan dengan baik, terorganisir dalam perencanaan setiap daerah, dapat dipastikan akan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Ini membutuhkan peran pemerintah pusat dan daerah dari sisi pengeluaran dan menggali potensi pendapatan masing-masing daerah dan menekan tingkat inflasi daerah, sehingga investor tertarik untuk berinvestasi di daerah, otomatis tercipta pembukaan lapangan kerja, maka disitulah terjadi penyerapan tenaga kerja dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga perubahan proporsi gini ratio (disparitas) berbanding lurus terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Pada titik awal hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan

penyerapan tenaga kerja adalah fungsi produksi agregat sebagai awalnya dikembangkan oleh Robert Sollow (Olivier Blanchard, 2000). Ketika ada ekspansi peningkatan pemerataan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi 1%, itu akan mengasimilasi 400 ribu individu. Dengan demikian, untuk menyerap semua tenaga kerja baru setiap tahunnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia minimal harus tumbuh sekitar 6,25%. Berikut tren inflasi dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 1. 3 Tren inflasi, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia Tahun 2011-2021

Gambar 1.3 menunjukkan inflasi mengalami fluktuasi sejak tahun 2011-2014 mengalami peningkatan secara signifikan dan tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan, sejalan dengan periode yang sama pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dan ketimpangan pendapatan mengalami peningkatan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dan ketimpangan pendapatan

mengalami penurunan dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Sedangkan angka kemiskinan menunjukkan penurunan setiap tahunnya.

Isu desentralisasi fiskal, khususnya dana perimbangan, dana desa, anggaran infrastruktur, serta inflasi, investasi, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia merupakan fenomena pembangunan untuk dikaji dan di analisis lebih dalam tentang *problem solving* (pemecahan masalah) apa terhadap kondisi perekonomian daerah dan ketimpangan pendapatan dalam penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di daerah-daerah yang merupakan variabel indikator. Desentralisasi fiskal mengambil bagian yang sangat penting untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat miskin dan pemerataan pendapatan di Indonesia melalui berbagai program pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi stabil. Salah satu variabel dalam penurunan tingkat kemiskinan di daerah adalah pengelolaan dana perimbangan, dana desa, anggaran infrastruktur dan inflasi terhadap pemenuhan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, komponen dana perimbangan, dana desa, dan anggaran infrastruktur menjadi anggaran yang sangat penting karena jumlahnya yang sangat besar dan setiap tahunnya mengalami peningkatan serta menjadi pendorong utama dalam setiap kegiatan pemerintah daerah. Apabila anggaran tersebut digunakan secara optimal, maka masalah kemiskinan dapat tertanggulangi dengan cepat (M. L. Anwar et al., 2016).

Dengan demikian, strategi yang tepat diperlukan dengan mengklasifikasi terlebih dahulu golongan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan karakteristiknya. Pada umumnya, suatu kondisi disebut miskin bila digambarkan dengan ketidakberdayaan memenuhi tingkat kebutuhan

dasar manusia. Kemiskinan tersebut meliputi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang mencakup aspek primer dan sekunder (Ingratubun, 2019).

Pemerintah pusat dan daerah memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemandirian daerah serta pengelolaan APBD dan APBDesa. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan kondisi ini dengan berpartisipasi dalam rangka perencanaan pembangunan daerah dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses pembangunan di daerah. Jika masyarakat terlibat dalam penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, maka akan membentuk pandangan yang baik terhadap APBD dan APBDesa. APBD dan APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dan pemerintah desa yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Melihat keadaan tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia, tentunya menyebabkan pemerintah daerah perlu merumuskan dan merealisasikan kebijakan yang tepat untuk menekan tingkat kemiskinan melalui pemerataan pendapatan dengan teknik peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dana perimbangan, dana desa, dan anggaran infrastruktur serta inflasi secara fungsi sudah diformulasikan untuk pemerintah daerah sesuai proporsi tertentu. Dengan kata lain, keberhasilan dari pengelolaan dana perimbangan, dana desa, anggaran infrastruktur, dan stabilitas inflasi akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi serta menekan ketimpangan pendapatan untuk pengentasan kemiskinan (Gumelar, 2019). Untuk mengoptimalkan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan untuk melakukan berbagai program tertentu dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat daerah dan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Pemerintah menunjukkan peran

penting pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam mereduksi tingkat kemiskinan masyarakat (Syamsul, 2020).

Dengan isu-isu dan pendalaman teori yang telah dipaparkan, secara keseluruhan dana perimbangan, dana desa, anggaran infrastruktur, investasi dan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, serta inflasi yang cukup stabil tetapi tingkat kemiskinan di Indonesia masih relatif. Peningkatan alokasi dana perimbangan, dana desa, anggaran infrastruktur dapat membantu kinerja pemerintah daerah untuk mehidupkan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, sehingga kemiskinan di Indonesia dapat diatasi.

Melihat gambaran di atas, ada beberapa inspirasi yang mendasari peneliti pada setiap variabel, antara lain variabel dana perimbangan, dana desa, anggaran infrastruktur dan inflasi pada tingkat kemiskinan melalui variabel investasi, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Selanjutnya, beberapa hal baru dikembangkan dalam penelitian ini, yaitu: menempatkan investasi, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan sebagai variabel intermediasi dalam teknik analisis jalur untuk melihat rangkaian hubungan saling ketergantungan (*interdependence*) secara bersama-sama antara variabel eksogen dan endogen serta untuk menciptakan tipologi wilayah 33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indonesia, maka disertasi ini mengusung judul: “**Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan di Indonesia**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, pada tahun 2015-2021 jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 14,64 juta jiwa atau 9,7% yang mengalami penurunan rata-rata hanya 10,13% per tahun, dengan jumlah

penduduk miskin di perkotaan mencapai 7,60% dan di perdesaan 12,53% pada tahun 2021 dan gini ratio mengalami penurunan hanya 0,39% per tahun. Namun berbanding terbalik dengan peningkatan dana perimbangan, dana desa dan anggaran infrastruktur selama kurun waktu 2015-2021 yang dapat dimanfaatkan untuk pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia bagaikan dua hal yang sama urgennya, dimana antara satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Permasalahan kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan juga akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Selain itu, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan juga akan memberikan dampak instabilitas sosial, ketidakpastian dan tragedi kemanusiaan seperti kelaparan, tingkat kesehatan yang rendah dan gizi buruk. Besarnya pengeluaran pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi sehingga dapat menekan ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji sejauhmana hubungan variabel-variabel tersebut dalam kurun waktu 2015-2021.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka timbul keinginan untuk mengetahui dan menganalisis lebih mendalam desentralisasi fiskal khusus dana perimbangan, dana desa, anggaran infrastruktur dan inflasi berpengaruh langsung dan tidak langsung melalui investasi, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan, sehingga masalah utama pada penelitian ini dirumuskan adalah:

1. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia secara langsung maupun tidak langsung melalui investasi, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan?

2. Apakah dana desa berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia secara langsung maupun tidak langsung melalui investasi, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan?
3. Apakah anggaran infrastruktur berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia secara langsung maupun tidak langsung melalui investasi, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan?
4. Apakah inflasi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia secara langsung maupun tidak langsung melalui investasi, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan?
5. Apakah investasi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan?
6. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia secara langsung maupun tidak langsung melalui ketimpangan pendapatan?
7. Apakah ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel dana perimbangan, dana desa, anggaran infrastruktur dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia melalui variabel investasi, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, serta mengeksploitasinya kedalam model konseptual baru yang berpijak pada teori utama yaitu Teori Keynes, Teori Adolf Wagner, Teori Myrdal, dan Teori Harrod Domar. Namun secara eksplisit, tujuan penelitian ini adalah menjawab beberapa masalah, khususnya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia melalui investasi, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia melalui investasi, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh anggaran infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia melalui investasi, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia melalui investasi, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Investasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia melalui ketimpangan pendapatan.
7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, dan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, meliputi:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian tentang analisis desentralisasi fiskal dalam kaitannya kemandirian daerah terhadap tingkat kemiskinan diharapkan

dapat memberikan manfaat praktis dan pragmatis serta informasi kepada pemerintah daerah di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi di Indonesia sebagai bahan pemikiran dalam mewujudkan tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan di daerah.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia penelitian karena selama ini masih terdapat inkonsistensi baik secara hipotetis maupun eksperimental dalam kaitan antara pelaksanaan desentralisasi fiskal, serta variabel makro lainnya terhadap tingkat kemiskinan. Secara teoritis, analisa ini penting untuk memahami bagaimana pelaksanaan desentralisasi fiskal dikaitkan dengan ekonomi makro terhadap tingkat kemiskinan yang telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Pemahaman ini sangat penting sebagai upaya untuk memahami bagaimana pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan tujuan akhir untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui indikator-indikator ekonomi makro. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Memberikan gambaran pengaruh secara langsung maupun tidak langsung dana perimbangan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia melalui investasi, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.
2. Memberikan gambaran pengaruh secara langsung maupun tidak langsung dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia melalui investasi, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.
3. Memberikan gambaran pengaruh secara langsung maupun tidak langsung anggaran infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia melalui investasi, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.

4. Memberikan gambaran pengaruh secara langsung maupun tidak langsung inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia melalui investasi, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.
5. Memberikan gambaran pengaruh secara langsung maupun tidak langsung investasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan.
6. Memberikan gambaran pengaruh secara langsung maupun tidak langsung pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia melalui ketimpangan pendapatan.
7. Memberikan gambaran pengaruh secara langsung ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Setiap penelitian ilmiah dihadapkan pada persoalan aspek waktu, aspek wilayah atau lokasi penelitian. Berdasarkan tujuan di atas dalam disertasi ini sesuai dengan judul penelitian “Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan di Indonesia”, maka ruang lingkup objek penelitian adalah dana perimbangan, dana desa, anggaran infrastruktur, inflasi, investasi, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan pada 33 Provinsi di Indonesia dengan sumber data dari Kementerian Keuangan RI, Badan Pusat Statistik, APBD per Provinsi di Indonesia dan sumber-sumber terkait lainnya pada masa eksplorasi tahun 2015 sampai tahun 2021.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Kajian Teoritis Tingkat Kemiskinan

Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan adalah kesulitan dalam kesejahteraan, dan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan dibawah USD1 setiap hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah USD2 setiap hari atau pada tingkat yang ditetapkan oleh setiap negara. Kemudian Badan Pusat Statistik melihat kemiskinan sebagai keadaan di mana seseorang atau daerah mengalami masalah dalam meningkatkan kehidupan yang lebih layak atau dapat dikatakan bahwa ketidakmampuan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Kondisi ketidakmampuan ini digambarkan dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk mengatasi kebutuhan pokok berupa sandang dan pangan, sedangkan tingkat kemiskinan merupakan salah satu elemen yang menggambarkan derajat kesejahteraan masyarakat dan menekan laju pertumbuhan sebagai salah satu tujuan dari suatu pembangunan ekonomi negara.

Teori kemiskinan sebagian besar dimulai dengan dua paradigma/kerangka berfikir yang mempengaruhi pemahaman kemiskinan serta penanggulangan kemiskinan. Dua paradigma/kerangka berfikir yang dimaksud adalah Neo-Liberal dan Demokrasi-sosial. Kerangka berfikir ini memiliki disparitas yang sangat jelas, terutama dalam melihat kemiskinan atau memberikan jawaban untuk menangani masalah kemiskinan. Paradigma/kerangka berfikir yang dimaksud adalah:

a. Paradigma Neo-Liberal

Paradigma Neo-Liberal, individu dan prosedur pasar bebas menjadi fokus utama dalam melihat kemiskinan (Syahyuti, 2006). Pendekatan ini menempatkan kebebasan individu menjadi komponen penting dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam melihat kemiskinan, bahwa kemiskinan merupakan masalah individu yang merupakan dampak dari pilihan individu. Untuk pendekatan ini kekuatan pasar adalah kunci utama untuk memecahkan masalah kemiskinan. Hal ini karena kekuatan pasar yang diperluas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mengentaskan kemiskinan. Untuk pendekatan ini strategi pengentasan kemiskinan bersifat sementara serta peran pemerintah sangat kecil. Peran pemerintah hanya dilaksanakan jika lembaga-lembaga di masyarakat, seperti keluarga, kelompok swadaya, serta lembaga-lembaga lain tidak mampu lagi menangani kemiskinan.

Paradigma Neo-liberal ini didorong oleh Bank Dunia dan telah menjadi metodologi yang digunakan oleh hampir semua kajian tentang kemiskinan. Estimasi kemiskinan tersebut kemudian secara tegas dipengaruhi oleh sudut pandang *income poverty* yang menggunakan pendapatan sebagai satu-satunya indikator "garis kemiskinan".

Kelemahan paradigma ialah terlalu memandang kemiskinan hanya melalui pendapatan serta kurang melibatkan orang miskin sebagai subyek dalam permasalahan kemiskinan (Cheyne et al., 1998). Ini mendorong jenis-jenis kemiskinan yang ada di mata publik cukup menonjol untuk diperhatikan. Dengan demikian, akar permasalahan yang mendasari penyebab kemiskinan tidak dapat ditemukan, namun pendekatan *income poverty* ini lebih layak

untuk dilihat dan dikaji karena cenderung dapat terukur, dan sasaran pada perbaikan ditingkat individu langsung dirasakan oleh masyarakat miskin.

b. Paradigma Demokrasi-Sosial

Paradigma Demokrasi-Sosial tidak melihat kemiskinan sebagai masalah individu, melainkan lebih melihatnya menjadi masalah struktural (Syahyuti, 2006). Ketidakadilan dan ketidakseimbangan di mata publik yang menyebabkan kemiskinan ada pada masyarakat. Untuk metodologi ini, akses tertutup bagi kelompok tertentu menjadi alasan kemiskinan. Pendekatan ini dengan tegas mengecam kerangka ekonomi yang tidak terbatas, namun tidak melihat kerangka kerja yang harus dihapuskan, karena masih dipandang sebagai bentuk pengorganisasian ekonomi yang terbaik.

Pendekatan ini juga menekankan pada kesetaraan menjadi prasyarat krusial dalam memperoleh kemandirian serta kebebasan (Febrianti, 2015). Kemandirian dan peluang akan tercapai jika setiap orang memiliki atau dapat memperoleh sumber-sumber untuk kapasitas mereka yang sebenarnya, seperti pendidikan, kesejahteraan serta pendapatan yang relatif. Peluang disini bukan hanya kebebasan dari pengaruh luar tetapi juga peluang dalam memutuskan. Di sinilah peran negara dituntut untuk mampu memberikan jaminan kepada setiap orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, dimana mereka dimungkinkan untuk memilih pilihan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Peran pemerintah dalam pendekatan ini sangat diperlukan, terutama dalam merumuskan strategi untuk mengurangi kemelaratan. Untuk pendekatan ini, kemiskinan harus ditangani secara institusional (organisasi), misalnya melalui program jaminan sosial yang dikelola pemerintah. Salah satu modelnya adalah pemberian tunjangan pendapatan atau dana pensiun, yang dapat meningkatkan

peluang, ini karena aksesibilitas penghasilan dasar sehingga individu dapat mengatasi masalah mereka dan memutuskan keputusan mereka, dan di sisi lain kekurangan penghasilan dasar tersebut dapat menyebabkan ketergantungan.

Kelemahan teori ini adalah bahwa ada ketergantungan yang tinggi pada negara dalam membentuk desain dan organisasi untuk menanggulangi kemiskinan. Sedangkan pencapaian pengembangan struktur dan institusi yang tepat dalam menangani kemiskinan itu sendiri bertumpu pada kemampuan masyarakat miskin. Hal ini karena kemiskinan tidak dilihat dari kebutuhan dasar yang harus dipenuhi melainkan pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, pendekatan ini membuka dimensi lain dari penyebab kemiskinan, khususnya pada struktur dan institusi, yang telah menutup akses untuk kelompok tertentu dalam masyarakat. Jadi melalui pendekatan ini, cenderung terlihat bahwa pangkal persoalan kemiskinan tidak hanya pada kemampuan individu tetapi bagaimana struktur dan institusi dalam masyarakat memberikan jaminan kepada semua kelompok untuk mendapatkan kesetaraan dalam mencapai kemandirian dan kesempatan.

Penyebab kemiskinan dimulai dengan teori lingkaran setan kemiskinan yang tak berujung. Menurut Nurkse, (1961) kemiskinan bertumpu pada teori lingkaran setan kemiskinan, adanya ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal, dan keterbelakangan sumber daya manusia mengakibatkan produktivitas rendah. Efisiensi yang rendah akan menyebabkan pendapatan ikut rendah, pendapatan yang rendah menyebabkan investasi serta tabungan menjadi turun. Dengan asumsi bahwa jika pendapatan terus menurun, itu akan mendorong kemiskinan karena modal untuk mengatasi masalah kehidupan tidak terpenuhi.

Kemudian, pada saat itu, teori Adam Smith menyatakan bahwa tidak ada masyarakat yang sejahtera dan bahagia, jika mayoritas penduduknya dalam

keadaan kemiskinan dan penderitaan. Dalam bukunya *The Wealth of Nations* menyatakan bahwa kebutuhan pokok adalah hal-hal yang bersifat alamiah, tetapi juga hal-hal yang tidak diatur oleh norma-norma umum tentang kelayakan. Sedangkan Amartya Sen, (1999), kemiskinan dapat terjadi akibat perampasan kapabilitas (*capability deprivation*), yakni kebebasan untuk mencapai sesuatu dalam hidup seseorang. Menurut penyebabnya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah terjadi karena kelangkaan dan kekurangan sumber daya alam sehingga produktivitas masyarakat menjadi rendah, sedangkan kemiskinan struktural terjadi karena alokasi sumber daya yang ada tidak tersampaikan secara merata.

Kemiskinan adalah masalah paling serius yang dihadapi oleh umat manusia di zaman yang serba canggih ini, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya penting untuk mengurangi kemiskinan. Secara umum, pengurangan kemiskinan telah dijadikan sebagai tujuan pembangunan milenium (*millennium development goal*), khususnya mengurangi populasi penduduk miskin menjadi setengah dari keadaan pada tahun 2020.

Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin merupakan dimensi dari kesejahteraan atau kemiskinan yang selanjutnya dijadikan sebagai faktor yang menciptakan besarnya penduduk miskin (S. Saleh, 2002). Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin dalam suatu daerah adalah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Pada tataran fundamental, PDRB per kapita merupakan konsep gagasan dari pendapatan per kapita yang diimplementasikan penjelasannya pada lingkup regional/daerah. Besarnya pendapatan per kapita di suatu

daerah mencerminkan aspek pemerataan pendapatan dengan menggunakan besarnya nilai rata-rata keseluruhan pendapatan rumah tangga dalam perekonomian daerah. Konsep pendapatan per kapita seperti ini dianggap masih relevan untuk menerangkan terbentuknya jumlah penduduk miskin di daerah tersebut. Apabila pendapatan per kapita meningkat, maka kemampuan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah akan semakin meningkat.

Ini menunjukkan bahwa kemampuan pendapatan dalam mengatasi masalah kebutuhan pokok di daerah tersebut juga akan meningkat. Jika kapasitas untuk mengatasi masalah kebutuhan pokok meningkat, jumlah individu miskin di daerah tersebut akan berkurang. Kemudian lagi, dengan asumsi pendapatan per kapita di daerah berkurang ataupun menurun, maka kemampuan pendapatan rata-rata masyarakat di daerah tersebut juga akan berkurang. Jika kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok berkurang, maka jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut, PDRB per kapita berpengaruh negatif pada jumlah penduduk miskin.

2. Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan

Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan merupakan elemen penentu untuk jumlah penduduk miskin dari sisi pendekatan anggaran pemerintah. Pengeluaran ini mencakup semua program kemajuan pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan, maka semakin tinggi pula derajat kesejahteraan yang dapat dicapai atau diperoleh penduduk di suatu daerah.

3. Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu indikator kesejahteraan di bidang pendidikan adalah indikator banyaknya penduduk yang dinyatakan melek huruf. Indikator ini mencerminkan kapasitas penduduk di suatu daerah untuk mengakses fasilitas, layanan pemerintahan, dan sarana lainnya yang membutuhkan kemampuan untuk membaca dan menulis, termasuk prasyarat untuk mencari pekerjaan.

Semakin tinggi jumlah penduduk yang dinyatakan melek huruf, semakin tinggi pula kapasitas masyarakat untuk mengakses fasilitas maupun sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya.

4. Jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses air bersih

Air minum atau air bersih merupakan salah satu pelayanan publik yang sangat signifikan, sesuai dengan manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik masyarakat maupun keluarga. Masuknya air minum atau air bersih akan menentukan kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yang terdiri dari kebutuhan akan makanan dan minuman, serta berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan. Semakin tinggi jumlah penduduk yang tidak mendapatkan air bersih, semakin tinggi jumlah penduduk miskin di daerah tersebut.

5. Jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses fasilitas kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan sarana dan prasarana publik yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan saat ini tidak hanya mampu memberikan layanan kesehatan, tetapi juga berperan dalam memberikan peningkatan gizi keluarga.

Layanan kesehatan akan memberikan pencegahan dan pengobatan dan terapi atas penyakit atau masalah klinis, sehingga akan mampu

meningkatkan kualitas daya tahan tubuh masyarakat. Semakin tinggi jumlah orang yang tidak mendapatkan akses fasilitas kesehatan, semakin tinggi resiko penularan penyakit atau gizi buruk yang selanjutnya akan menjadi penyebab tingginya angka kematian dan buruknya kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi. Sehingga pemerintah harus memahami elemen apa yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Berikut beberapa elemen-elemen penyebab kemiskinan di Indonesia:

1. Negara Indonesia memiliki SDM yang berkualitas rendah dan buruk, sehingga SDM Indonesia tidak dapat menyaingi SDM di luar negeri, hal ini menyebabkan banyak kelompok-kelompok memutuskan untuk mengimpor tenaga kerja dibandingkan dengan menggunakan tenaga kerja sendiri, namun dengan kualitas rendah dan buruk. Indikator rendahnya kualitas SDM harus terlihat dengan tingkat pendidikan yang mereka miliki.
2. Pemerintah daerah kurang memperhatikan pengembangan potensi daerah yang dimiliki, yang mengakibatkan kualitas rendah dari potensi fisik dan infrastruktur daerah untuk memperlambat suatu kegiatan ekonomi daerah.
3. Kesalahan strategi yang dijalankan oleh pemerintah untuk upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kualitas SDM yang dimiliki.

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dampak globalisasi yang membuat kehidupan di negara ini dibatasi oleh beberapa individu atau kelompok yang dapat memperoleh sumber-sumber daya yang signifikan pada produksi yang penting. Kemiskinan adalah penyakit sosial dan musuh utama yang harus dihadapi bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, Robert Chambers, (1983) menegaskan bahwa faktor penyebab terjadinya kemiskinan adalah lilitan

kemiskinan hilangnya hak atau kekayaan yang sukar untuk kembali, mungkin disebabkan desakan kebutuhan yang melampaui ambang batas kekuatannya, contohnya pengeluaran yang sudah diperhitungkan sebelumnya, namun jumlahnya sangat besar, atau tiba-tiba dihadapkan di krisis yang hebat. Biasanya, kebutuhan yang mendorong seseorang yang terlilit kemiskinan terkait dengan lima hal; komitmen hukum, bencana, ketidakmampuan fisik, dan pengeluaran yang tidak produktif. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa unsur-unsur penyebab terjadinya kemiskinan merupakan faktor internal sebagai kebutuhan yang wajib terpenuhi, namun tidak memiliki kemampuan relatif untuk menangani sumber-sumber daya yang dimiliki. Faktor eksternal berupa bencana alam, misalnya, krisis ekonomi dan tidak adanya pemihakan sebagai pengaturan yang memberikan kesempatan dan peluang bagi masyarakat miskin. Beberapa penyebab kemiskinan antara lain:

1. Tingkat kelahiran yang tinggi akan menghasilkan laju pertumbuhan penduduk yang sangat besar di suatu negara. Jika laju pertumbuhan ini tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi, maka pada saat itu, hal ini akan menimbulkan tingkat kemiskinan yang meningkat di suatu negara.
2. Pembatasan lapangan pekerjaan menyebabkan tingkat pengangguran di suatu negara menjadi tinggi. Semakin besar pengangguran, tingkat kemiskinan juga akan meningkat. Peningkatan tingkat pengangguran juga dapat menyebabkan berbagai masalah yang meresahkan masyarakat. Misalnya perkembangan pelanggaran hukum, pengemis dan lain-lain.
3. Masyarakat dengan derajat pendidikan yang rendah cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan dan pengetahuan yang memuaskan. Jadi mereka tidak bisa menyaingi orang-orang yang berpendidikan tinggi di dunia kerja

maupun dunia usaha, ini kemudian membuat tingkat pengangguran dan kemiskinan meningkat.

4. Peristiwa bencana alam adalah faktor penyebab kemiskinan yang tidak dapat dicegah karena bersumber dari alam. Peristiwa bencana alam seperti tsunami, banjir, tanah longsor dan lain-lain akan menimbulkan kerusakan pada infrastruktur maupun psikologis atau kejiwaan. Peristiwa bencana alam yang signifikan dapat membuat masyarakat mengalami kemiskinan karena kehilangan harta benda.
5. Disparitas dalam pola kepemilikan sumber daya akan menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Biasanya, masyarakat yang hanya memiliki sumber daya terbatas dan berkualitas rendah dan buruk berada di bawah garis kemiskinan.

Dilihat dari kondisinya, kemiskinan itu ada empat aspek, berikut empat aspek kemiskinan yang menyertainya adalah:

1. Kemiskinan absolut, adalah suatu keadaan di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang untuk memenuhi kebutuhan pokok akan sandang, pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diharapkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan dicirikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok yang terkait dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Jenis kemiskinan absolut ini paling luas digunakan sebagai ide untuk memutuskan atau mencirikan kriteria individu atau kelompok yang disebut miskin.
2. Kemiskinan kultural, adalah jenis kemiskinan yang terjadi karena mentalitas dan kecenderungan individu atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak berkeinginan untuk memperbaiki

taraf hidup di zaman sekarang. Kecenderungan ini dapat berupa sikap apatis, tidak efisien atau tidak hemat, kurang imajinatif, dan umumnya bergantung pada bantuan dari berbagai pihak.

3. Kemiskinan struktural, adalah jenis kemiskinan yang disebabkan oleh ketiadaan akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Jenis kemiskinan ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif atau tidak adil.
4. Kemiskinan relatif, adalah jenis kemiskinan yang terjadi karena dampak dari kebijakan pembangunan yang belum menjangkau semua lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketidakseimbangan pendapatan atau disparitas pendapatan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan tersebut pada umumnya dikenal sebagai daerah yang tertinggal.

Keempat aspek tersebut menunjukkan bahwa penyebab kemiskinan tidaklah tunggal dapat muncul dari kondisi manusia, seperti yang digambarkan dalam kemiskinan absolut. Bagaimanapun juga, kemiskinan dapat ditimbulkan karena faktor kebijakan pemerintah yang menghasilkan ketimpangan pendapatan, bahkan bisa juga karena kondisi yang dibentuk oleh masyarakat melalui struktur dan institusi dalam masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh aspek kemiskinan struktural.

Pengukuran mengenai kemiskinan yang telah dimanfaatkan secara luas sejauh ini tergantung pada ukuran atas rata-rata pendapatan dan rata-rata pengeluaran masyarakat dalam suatu daerah. Pengembangan pengukuran dengan menyertakan perspektif tentang dimensi masalah dalam kemiskinan memperkirakan jumlah individu dalam kelompok masyarakat yang mendapatkan

pelayanan atau fasilitas untuk kesehatan dan pendidikan. Beberapa perluasan estimasi lainnya memasukkan aspek sosial politik sebagai sumber perspektif untuk memahami perkembangan kemiskinan. Keseluruhan hasil pengukuran ini kemudian dikatakan sebagai indikator-indikator kemiskinan yang merupakan indikator-indikator sosial dalam pembangunan yang sedang dikembangkan. Beberapa indikator-indikator mengenai kemiskinan digambarkan di bawah ini:

1. Indikator kemiskinan berdasarkan dimensi ekonomi

Menurut perspektif ekonomi, kemiskinan adalah jenis ketidakmampuan pendapatan seseorang atau kelompok orang untuk mengatasi masalah kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar. Unsur ekonomi kemiskinan dicirikan sebagai tidak adanya sumber daya yang dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan seseorang baik secara finansial maupun jenis kekayaan lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suryawati, 2004). Aspek ekonomi untuk kemiskinan memiliki dua aspek, yaitu aspek pendapatan dan aspek konsumsi atau pengeluaran. Aspek pendapatan yang dapat digunakan sebagai tanda kemiskinan adalah pendapatan per kapita, sedangkan aspek konsumsi yang dapat digunakan sebagai tanda kemiskinan adalah garis kemiskinan.

a. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita menyatakan besarnya rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah dalam 1 (satu) tahun. Berapa besar pendapatan per kapita (*income per capita*) ditentukan dari seberapa besar output dibagi oleh jumlah penduduk di suatu daerah selama 1 tahun. Indikator pendapatan per kapita memaknai perkembangan pemerataan pendapatan yang merupakan salah satu tanda berkembangnya kondisi

yang disebut miskin. Pendapatan per kapita dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut (Michael P. Todaro, 1997):

$$Y_{\text{Per Kapita}} = \frac{Y_t}{\text{Pop}_t}$$

di mana:

$Y_{\text{Per Kapita}}$ = Pendapatan per kapita

Y_t = Pendapatan pada tahun t

Pop_t = Jumlah penduduk pada tahun t.

Variabel pendapatan dapat dikatakan sebagai Produk Domestik Bruto (PDB), Pendapatan Nasional, atau Produk Domestik Regional Bruto, sedangkan jumlah penduduk menyatakan banyaknya penduduk pada periode t yang diukur pendapatan per kapitanya di suatu daerah.

b. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan salah satu penanda kemiskinan yang mengekspresikan rata-rata pengeluaran makanan dan non-makanan per kapita pada kelompok referensi (*reference population*) yang telah ditetapkan (Badan Pusat Statistik, 2021). Kelompok referensi ini dicirikan sebagai populasi kelas marjinal, misalnya mereka yang hidupnya diatur sedemikian rupa berada di atas garis kemiskinan.

BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai batas pemanfaatan dasar dari kelompok masyarakat marjinal yang berada pada referensi pendapatan lebih tinggi daripada pendapatan rendah. Pada dasarnya, indikator garis kemiskinan memperkirakan kapasitas pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar atau mengukur daya beli masyarakat di suatu daerah. Pemanfaatan yang dimaksud dalam garis kemiskinan ini

meliputi pemanfaatan untuk sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan (Suryawati, 2004).

2. Indikator kemiskinan berdasarkan dimensi peran pemerintah

Pemerintah sebagai pengendali sekaligus dinamisator dalam perekonomian merupakan salah satu wadah yang berperan penting dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan. Di Indonesia, pelaksanaan pengentasan kemiskinan difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan yang bekerja sama dengan Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial.

Program pengentasan masalah kemiskinan ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui pos pengeluaran untuk program pembangunan. standar yang digunakan untuk program ini adalah bahwa pengentasan kemiskinan dilakukan melalui upaya untuk peningkatan pembangunan di bidang SDM dan pemenuhan sarana maupun prasarana fisik. Kedua jenis pelaksanaan dalam APBN dan APBD ini juga disebut investasi pemerintah untuk SDM dan investasi pemerintah di bidang fisik.

3. Indikator kemiskinan berdasarkan dimensi kesehatan

Dari berbagai informasi kemiskinan yang dikumpulkan, dinyatakan bahwa ada hubungan antara kemiskinan dan kualitas kesehatan masyarakat. Rendahnya kemampuan pendapatan dalam mencukupi ataupun memenuhi kebutuhan pokok membuat keterbatasan kemampuan menjangkau atau mendapatkan standar kesehatan yang ideal ataupun layak baik dalam bentuk gizi maupun pelayanan kesehatan yang memadai. Akibat dari kondisi ini adalah tingginya resiko terhadap kondisi kekurangan gizi dan kerentanan atau resiko terserang penyakit menular. Kelompok masyarakat yang disebut miskin

juga memiliki kendala untuk mendapatkan pelayanan kesehatan atau pengobatan yang memadai sehingga akan menimbulkan resiko kematian yang tinggi. Indikator pengelolaan air bersih atau air minum merupakan salah satu kebutuhan untuk memenuhi standar hidup yang terbaik di suatu daerah. Aksesibilitas air bersih akan mendukung masyarakat setempat untuk mewujudkan standar hidup sehat yang baik. Untuk situasi ini, ketersediaan air bersih akan mengurangi kondisi desinfeksi air yang tidak layak. Masyarakat yang kurang terjangkau oleh pengelolaan air bersih/minum memiliki kualitas kesehatan yang rendah dibandingkan masyarakat yang mendapatkan pengelolaan air bersih.

Menurut Badan Pusat Statistik (2021) untuk mengukur kemiskinan menggunakan gagasan tentang kemampuan seseorang untuk mengatasi kebutuhan dasar atau yang disebut *Basic Need Approach* (pendekatan kebutuhan dasar). Dengan pendekatan metodologi ini, perkiraan kemiskinan dalam hal pengeluaran ditentukan sebagai kegagalan seseorang dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang meliputi: sandang, pangan dan papan. Sehingga cenderung beralasan bahwa penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita setiap bulannya berada di bawah garis kemiskinan. Sehingga jumlah penduduk miskin terpenuhi di wilayah perdesaan dan wilayah perkotaan.

Kepastian perhitungan garis kemiskinan di masyarakat adalah apabila daerah tersebut memiliki suatu penghasilan yang lebih rendah Rp.425.250,- per orang per bulan atau Rp.14.175,- per orang per hari. Kepastian perhitungan jumlah tersebut berasal dari perkiraan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan pangan dan non pangan. Kepastian kebutuhan pokok yang harus dikonsumsi setiap hari dapat disamakan dengan 2.100 kilo kalori

per kapita setiap hari. Sedangkan garis kemiskinan non pangan untuk kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Jadi kebutuhan pokok terlayani oleh 47 jenis barang di wilayah perdesaan dan 51 jenis barang di wilayah perkotaan.

Sedangkan menurut Bank Dunia, norma untuk penentuan kemiskinan tergantung pada penghasilan per kapita. Penduduk termasuk masyarakat miskin adalah individu yang memiliki pendapatan per kapita tidak cukup dari sepertiga rata-rata penghasilan per kapita nasional. Jadi cenderung dapat disimpulkan bahwa proporsi kemiskinan menurut Bank Dunia adalah sebesar \$1,9 atau sekitar Rp.27.000,- per orang per hari dalam kurs (1 dollar = Rp.14.331,-).

2.1.2 Kajian Teoritis Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah suatu gagasan yang memahami perbedaan kemakmuran, gaya hidup, serta pendapatan yang diperoleh atau dihasilkan oleh individu atau rumah tangga dalam masyarakat, menyebabkan penyebaran yang tidak seimbang antar wilayah disebabkan oleh perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang dapat di akses. Ketimpangan pendapatan adalah salah satu bagian kemiskinan yang harus dicermati karena pada dasarnya merupakan proporsi kemiskinan relatif, khususnya perkiraan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan daerah. Ketimpangan pendapatan mencerminkan peredaran hasil kemajuan pembangunan suatu daerah atau negara, baik yang diperoleh setiap individu maupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan masyarakat. Ketimpangan pendapatan lebih menonjol di negara-negara yang baru memulai pembangunannya, sedangkan untuk negara-negara berkembang atau lebih tinggi tingkat pendapatannya cenderung lebih merata atau tingkat ketimpangannya rendah (Riadi, 2020).

Menurut Sadono Sukirno (2006), ada dua gagasan mengenai perkiraan ketimpangan pendapatan, yaitu gagasan ketimpangan absolut dan ketimpangan relatif. Gagasan ketimpangan absolut adalah gagasan memperkirakan ketimpangan yang menggunakan parameter dengan suatu nilai yang mutlak. Sedangkan gagasan ketimpangan relatif adalah gagasan memperkirakan ketimpangan distribusi pendapatan yang membandingkan besarnya pendapatan yang diterima oleh seorang individu atau sekelompok anggota masyarakat dengan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Todaro. Michael P. & Smith. Stephen C., (2006), ketimpangan pendapatan adalah adanya kontras dalam pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat, sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan nasional di antara masyarakat. Menurut Robert E. Baldwin (1986), ketimpangan pendapatan adalah perbedaan dalam kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, hal ini tercermin dalam perbedaan pendapatan. Menurut Mudrajad Kuncoro (2003), ketimpangan pendapatan adalah standar atau cara hidup yang relatif pada semua masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah, khususnya perbedaan elemen produksi dan sumber daya yang dapat di akses. Ketimpangan pendapatan merupakan suatu pemikiran yang mengkaji penyebaran pendapatan setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat (Sadono Sukirno, 2006). Ketimpangan pendapatan dapat ditentukan oleh tingkat pembangunan suatu negara, heterogenitas etnis, dan adanya kediktatoran dan pemerintahan yang gagal di suatu negara (Hajiji, 2010).

Ketimpangan pendapatan akan terjadi pada tahap awal pertumbuhan ekonomi. Pada masa ini distribusi pendapatan akan memburuk, namun, di tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan mengalami peningkatan dan ketimpangan akan terkikis, sehingga nantinya akan menciptakan masyarakat

yang lebih setara. Menurut Todaro. Michael P. & Smith. Stephen C., (2006), semakin tidak merata pola distribusi pendapatan, semakin tinggi pula laju pertumbuhan ekonomi karena orang-orang kaya memiliki rasio tabungan yang lebih tinggi dari pada orang-orang miskin sehingga akan meningkatkan *aggregate saving rate* yang diikuti oleh peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Lincolin Arsyad, (2010), ada delapan faktor penyebab ketimpangan pendapatan dalam suatu daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan penurunan pendapatan per kapita.
2. Inflasi di mana naiknya pendapatan tetapi belum dilanjutkan secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang.
3. Disparitas pembangunan antar wilayah.
4. Investasi yang besar pada proyek-proyek yang padat modal (*capital insentive*), sehingga tingkat pendapatan modal dari kerja tambahan sangat besar dibandingkan dengan tingkat pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan, sehingga pengangguran meningkat.
5. Mobilitas sosial yang rendah.
6. Pelaksanaan strategi industri substitusi impor yang menghasilkan peningkatan harga barang-barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha kelompok kapitalis.
7. Memburuknya dana desa (*term of trade*) negara non industri dalam perdagangan dengan negara-negara berkembang, karena ketidakelestarian minat negara-negara maju terhadap produk ekspor dari negara-negara berkembang.
8. Musnahnya usaha-usaha kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Menurut Todaro. Michael P. & Smith. Stephen C., (2006), distribusi pendapatan individu (*personal distribution of income*) atau distribusi ukuran pendapatan (*size distribution of income*) adalah ukuran yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini langsung menghitung berapa penghasilan yang diterima setiap individu atau rumah tangga. Pada umumnya, proporsi utama ketimpangan ditentukan dengan menghitung tingkat pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk miskin. Selain itu, cenderung diperkirakan dengan melihat tingkat pendapatan yang di dapat oleh 40% orang miskin dengan persentase yang diterima oleh 20% orang kaya. Tingkat ketimpangan berat dengan asumsi 40% penduduk yang paling miskin berada di bawah 12% pendapatan nasional. Tingkat ketimpangan ringan dengan asumsi 40% penduduk miskin mendapatkan lebih 17% dari pendapatan nasional.

Menurut Bank Dunia, ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung tingkat pendapatan masyarakat dari kelompok-kelompok berpendapatan rendah dibandingkan dengan total pendapatan penduduk. Ada tiga karakterisasi ketimpangan pendapatan menurut Bank Dunia, khususnya: ketimpangan tinggi 40% penduduk dengan pendapatan rendah dan mendapatkan <12% dari total pendapatan, ketimpangan sedang 40% penduduk dengan pendapatan rendah dan mendapatkan 12%-17% dari total pendapatan, ketimpangan rendah 40% penduduk pendapatan rendah dan mendapatkan >17% dari total pendapatan (Riadi, 2020).

Kerangka teoritis untuk menguraikan teori-teori utama tentang ketimpangan pendapatan. Terutama teori Kuznets tentang ketimpangan pendapatan dan pembangunan. Dimana, ide-ide pokok untuk mengukur ketimpangan pendapatan dan pembangunan dalam kerangka teori. Dengan cara ini, indikator pembangunan manusia dan ekonomi, dimana indeks

pembangunan manusia dan indeks produk domestik bruto digambarkan secara lebih rinci. Fungsi koefisien gini, merupakan tindakan yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan di suatu negara. Hipotesis Kuznets yang disimpulkan oleh Piketty dijelaskan bahwa, pada fase awal pembangunan ekonomi minoritas sebagai manfaat lain dalam proses industrialisasi. Sementara tahap pembangunan yang lebih maju, ketimpangan berkurang karena populasi besar yang mengambil keuntungan dari pertumbuhan ekonomi (Thomas Piketty & Emmanuel Saez, 2014).

Kurva Lorenz merupakan suatu kurva yang digunakan untuk menyelidiki distribusi pendapatan individu. Kurva Lorenz dipresentasikan oleh Conrad Lorenz, seorang analis dari Amerika Serikat pada tahun 1905. Kurva Lorenz menggambarkan hubungan antara kelompok-kelompok penduduk dan pangsa (*share*) pendapatan mereka. Kurva ini mempresentasikan hubungan antara tingkat penduduk dengan tingkat pendapatan yang diterima (Lincoln Arsyad, 2010). Menurut Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C., (2006), kurva Lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif yang nyata antara tingkat penerimaan pendapatan dengan tingkat pendapatan total yang selalu mereka dapatkan, misalnya satu tahun. Kurva ini terletak di mana sisi atas membahas persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya membahas persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri diletakkan pada diagonal utama bujur sangkar. Kurva Lorenz yang lebih dekat ke diagonal (lurus) menunjukkan pemerataan distribusi pendapatan nasional. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), itu mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin tidak konsisten dan tidak merata.

Kondisi ketimpangan yang ekstrim, misalnya situasi di mana semua pendapatan hanya diterima oleh satu orang, akan ditunjukkan dengan tumpang tindihnya kurva Lorenz dengan sumbu horizontal bawah dan sumbu vertikal kanan. Oleh karena itu, tidak ada negara yang memiliki pemerataan sempurna atau ketimpangan sempurna dalam distribusi pendapatannya, sehingga kurva Lorenz terletak disebelah kanan kurva diagonal untuk setiap negara. Semakin tinggi tingkat disparitas maka kurva Lorenz akan semakin melengkung (cembung) dan semakin mendekati sumbu horizontal bawah (Indra Maipita, 2014).

2.1.3 Kajian Teoritis Pertumbuhan Ekonomi

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah penciptaan tenaga kerja dan produk meningkat. Artinya, pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan aktivitas perekonomian di tengah masyarakat yang menyebabkan kenaikan produksi barang dan jasa, serta berujung pada bertambahnya pendapatan nasional (Krisnawati, 2021).

Definisi pertumbuhan ekonomi dalam kajian makroekonomi adalah suatu proses perubahan keadaan perekonomian yang terjadi di suatu negara secara terus menerus untuk mencapai suatu keadaan yang dipandang lebih baik untuk jangka waktu tertentu. Definisi itu menjelaskan, pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran dari kondisi perekonomian di suatu negara yang menjadi simbol keberhasilan pembangunan (Krisnawati, 2021).

Sementara teori pertumbuhan ekonomi merupakan gagasan untuk memahami unsur-unsur yang dapat mempengaruhi atau menentukan pertumbuhan ekonomi dalam proses jangka panjang. Teori pertumbuhan juga menjelaskan bagaimana unsur-unsur ini saling berhubungan sehingga dapat mendorong jalannya pertumbuhan ekonomi. Salah satu gambaran indikator

pertumbuhan ekonomi adalah produk domestik bruto (PDB) yang biasanya ditentukan dalam periode tiga bulan (triwulanan) dan tahunan. Produk domestik bruto memperkirakan dua hal, khususnya total pendapatan dari semua penduduk di sebuah wilayah ekonomi, dan semua manfaat pengeluaran untuk belanja barang dan jasa di kawasan perekonomian itu. akibatnya, produk domestik bruto dicirikan sebagai nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam periode tertentu. Teori pertumbuhan ekonomi dalam perkembangan studi ekonomi di masa sekarang ini, telah banyak teori pertumbuhan yang dikomunikasikan oleh berbagai pemikir atau peneliti di bidang ini. Padahal, secara umum, ada empat macam kelompok teori pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah teori-teori sebagaimana dikutip dari laman *Corporate Finance Institute* (Krisnawati, 2021) :

1. Teori pertumbuhan ekonomi klasik. Teori pertumbuhan klasik mengharapkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara akan menurun dengan meningkatnya populasi dan sumber daya yang semakin terbatas. Para ahli ekonom teori pertumbuhan klasik berpendapat bahwa kenaikan sementara produk domestik bruto riil per individu pasti akan mendorong ledakan populasi. Hal ini dapat mendorong penurunan sumber daya suatu negara, yang akhirnya menurunkan nilai produk domestik bruto riil dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Paling tidak ada tiga pemikir utama yang merumuskan teori pertumbuhan ekonomi klasik. Di tempat pertama, adalah Adam Smith, pelopor ilmu ekonomi modern serta "bapak" dari sistem ekonomi kapitalisme. Teori pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith melihat bahwa suatu perekonomian akan berkembang jika ada pertumbuhan penduduk yang tumbuh memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Proses spesialisasi di bidang pekerjaan diyakininya akan meningkatkan efisiensi tenaga kerja.

Kemudian, pada saat itu, mendorong kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, David Ricardo. Sudut pandang David Ricardo tentang teori pertumbuhan ekonomi bertentangan dengan Adam Smith. Menurutnya, pertumbuhan penduduk yang terlalu besar dapat memicu para tenaga kerja. Hal ini akan menyebabkan upah yang diterima oleh setiap individu menjadi berkurang. Upah tersebut digunakan untuk membiayai tingkat dasar hidup (*subsistence level*), dan dengan demikian perekonomian dapat mengalami stagnasi atau *stationary state*. Ketiga, Thomas Robert Malthus. Seperti yang ditunjukkan oleh Malthus, penduduk bertambah secara matematis (2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya), sedangkan makanan bertambah secara numerik (1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya). Jadi, seberapa banyak barang dan jasa, termasuk makanan, seringkali tidak diimbangi dengan jumlah penduduk. Dalam teori Malthus, pertumbuhan penduduk adalah efek proses pembangunan. Namun, cara paling umum untuk memperluas jumlah penduduk tidak dapat dilakukan tanpa ekspansi kesejahteraan yang sebanding. Malthus menyimpulkan bahwa ketika laju tingkat akumulasi modal meningkat, minat untuk bekerja juga meningkat. Kondisi ini mendukung pertumbuhan penduduk. Namun, pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan asalkan pertumbuhan tersebut meningkatkan minat yang kuat.

2. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Teori pertumbuhan neoklasik adalah model pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan bagaimana laju pertumbuhan ekonomi dapat stabil hanya jika tiga kekuatan ekonomi menjadi faktor integral: tenaga kerja; modal; dan teknologi. Adaptasi yang paling mudah dan paling terkenal dari pertumbuhan Neoklasik adalah model pertumbuhan Solow-Swan. Teori tersebut menyatakan bahwa equilibrium ekonomi jangka pendek adalah konsekuensi dari setiap jumlah tenaga kerja

dan modal yang mengambil bagian penting dalam siklus produksi. Teori tersebut menyatakan bahwa perubahan teknologi secara signifikan mempengaruhi kerja perekonomian secara keseluruhan. Teori pertumbuhan neoklasik membingkai tiga variabel penting untuk pertumbuhan ekonomi. Bagaimanapun, teori ini menggarisbawahi pada asumsinya bahwa keseimbangan akan menjadi tidak kekal atau sementara, atau keseimbangan jangka pendek. Berbeda dari keseimbangan jangka panjang, yang tidak membutuhkan salah satu dari ketiga faktor tersebut. Bagaimanapun, ada tiga pemikir utama yang mendukung Teori Pertumbuhan Neoklasik. Pertama, Harrod-Domar yang mengungkapkan pentingnya pembentukan modal atau investasi sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kokoh dan konsisten (*steady growth*). Pada saat pembentukan modal telah selesai, perekonomian diharapkan menciptakan produk dalam jumlah yang lebih besar. Teori Harrod Domar menyatakan bahwa sumber pertumbuhan adalah besarnya porsi pendapatan domestik bruto (PDB) yang ditabung, sebagai *capital stock* atau persediaan modal untuk memperluas pertumbuhan ekonomi negara. Kedua, Schumpeter, sementara yang lain menganggap penduduk sebagai sudut pandang utama selama proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, Schumpeter berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan (*entrepreneurship*). Untuk tujuannya, kewirausahaan adalah variabel penting yang mendorong pengembangan inovasi dan pertumbuhan aktivitas produksi. Ketiga, Robert Solow yang menyatakan bahwa dalam jangka panjang tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam siklus produksi. Pada dasarnya, semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi modal dan pengeluaran yang diciptakan. Teori dengan sudut pandang komparatif juga dikembangkan oleh

Trevor Swan. Teori Solow-Swan berpikir tentang pentingnya akumulasi modal "dari perspektif luas" sebagai sumber utama pertumbuhan. Akumulasi modal "dalam perspektif luas" dicirikan sebagai modal fisik dan non fisik seperti ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi diterima untuk meningkatkan inovasi, meningkatkan produktivitas, dan mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang stabil.

3. Teori pertumbuhan ekonomi historis. Teori historis berpusat pada proses perkembangan perekonomian masyarakat mulai dari tahap prasejarah hingga industri, masyarakat dunia, dan masyarakat berkonsumsi tinggi. Ada sekitar 4 pemikir yang mendukung teori historis. Pertama-tama, Frederich yang memisahkan fase-fase pertumbuhan ekonomi dilihat dari cara atau kecenderungan masyarakat umum dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui produksi. Mulai dari berburu dan mengembara, dimana manusia andalkan pada alam; beternak dan bertani; dan pertanian dan kerajinan; serta kerajinan, industri, hingga perniagaan. Kedua, Werner Sombart yang berpendapat bahwa fase-fase pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi sendiri. Tahapan tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu ekonomi tertutup, kerajinan dan pertumbuhan serta kapitalisme. Ketiga, Walt Whitman Rostow yang mengungkapkan bahwa dalam pertumbuhan ekonomi, suatu negara akan mengalami lima fase. Fase yang mendasarinya adalah, tradisional. Pada tahap ini, perekonomian didominasi oleh sektor pertanian. Tahap selanjutnya, transisi atau *pre-take-off* yang meliputi peralihan struktur tenaga kerja dari hortikultura ke industri. Tahap berikutnya, menurut Rostow, adalah lepas landas atau *take-off*, khususnya periode ketika hambatan dalam struktur sosial dan politik dapat bertahan. Tahap selanjutnya adalah menuju

kematangan atau *the drive to maturity*, di mana serikat pekerja dan serikat dagang mengalami kemajuan. Tahap terakhir adalah konsumsi masa tinggi (*high mass consumption*), yaitu ketika tenaga kerja di dominasi oleh tenaga kerja terpelajar, dan penduduk di perkotaan lebih banyak daripada di perdesaan. Keempat, Karl Bucher yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada hubungan antara produsen dan konsumen. Dalam teori Bucher, ada 4 fase perekonomian, yang menentukan karakter pertumbuhannya. Tahap yang mendasarinya adalah kerangka masa rumah tangga tertutup, ketika masyarakat hanya memenuhi kebutuhan kelompoknya sendiri. Tahap berikut adalah kerangka masa rumah tangga kota, ketika hubungan dagang antar desa dan desa dengan kota muncul. Kemudian, fase kerangka masa rumah tangga bangsa, khususnya periode ketika perdagangan antar-kota membentuk satu kesatuan masyarakat yang melakukan pertukaran dagang dalam negeri. Tahap terakhir, kerangka masa rumah tangga dunia, di mana perdagangan telah melewati batas publik.

4. Teori pertumbuhan ekonomi Kuznets. Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi merupakan perluasan kapasitas jangka panjang suatu negara untuk memberikan berbagai jenis barang ekonomi dalam jumlah yang besar kepada penduduknya. Kuznets berpendapat, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan 3 elemen. Elemen pertama adalah, peningkatan persediaan barang secara konstan. Elemen selanjutnya adalah perkembangan teknologi. Sementara itu, elemen ketiga adalah pemanfaatan teknologi yang efektif dan efisien.

2.1.4 Kajian Teoritis Investasi

Investasi merupakan salah satu komponen utama dalam tindakan ekonomi makro, terlepas dari konsumsi, tabungan, pengeluaran pemerintah,

pajak, ekspor dan impor. Besarnya investasi secara langsung akan mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi. Aktivitas investasi memungkinkan warga untuk terus memperluas pergerakan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran. Kehadiran investasi sebagai bentuk penanaman modal sangat menentukan kemajuan ekonomi wilayah dari *demand side* (sisi permintaan) dan *supply side* (sisi penawaran) di sektor penyerapan tenaga kerja dengan upah standar, mengubah pola ekonomi *income per capita* daerah setempat, *gini ratio* (ketimpangan) lebih rendah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang memiliki dampak positif dalam mengentaskan kemiskinan.

Investasi adalah kegiatan menempatkan modal berupa uang atau aset penting lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan bahwa pemodal atau investor akan mendapatkan keuntungan setelah jangka waktu tertentu. Karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari, maka inilah disebut investasi ataupun juga sebagai penanaman modal. Sedangkan menurut wikipedia, investasi adalah suatu aktifitas untuk menanamkan modal, baik secara langsung maupun implisit, dengan harapan nantinya pemilik modal akan mendapatkan berbagai keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia investasi berarti penanaman uang atau modal dalam suatu organisasi, perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan (Achmad, 2022).

Peningkatan investasi diyakini untuk menambah, mendukung dan mendongkrak perbaikan ekonomi suatu negara. Dalam ekonomi makro, investasi juga mengasumsikan sebagai salah satu bagian dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). Investasi memiliki hubungan positif dengan produk domestik bruto atau pendapatan

nasional, jika investasi meningkat, maka produk domestik bruto akan meningkat, begitu pula sebaliknya, ketika investasi menurun maka produk domestik bruto akan ikut menurun (Sugiarto, 2019). Dalam situasi yang sama, Harrod-Domar mengajukan teori yang sangat melegenda bahwa untuk menumbuhkan suatu ekonomi memerlukan pengembangan modal sebagai persediaan tambahan. Peningkatan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan membangun kapasitas ekonomi untuk menciptakan barang dan jasa serta konsumsi maupun yang akan memperluas minat yang kuat dari seluruh masyarakat.

Ini mengharapkan adanya investasi untuk membangun kapasitas memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian sebagai "*engine of growth*". Dengan cara ini, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan sebagian besar didukung oleh ekspansi ekspor dan investasi. Selain itu, Harrod-Domar menekankan pentingnya setiap perekonomian menghemat jumlah tertentu dari pendapatan nasional untuk mengganti barang-barang modal (gedung, peralatan, material) yang merugikan dengan tujuan akhir untuk menumbuhkan perekonomian, sehingga diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok penambah modal (Sugiarto, 2019).

Teori ini menggarisbawahi bahwa investasi memiliki posisi yang sangat penting dalam tingkat pembangunan perekonomian suatu negara. Dinyatakan pula bahwa ada kebutuhan yang pasti agar pertumbuhan yang konsisten (*steady state growth*) dapat tercapai dan pembangunan tidak memburuk. Dengan mengambil studi kasus pada ekonomi negara berkembang, teori Harrod-Domard menyimpulkan bahwa investasi memiliki pengaruh ganda untuk waktu yang panjang (*long-term*). Dari satu perspektif, investasi mempengaruhi perkembangan produksi nasional suatu negara karena aksesibilitas stok modal

yang merupakan komponen penting kelangsungan dunia usaha. Kemudian lagi, investasi secara signifikan mempengaruhi permintaan agregat. Akibatnya, untuk mencapai *steady-state growth* atau pertumbuhan ekonomi yang konsisten diperlukan kondisi di mana pelaku usaha memiliki harapan dan perspektif yang umumnya akan stabil (Sugiarto, 2019). Investasi juga merupakan metode dan inspirasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, terutama dengan tujuan untuk memperluas penggunaan tenaga kerja dalam mengembangkan produksi. Kaum aliran klasik berpikir tentang pengumpulan modal sebagai kondisi mutlak untuk pembangunan ekonomi. Kehadiran pembangunan ekonomi seharusnya meningkatkan pendapatan. Jadi implikasinya bisa dikatakan bahwa dengan penanaman modal, dapat meningkatkan pendapatan. Teori investasi Neo-Klasik menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan produk domestik bruto riil berpengaruh positif terhadap investasi swasta (David Fielding, 1997; Joshua Greene & Delano Villanueva, 1991; Wai T. U. & Wong C. H., 1982). Ini disebut “efek akselerator”. Selain itu, nilai modal yang diinginkan oleh sebuah organisasi berpengaruh positif pada tingkat permintaan (Bayai Innocent & Davis Nyangara, 2013).

Beberapa ahli ekonom memandang pembentukan investasi sebagai salah satu variabel penting yang berperan vital dalam pertumbuhan dan peningkatan ekonomi suatu negara. Pada saat visioner bisnis atau orang atau pemerintah menanamkan modal, akan ada sejumlah modal yang ditanamkan, akan ada berbagai perolehan barang modal (yang tidak dikonsumsi), namun digunakan untuk produksi, sehingga produksi barang dan jasa dapat memacu produktivitas secara nyata.

Di tengah kondisi ekonomi dunia yang semakin tidak menentu, pencapaian penting yang serius harus terlihat dari realisasi investasi penanaman

modal Indonesia. Selama triwulan terakhir tahun 2020, realisasi penanaman modal dalam negeri sebesar Rp 103,6 triliun (naik 0,8%) dan realisasi penanaman modal asing sebesar Rp 111,1 triliun (naik 4,7%) dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Pada triwulan I tahun 2019, realisasi investasi mencatat kenaikan sebesar 5,3% dibandingkan triwulan I tahun 2018 sebesar Rp195,1 triliun.

Jika di lihat dari tahun-tahun sebelumnya, investasi berkembang hanya beberapa kali dari tahun 2016 hingga 2018, yang awalnya hanya US\$3,92 milyar menjadi US\$23 milyar. Diyakini bahwa nantinya Indonesia masuk ke dalam 40 besar *positioning of simple interest on the world* pada tahun 2019. Oleh karena itu, pemahaman dan kerja keras dari semua kementerian/lembaga dituntut untuk siap memangkas 50% dari 42 ribu kebijakan yang dianggap menghalangi proses investasi untuk memasuki negara itu.

Pemerintah Indonesia melihat pentingnya fokus pada pengembangan dan peningkatan infrastruktur untuk membuat iklim investasi dan lingkungan bisnis menjadi lebih menarik. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur adalah salah satu fokus utama sebagai alasan untuk pembangunan yang akan terus ditingkatkan, terutama terkait dengan sentra-sentra ekonomi produktif yang bermanfaat, sehingga masalah distribusi yang sedang berlangsung tidak menghambat pertumbuhan ekonomi regional.

Dengan demikian, penting untuk mendapatkan dukungan dari semua pemangku kepentingan memastikan meningkatnya investasi dengan beragam terobosan kebijakan yang telah ditempuh pemerintah, seperti *Online Single Submission* (OSS) dijamin berjalan lancar dengan support dari seluruh pemangku kepentingan pusat dan daerah. Apalagi, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian

Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, di yakini akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan kemudahan dalam menjalankan usaha.

Di kemudian hari, diyakini bahwa upaya untuk menarik investasi harus tetap fokus pada investasi padat karya, industri pengolahan sumber daya alam, dan industri yang berorientasi ekspor. Indonesia membutuhkan industri dengan retensi tenaga kerja yang tinggi, sehingga dapat mengatasi masalah penyerapan tenaga kerja, sehingga investasi lebih mengarah pada investasi yang padat karya dan industri pengolahan. Misalnya, investasi pada bisnis makanan dari bahan baku hasil perikanan tidak memiliki nilai yang cukup besar. Meskipun demikian, kehadirannya dapat membawa *multiplier effect* atau efek pengganda pada penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan nelayan dan hasil produksinya bisa diekspor untuk mendongkrak devisa negara.

Kualitas investasi di masa depan harus tetap menjadi pemikiran utama, keuntungan tak berujung dari pendekatan bisnis sangat dipengaruhi oleh kualitas investasi, untuk memberdayakan pembangunan di sektor riil, yang pada dasarnya mempengaruhi retensi kerja yang tinggi, seperti industri pangan, pertanian, kawasan perkebunan dan perikanan. Kalangan perbankan harus di dorong untuk mensupport investor pada sektor riil dan infrastruktur, khususnya di Indonesia bagian timur, perbankan harus proaktif dan mendukung jalannya pergerakan moneter. Upaya untuk memberikan kenyamanan investasi, kepastian hukum dan jaminan keamanan, melalui perbaikan regulasi-regulasi yang telah diterbitkan, diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif serta menciptakan keterbukaan investasi.

Bantuan dan support investor dalam pembangunan ekonomi Indonesia, ditengah terbatasnya APBN, adalah keputusan yang tepat dalam mengalihkan

kemacetan ekonomi melalui peningkatan dukungan investasi dalam mempercepat berbagai program pembangunan ekonomi yang bermanfaat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengantarkan Indonesia menjadi negara yang berkembang.

2.1.5 Kajian Teoritis Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai ekspansi barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu secara umum dan terus menerus. Inflasi muncul karena adanya tekanan dari sisi *supply* (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), serta dari asumsi inflasi. Faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh devaluasi dana desa, efek dari inflasi asing terutama negara mitra dagang, ekspansi harga barang yang dikendalikan oleh pemerintah (*administered price*), dan terjadi *negative supply shocks* karena peristiwa bencana alam dan terhambatnya pendistribusian.

Komponen yang menyebabkan *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif yang komparatif dengan aksesibilitasnya. Dari sisi ekonomi makro, kondisi ini digambarkan dengan hasil nyata yang melampaui *output* potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih menonjol dari batas ekonomi. Sementara itu, faktor asumsi inflasi dipengaruhi oleh cara berperilaku masyarakat umum dan pelaku ekonomi dalam memanfaatkan laju inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Asumsi inflasi bisa bersifat adaptif atau *forward looking*. Hal ini tercermin dari cara berperilaku pembentukan biaya di tingkat produsen dan pedagang, terutama pada hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum provinsi UMP yang telah di tentukan oleh undang-undang. Meskipun aksesibilitas barang secara umum dinilai memadai untuk mendukung ekspansi permintaan, biaya barang dan jasa selama hari-hari besar keagamaan lebih tinggi daripada

kondisi *supply-demand* tersebut. Selain itu, saat penentuan UMP, pedagang juga menaikkan harga produk meskipun ekspansi sebagai kompensasi tidak signifikan dalam mendukung ekspansi yang diinginkan.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan hal yang penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan layak yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi tergantung pada pemikiran bahwa inflasi yang tinggi dan goyah berdampak negatif pada keadaan sosial ekonomi daerah setempat. Pertama, inflasi yang tinggi akan membuat pendapatan riil masyarakat terus turun sehingga gaya hidup masyarakat turun dan akhirnya membuat masyarakat, terutama masyarakat miskin, semakin miskin. Kedua, inflasi yang goyah akan membuat kerentanan (*uncertainty*) para *financial entertainer* dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang goyah akan membingungkan pilihan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang dengan demikian akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tingkat inflasi dalam negeri yang lebih tinggi dari tingkat inflasi di negara-negara tetangga membuat tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah. Keempat, pentingnya kestabilan harga kaitannya dengan stabilitas sistem keuangan (Bank Indonesia, 2021).

Inflasi dapat terjadi pada tingkat inflasi ringan, sedang, berat, dan tidak terkendali. Menurut Wikipedia, inflasi ringan terjadi ketika kenaikan harga berada di bawah 10%; inflasi sedang antara 10-30%; dan inflasi berat antara 30-100% setiap tahun; dan hiperinflasi atau inflasi tidak terkendali terjadi ketika kenaikan harga di atas 100% per tahun. Namun, angka-angka inflasi ini pada umumnya relatif dan tidak ada standar yang umum. Di Indonesia misalnya, jika laju inflasi

masih dalam satu digit, misalnya 6-7%, maka pada saat itu laju inflasi masih dipandang relatif dan wajar meskipun tingkat inflasi lebih tinggi daripada tingkat inflasi negara-negara di kawasan regional. Untuk sementara, tingkat inflasi untuk negara-negara berkembang sekitar 2-3%. Di sisi lain, laju inflasi dapat terjadi pada angka negatif, dan itu menyiratkan bahwa perkembangan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian kadang-kadang berkurang dari waktu ke waktu atau disebut deflasi (Siti Aisyah & Suseno, 2009).

Beberapa teori yang menggambarkan inflasi, Yulianto, (2011), adalah sebagai berikut:

1. Teori Kuantitas, merupakan teori yang paling awal terkait inflasi, namun teori ini masih sangat membantu dalam memahami siklus inflasi pada periode sekarang, terutama di negara-negara berkembang. Teori kuantitas ini menampilkan peranan inflasi dari:
 - a. Jumlah uang yang beredar. Inflasi dapat terjadi dengan asumsi ada ekspansi dalam volume uang yang beredar, tanpa ada ekspansi dalam jumlah uang yang beredar. Kejadian seperti ini, misalnya, gagal panen, hanya akan menambah biaya untuk waktu yang singkat. Jika volume uang tidak ditambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya, apa pun tujuan dari kenaikan harga-harga tersebut yang mendasarinya.
 - b. Psikologi (*expectations*) masyarakat sehubungan dengan harga. Laju inflasi ditentukan oleh laju ekspansi pasokan uang yang beredar dan oleh psikologi (harapan) bagi masyarakat dalam hal biaya di masa depan. Ada 3 kondisi potensial, kondisi utama adalah ketika individu tidak (atau belum) mengantisipasi bahwa biaya akan naik dalam waktu dekat. Yang kedua adalah di mana individu (berdasarkan pengalaman bulan-bulan sebelumnya) mulai memahami bahwa ada inflasi. Selanjutnya, yang ketiga

terjadi pada fase inflasi yang lebih serius, khususnya tahap inflasi yang berlebihan, pada tahap ini masyarakat telah kehilangan kepercayaan terhadap nilai uang. Inflasi yang tidak terkendali ini pernah terjadi di Indonesia selama periode 1961-1966.

Ahli ekonom yang berpegang pada teori kuantitas dalam perkembangannya disebut dengan ahli ekonomi yang beraliran Monetaris. Salah satu tokoh aliran monetaris ini adalah ekonom Milton Friedman yang memenangkan hadiah Nobel dalam bidang ekonomi pada tahun 1976. Tokoh ini membuat pernyataan yang sangat populer, khususnya bahwa *inflation is always and everywhere a monetary phenomenon*.

Milton Friedman adalah seorang ekonom yang menyempurnakan teori kuantitas dan selanjutnya membentuk teori kuantitas uang dan mengembangkan teori tentang permintaan uang. Teori permintaan uang dalam perkembangannya menjadi teori urgent pada teori makro ekonomi serta mengalami banyak variasi dan berkembang secara pesat. Teori permintaan uang pada dasarnya menyatakan bahwa permintaan uang masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor ekonomi termasuk pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan tingkat harga. Sesuai dengan teori permintaan uang, tingkat harga atau tingkat inflasi akan berubah jika jumlah uang beredar tidak sesuai dengan jumlah yang diminta atau diharapkan pada perekonomian. Dengan asumsi jumlah uang yang tersedia lebih besar daripada jumlah uang yang diminta atau dibutuhkan oleh orang-orang pada umumnya, tingkat harga akan meningkat sehingga mengakibatkan inflasi. Sebaliknya, jika jumlah uang yang tersedia untuk digunakan lebih kecil daripada jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat umum, tingkat harga akan turun dan terjadi deflasi.

Banyak penelitian empiris yang menunjukkan bahwa perkembangan uang beredar dan laju inflasi yang tinggi memiliki hubungan yang tinggi, misalnya, penelitian yang dilakukan oleh (Stanley Fischer et al., 2002). Mereka menyatakan bahwa dalam jangka panjang hubungan antara pertumbuhan uang beredar dan tingkat inflasi menjadi lebih dekat. Apakah hubungan ini juga terjadi untuk saat ini? Sejauh perkembangan jumlah uang beredar dan laju inflasi, masih ada hubungan penting, terutama untuk menguji hubungan antara kedua faktor tersebut dengan memanfaatkan data lag, misalnya, dengan data dari beberapa periode yang lalu. Namun, penelitian tersebut juga menyatakan bahwa hubungan antara kedua faktor tersebut tidak instan dan juga tidak langsung terkait satu sama lain. Penelitian ini juga menemukan bahwa laju inflasi yang tinggi, cenderung tidak stabil. Sebaliknya, laju inflasi yang rendah cenderung lebih stabil (Siti Aisyah & Suseno, 2009).

2. Teori Keynes. Teori Keynes tentang inflasi bergantung pada teori makronya, dan menyoroti aspek lain dari inflasi (Boediono, 1998). Sesuai teori ini, inflasi terjadi karena fakta bahwa masyarakat umum ingin hidup melewati batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi, seperti yang ditunjukkan oleh pandangan ini, hanyalah cara untuk mendapatkan bagian dari keuntungan diantara kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang dapat diberikan oleh daerah setempat. Proses perebutan ini akhirnya berubah menjadi keadaan di mana permintaan masyarakat untuk barang-barang umumnya melampaui jumlah barang-barang yang tersedia (timbulnya apa yang disebut *inflationary gap*).
3. Teori Strukturalis. Teori terkait inflasi berdasarkan pada pengalaman dengan negara-negara Amerika latin. Teori ini menggarisbawahi kekakuan konstruksi dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang. Menurut

Boediono (1998), dengan alasan bahwa inflasi terkait dengan variabel-variabel yang mendasari perekonomian (yang menurut definisi, unsur-unsur ini dapat berubah secara gradual dan dalam jangka panjang), teori ini dapat disebut teori inflasi jangka panjang. Variabel struktural yang mendasari yang seharusnya menjadi alasan paling penting dari proses inflasi tersebut bukan 100% struktural. Sering kali diamati bahwa keterangan tersebut disebabkan oleh kebijakan harga atau otoritas pemerintah sendiri.

Ada beberapa indikator makroekonomi yang digunakan untuk menentukan laju inflasi selama periode tertentu. Tiga di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Indeks Harga Konsumen (IHK), adalah indeks yang menunjukkan tingkat barang dan jasa yang harus dibeli oleh konsumen dalam periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya dalam periode tertentu. Setiap harga barang dan jasa diberi bobot sesuai kebutuhannya. Barang dan jasa yang dianggap paling signifikan diberi bobot terbesar.
2. Indeks Harga Pedagang Besar (IHPB), jika melihat inflasi menurut perspektif konsumen, Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) melihat inflasi dari sisi produsen. Dengan cara ini, IHPB sering disinggung sebagai indeks harga produsen. IHPB menunjukkan tingkat harga yang diperoleh produsen pada tingkat produksi yang berbeda.
3. Indeks Harga Implisit. Meskipun sangat berguna, IHK dan IHPB memberikan gambaran yang sangat terbatas pada laju inflasi. Sejak ditentukan dari teknik estimasi, kedua indikator tersebut hanya mencakup beberapa jenis barang dan jasa, di beberapa perkotaan saja. Meskipun sebenarnya, jenis barang dan jasa yang diciptakan atau dikonsumsi dalam suatu perekonomian dapat

mencapai ribuan bahkan mungkin tak terhitung jumlah jenisnya. Kegiatan ekonomi juga terjadi di beberapa perkotaan saja, tetapi di semua pelosok wilayah. Untuk mendapatkan gambaran inflasi yang pada dasarnya menggambarkan keadaan sebenarnya, para ekonom menggunakan indeks harga implisit (*gross domestic product deflator*), disingkat IHI.

4. Alternatif dari indeks harga implisit. Itu bisa berhasil, saat menghitung inflasi dengan menggunakan IHI tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki data IHI. Hal ini dapat diatasi, dengan alasan bahwa penghitungan inflasi berdasarkan *deflator product domestic bruto* (GDP deflator) yaitu membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang nyata dengan pertumbuhan yang sebenarnya. Perbedaan antara keduanya adalah tingkat inflasi.

Pemerintah dapat menahan laju inflasi melalui beberapa cara, berikut 3 cara mengatasi inflasi, yakni:

1. Kebijakan fiskal. Kebijakan ini mencakup peningkatan tarif pajak, penurunan pengeluaran pemerintah dan melakukan pinjaman.
2. Kebijakan moneter, ini adalah salah satu cara mengatasi inflasi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan memperluas atau mengurangi jumlah uang yang tersedia untuk digunakan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan moneter yang sepenuhnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Kebijakan moneter selanjutnya melakukan kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan ini dilakukan dengan mengendalikan jumlah uang yang tersedia untuk digunakan.
3. Kebijakan Non-fiskal dan Non-moneter. Selain kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan non-fiskal dan juga

non-moneter. Kebijakan non-fiskal dan non-moneter ini dapat dilakukan dengan lebih dari satu cara. Ada sekitar 5 cara berbeda dalam kebijakan non-fiskal dan non-moneter yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya:

- a. Menambah hasil produksi. Pemerintah akan memberikan kebijakan yang dapat meredakan para pengusaha. Ini diselesaikan oleh pemerintah dengan harapan para pengusaha dapat lebih meningkatkan produksinya. Dengan banyaknya barang yang beredar di masyarakat, perputaran uang akan lebih cepat dan meningkat, sehingga uang yang beredar kembali menjadi seimbang.
- b. Mempermudah masuknya barang impor. Tidak semua *merchandise* dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri, sehingga mempermudah masuknya barang impor yang menjadi salah satu jawaban untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Ini dapat dilakukan dengan menurunkan pajak serta mempermudah perizinan barang impor.
- c. Menstabilkan pendapatan masyarakat. Menahan pendapatan masyarakat pada umumnya dari kenaikan serta menekan laju pertumbuhan inflasi yang tidak terkendali.
- d. Menetapkan harga maksimum. Ketika inflasi terjadi, harga barang biasanya akan naik tidak terkendalikan. Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang. Dengan menetapkan harga maksimum, pemerintah berharap agar kemampuan membeli masyarakat akan jauh lebih unggul.
- e. Pengawasan distribusi barang. Terhambat distribusi barang menjadi salah satu faktor yang meningkatkan harga di suatu daerah. Permintaan yang sangat besar tidak diimbangi dengan jumlah produk yang telah ditetapkan akibat terhambatnya proses distribusi barang. Dengan melakukan pengawasan sebagai salah satu cara untuk menaklukkan inflasi,

diharapkan produk-produk tersebut dapat segera diedarkan ke masyarakat luas.

Inflasi mempunyai efek positif dan negatif pada kegiatan ekonomi masyarakat. Efek positif inflasi antara lain membuat peredaran dan perputaran barang jadi lebih cepat sehingga perkembangan produk meningkat, kesempatan kerja bertambah karena adanya tambahan investasi, sehingga membuka lapangan kerja dan mengurangi masalah pengangguran. Efek positif ini dapat terjadi ketika inflasi dikendalikan dan diikuti oleh peningkatan pendapatan nominal masyarakat, dengan tujuan agar pendapatan riil meningkat. Di sisi lain, ketika tingkat inflasi tinggi dan tidak diikuti oleh peningkatan pendapatan masyarakat, dampak negatif akan dialami. Diantaranya banyak proyek pembangunan yang terhambat, berkurangnya minat menabung masyarakat karena turunnya nilai uang yang dapat mengancam perbankan nasional (Rezzy Eko Caraka, 2016).

2.1.6 Kajian Teoritis Pengeluaran Pemerintah

Dalam tatanan ekonomi makro, *government expenditure* (pengeluaran pemerintah) merupakan salah satu faktor yang membentuk produk domestik bruto selain permintaan sektor rumah tangga untuk barang-barang konsumsi dan jasa-jasa (C), permintaan sektor bisnis untuk barang-barang investasi (I), pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa (G) serta pengeluaran sektor asing untuk ekspor dan impor (X-M). Secara matematis dapat dirumuskan: $Y = C + I + G + (X-M)$ (Dumairy, 2006). Pada prinsipnya, kebijakan pengeluaran pemerintah ini penting untuk kebijakan fiskal sebagai salah satu bentuk mediasi pemerintah dalam perekonomian. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan dengan kebijakan fiskal dengan salah satu aksentuasinya melalui kebijakan pengeluaran atau belanja pemerintah.

Teori makro terkait pertumbuhan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonom dan dapat dikelompokkan ke dalam model pembangunan tentang peningkatan pengeluaran. Musgrave menyatakan bahwa dalam suatu siklus dan tingkat investasi pemerintah terhadap GNP akan menjadi lebih rendah. Pada tingkat perkembangan ekonomi yang lebih maju, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan sarana prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial, misalnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan dan sebagainya (Amalia et al., 2015).

Untuk mencapai tujuan peningkatan produk domestik bruto, pemerintah dapat mengarahkan distribusi dan tingkat pengeluaran negara. Misalnya, dengan menetapkan tingkat pengeluaran negara yang lebih tinggi untuk sektor tertentu, pemerintah dapat mengontrol tingkat *employment* (menuju *full employment*). Jika target pendapatan tidak cukup untuk mendukung pengeluaran tersebut, pemerintah dapat mendanainya dengan desain tingkat kemiskinan. Paham Keynesian menyatakan bahwa pertumbuhan pendapatan nasional tidak sepenuhnya ditentukan oleh besarnya pengeluaran konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi dan net ekspor. Menurut Keynes, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur pada peningkatan pendapatan nasional, penting untuk meningkatkan permintaan konsumsi, permintaan pengeluaran pemerintah, permintaan investasi, serta permintaan ekspor dan impor. Gagasan mengenai perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa: $Y = C + I + G + X - M$. Persamaan ini dikenal sebagai persamaan identitas pendapatan nasional, dimana Y adalah pendapatan nasional serta sebagai penawaran agregat, G menyatakan pengeluaran pemerintah, I menyatakan investasi, X-M adalah net ekspor. Dengan

membandingkan nilai G terhadap Y serta memperhatikannya dari waktu ke waktu, dapat dipahami dengan baik betapa besarnya kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional. Ekonom lainnya, Adolf Wagner, mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah berkembang dalam jangka panjang. Wagner memperkirakan proporsi pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian mengalami kecenderungan yang meningkat. Kecenderungan ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah (*law of ever increasing state activity*) (Guritno Mangkoesoebroto, 2002). Berlawanan dengan teori Keynes yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ($G \rightarrow Y$), Wagner menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah ($Y \rightarrow G$). Jelas dalam suatu perekonomian, jika pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat. Ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah terus meningkat, khususnya tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, peningkatan pendapatan masyarakat, urbanisasi yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan regulasi yang menyertai perkembangan pemerintahan.

Penerapan otonomi dan desentralisasi fiskal ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 pada tanggal 1 Januari 2001. Atas kedua undang-undang tersebut, beberapa permasalahan yang kemudian diubah melalui revisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 dan diubah menjadi Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, desentralisasi dicirikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonom untuk mengarahkan dan mengendalikan pemerintahan dalam penataan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ada dua manfaat yang dapat dicapai dari penerapan desentralisasi fiskal Ebel & Yilmaz, (2002), antara lain 1) produktivitas dan pengalokasian sumber-sumber ekonomi, desentralisasi akan meningkatkan efisiensi karena pemerintah daerah dapat memperoleh data yang lebih baik (dibandingkan dengan pemerintah pusat) terkait dengan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Dengan cara ini, pengeluaran pemerintah daerah lebih mampu merefleksikan kebutuhan/pilihan masyarakat di sekitarnya daripada jika diselesaikan oleh pemerintah pusat. 2) Persaingan antara pemerintah daerah, pengaturan barang-barang publik yang didanai oleh pajak daerah akan mengakibatkan pemerintah daerah bersaing dalam menyediakan fasilitas publik yang lebih baik, karena dalam sistem desentralisasi fiskal, masyarakat menggunakan strategi "*vote by feet*" dalam memutuskan produk publik di daerah mana akan digunakan.

Desentralisasi adalah istilah yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata *de* berarti lepas dan *centrun* berarti pusat, sehingga desentralisasi juga dapat disebut melepaskan diri dari pusat. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa daerah dapat berdiri sendiri dan memisahkan diri dari ikatan negara. Dari perspektif ketatanegaraan, desentralisasi menyiratkan pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat ke

daerah untuk menangani rumah tangganya sendiri. Kebijakan desentralisasi memiliki sejarah panjang di Indonesia. Mulai sekitar tahun 1903, pemerintah kolonial Belanda telah mengeluarkan *desentralistie wet* menjadi dasar hukum pertama adanya kebijakan desentralisasi di Indonesia. Pelaksanaan kebijakan ini alasan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan di daerah.

Desentralisasi dapat dilihat sebagai kata yang *multi-faceted*, artinya, kata desentralisasi tidak hanya mempunyai satu arti. Ini dapat diartikan pada beberapa arti, bergantung pada konteks dimana digunakan. Desentralisasi menurut ahli yang pertama berasal dari MacMillan Cheema G. Shabbir & Dennis A. Rondinelli, (1983), baginya desentralisasi adalah penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan, atau kewenangan administratif dari pemerintah pusat ke suatu organisasi wilayah, satuan administratif daerah, organisasi semi otonom, pemerintah daerah, maupun organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Menurut para ahli berikutnya dikemukakan oleh PBB. Di mana desentralisasi adalah hal yang merujuk pada pemindahan kekuasaan dari pemerintah pusat baik melalui dekonsentrasi (delegasi) kepada pejabat wilayah atau melalui devolusi ke badan-badan suatu otonom daerah Henry Maddick, (1963) juga mengungkapkan pandangannya tentang arti desentralisasi yang merupakan penyerahan kekuasaan secara hukum agar dapat menangani bidang atau fungsi tertentu ke daerah otonom.

Sementara, menurut Dennis A. Rondinelli, (1983) desentralisasi adalah penciptaan atau penguatan, baik dalam hal keuangan maupun hukum ke unit pemerintahan sub nasional yang pelaksanaannya bersifat substansial berada di luar kendali dari pemerintah pusat. Talcott Parsons, (1961) mendefinisikan desentralisasi sebagai pembagian (*sharing*) kekuasaan pemerintah antara

pemegang kekuasaan di pusat dengan kelompok lainnya, dimana kelompok tersebut memegang peranan penting untuk mengatur bidang tertentu pada lingkup teritorial suatu negara.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah mengingat prinsip *money follow function*, desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan jenis desentralisasi yang ketiga (*devolution*). Irina Slinko, (2002) menyatakan bahwa:

“Under the concept of “fiscal decentralization” we understand the assignment of fiscal responsibilities to the lower levels of government, that is, the degree of regional (local) authonomy and the authority of local government to decide upon its own expenditure and its ability to generate local revenues”.

Pernyataan Slinko menekankan arti desentralisasi, yaitu bentuk penyerahan kekuasaan (tanggung jawab dan fungsi) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, termasuk pemberian kekuasaan ke pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan dan belanja di daerahnya masing-masing.

Secara keseluruhan, kebijakan desentralisasi dipisahkan menjadi 3 macam (Jennie Litvack & Jessica Seddon, 1999):

- a. Desentralisasi politik yaitu pelimpahan kewenangan dan kekuasaan yang lebih besar kepada daerah-daerah dalam berbagai aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar dan regulasi.
- b. Desentralisasi administrasi yaitu pelimpahan kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber daya antar berbagai tingkat pemerintahan.
- c. Desentralisasi fiskal merupakan pemberian kewenangan ke daerah untuk menggali sumber pendapatan, hak untuk mendapatkan transfer dari pemerintahan pusat, dan menentukan belanja rutin maupun investasi.

Ketiga macam desentralisasi ini saling terkait satu sama lain dan merupakan hal yang esensial untuk mencapai tujuan pelaksanaan desentralisasi, khususnya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Artinya hubungan keuangan pusat

dan daerah harus dikelola secara maksimal sehingga kebutuhan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dapat ditopang dari sumber pendapatan yang ada dan dilakukan dengan transparan dan akuntabilitas (Sarjiyo, 2009). Siklus tersebut dapat dilakukan melalui prosedur dana perimbangan, yaitu pembagian penerimaan antar tingkatan pemerintahan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam sistem desentralisasi.

Ditinjau dari prinsip *money follow function*, Raksaka Mahi, (2001) menjelaskan bahwa kajian dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal pada dasarnya menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan *expenditure assignment* dan *revenue assignment*. Pendekatan *expenditure assignment* mengungkapkan bahwa ada penyesuaian kewajiban pelayanan publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga peran *local public goods* meningkat. Sementara itu, pendekatan *revenue assignment* menjelaskan peningkatan kemampuan fiskal melalui sumber pembiayaan pusat ke daerah, untuk mendukung kemampuan desentralisasi. Beberapa teori menjelaskan desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:

a. Teori Desentralisasi Fiskal Tradisional

Teori desentralisasi fiskal tradisional disebut juga teori generasi pertama desentralisasi fiskal (*first generation theory of fiscal federalism*). Menurut Wallace E. Oates, (2008) teori ekonomi tradisional desentralisasi fiskal bergantung pada manfaat kesejahteraan potensial yang akan diperoleh dari pengalokasian sumber daya yang lebih efisien ke sektor publik, terutama yang berkaitan dengan barang publik lokal (*local public goods*). Teori desentralisasi fiskal tradisional dipisahkan menjadi dua model, yaitu model desentralisasi Tiebout dan Model desentralisasi Oates.

a. Model Desentralisasi Tiebout

Model desentralisasi Tiebout, menunjukkan bahwa model pendanaan lokal di mana setiap masyarakat bebas bergerak untuk memilih wilayah yang sesuai dengan referensi dan profesi mereka untuk pelayanan publik yang diberikan oleh daerah tersebut. Beberapa peneliti menganggap model Tiebout sebagai pusat teori desentralisasi fiskal. Sisi positif dari desentralisasi fiskal yang digambarkan dalam teorema desentralisasi (*decentralization theorem*) sebelumnya tidak bergantung pada portabilitas penduduk, di mana dikatakan bahwa meskipun tidak ada mobilitas penduduk antar daerah, manfaat bantuan pemerintah dari desentralisasi fiskal tetap ada, karena adanya varietas permintaan dan fungsi biaya untuk pelayanan publik lokal antar daerah.

b. Teorema Desentralisasi Oates

Oates telah memformulasikan gagasannya dalam sebuah teorema yang disebut teorema desentralisasi (*the decentralization theorem*). Itulah yang menjadi poin dasarnya jika tidak ada keunggulan biaya (skala hasil) terkait dengan kondisi sentralisasi, maka pola desentralisasi barang publik yang mencerminkan kontras preferensi antar daerah akan meningkatkan kesejahteraan dibandingkan dengan hasil yang didapat dari sentralisasi yang menggambarkan tingkat keluaran untuk semua wilayah.

Model desentralisasi fiskal tradisional menggambarkan sistem pemerintahan dari beberapa tingkat, di mana setiap tingkat pemerintahan memberikan keluaran pelayanan publik yang efisien dan efektif bagi masyarakatnya. Ketika teori dihadapkan dengan masalah nyata dalam memutuskan hal yang tepat yang harus diberikan oleh administrasi publik setiap tingkat pemerintahan yang berbeda, itu sebagian besar menghasilkan titik ambigu di mana teori pada dasarnya mampu

memberikan beberapa pedoman. Bagaimana teori tradisional pada dasarnya sangat diharapkan dalam melihat bahwa desentralisasi fiskal dapat membuat kontribusi positif terhadap peran dan fungsi sektor publik.

b. Teori Desentralisasi Fiskal Baru

Menurut Oates, ada dua teori baru tentang *federalism fiscal*. Yang pertama juga disebut teori generasi kedua dari federalisme (*the second generation theory of fiscal federalism*) yang menggambarkan sebagian besar inspirasinya untuk beberapa krisis fiskal yang disebabkan oleh perilaku menentang pada tingkat desentralisasi daerah. Kedua, dengan pendekatan ekonomi politik terhadap federalisme fiskal (*the political economy approach to fiscal federalism*) menangani evolusi yang lebih konvensional dari teori publik. Berkenaan dengan konteks sektor publik, ini menggabungkan keberadaan di mana Gubernur dan Bupati/Walikota di suatu wilayah yang luas melihat ke otoritas publik yang lebih tinggi (pemerintah pusat) untuk membantu mereka keluar dari masalah *fiscal deficit* dan stok hutang publik yang semakin besar.

Sementara itu, United Nations Development Program (UNDP), (2005) menyatakan bahwa ada empat poin pendukung dalam desentralisasi fiskal, secara spesifik;

1. Dari sisi penerimaan dikaitkan dengan sumber pajak dan pendapatan pada berbagai tingkat pemerintahan.
2. Dari sisi pengeluaran dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawab pengeluaran pada berbagai tingkat pemerintahan.
3. Transfer fiskal antar pemerintah.
4. Pinjaman sub-nasional, pemerintah daerah dapat memperoleh pinjaman dengan berbagai cara untuk menutupi kekurangan pendapatan

Desentralisasi fiskal adalah salah satu mekanisme transfer dana dari APBN sesuai dengan kebijakan keuangan negara, khususnya untuk mewujudkan ketahanan fiskal berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dan memberikan stimulus kegiatan perekonomian masyarakat. Beberapa kebijakan fiskal memiliki jalur bervariasi, di mana kebijakan fiskal tersebut dapat dilakukan melalui jalur kebijakan anggaran pemerintah yang dikenal dengan istilah APBN di Indonesia.

Kebijakan fiskal merupakan salah satu pendekatan ekonomi makro secara otoritas dikendalikan oleh pemerintah melalui kementerian keuangan. Dalam pengaturan ini, presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara selaku pengelola fiskal kepada menteri keuangan. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah juga dapat memutuskan seberapa besar belanja atau pengeluaran serta pendapatan untuk mempengaruhi perekonomian (Nugraha, 2020).

Tujuan kebijakan fiskal umumnya berbeda antara negara maju dan negara berkembang. Di negara maju, peranan kebijakan fiskal sebagian besar adalah untuk mempertahankan *full employment* dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, di negara-negara berkembang, kebijakan fiskal digunakan untuk membangun iklim yang baik untuk pertumbuhan ekonomi yang pesat. Beberapa sudut pandang terkait dengan tujuan ini adalah:

1. Mobilisasi sumber daya. Negara-negara berkembang digambarkan dengan tingkat pendapatan dan investasi yang rendah, (*vicious circle*) ini pada dasarnya dapat dipatahkan melalui mobilisasi sumber daya untuk investasi yang cepat.

2. Akselerasi pertumbuhan ekonomi. Untuk mengaktifkan lebih banyak sumber-sumber daya untuk investasi, pemerintah harus mengarahkan sumber daya ini ke jalur dimana hasil (*yield*) lebih tinggi, dan barang yang didapa umumnya disambut baik oleh daerah setempat.
3. Peningkatan kesempatan kerja. Insentif fiskal, seperti pengembalian pajak (*tax-rebates*) dan konsesi, dapat digunakan untuk mendukung pengembangan industri yang mempunyai potensi tinggi membuka lapangan pekerjaan.
4. Minimisasi ketimpangan (*inequalities*) pendapatan dan kekayaan. Instrumen fiskal dapat digunakan untuk lebih mengembangkan distribusi pendapatan yang membantu masyarakat miskin melalui peningkatan belanja sosial.
5. Stabilitas harga (*price stability*). Instrumen fiskal dapat digunakan untuk mengendalikan pola inflasi dan deflasi dalam perekonomian. Jika deflasi (atau resesi), pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal ekspansif untuk mengatasi kondisi perekonomian. Langkah ini harus dilakukan dengan mengurangi pajak atau dengan peningkatan belanja, yang akan mendorong peningkatan pengeluaran masyarakat.

Melalui kebijakan fiskal, antara lain pemerintah bisa mempengaruhi taraf pendapatan nasional, dapat mempengaruhi kesempatan kerja, dapat mempengaruhi tinggi rendahnya investasi nasional, serta dapat mempengaruhi distribusi penghasilan nasional (Din, 2017). Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menstabilkan permintaan barang dan jasa, tingkat produksi, dan lapangan pekerjaan. Ketika permintaan barang dan jasa meningkat, resikonya inflasi naik, pemerintah dalam lingkup fiskal

melakukan penyesuaian rencana anggaran belanja negara dan daerah serta menaikkan ketimpangan pendapatan.

APBN merupakan pedoman ekonomi yang ditujukan untuk menstabilkan perekonomian negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pendapatan, dan sebagai tolok ukur untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Melalui kebijakan fiskal maka pelaksanaan APBN melalui APBD diatur dengan peraturan pemerintah. Dimana APBN mencatat sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Sisi penerimaan mencatat sumber-sumber pendapatan yang diperoleh, sisi pengeluaran mencatat semua kegiatan pemerintah dalam pelaksanaannya.

Sementara itu, APBD merupakan gambaran yang sistematis dari rencana pendapatan dan pengeluaran tahunan pemerintah daerah yang penerimaannya dari APBN dialokasikan berupa Transfer Ke Daerah dan Dana Desa serta penerimaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyesuaikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah serta kemampuan keuangan daerah kemudian disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam pelaksanaannya, APBN dan APBD memainkan beberapa peran penting, khususnya peran pengawasan, perencanaan, otorisasi, distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Setiap jenis penerimaan akan menjadi hak, dan pengeluaran akan menjadi kewajiban negara dan daerah yang harus dimasukkan ke dalam APBN dan APBD.

APBN dan APBD berperan penting pada kebijakan anggaran negara dan daerah dalam mendorong kegiatan perekonomian, terutama ketika dunia usaha belum pulih dari keadaan krisis moneter. Hal ini sesuai teori Keynesian yang menyatakan bahwa stimulasi fiskal melalui *government*

expenditure untuk melakukan belanja barang dan jasa, serta investasi atau modal akan mampu membantu peningkatan pergerakan sektor riil.

Penyusunan APBD akan berdampak pada peningkatan pembangunan dan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan serta menurunkan pengeluaran. Oleh karena itu, APBD harus diyakini dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi-potensi dan sumber daya daerah (Lasminingsih, 2004). Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia pada dasarnya adalah penyerahan atau pelimpahan kekuasaan pemerintah membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut, sehingga ada keseimbangan antara kewenangan serta urusan dan tanggung jawab yang diberikan kepada daerah dengan sumber dukungan keuangan. Perimbangan keuangan dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan, khususnya distribusi penerimaan antar tingkat pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam struktur desentralisasi dan diharapkan dapat mengatasi masalah ketimpangan antar daerah di Indonesia.

c. Dana Perimbangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun (2004) menyebutkan bahwa dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang ditujukan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah guna mencapai tujuan otonomi daerah, khususnya meningkatnya pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dana transfer adalah inti hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Umumnya, dana perimbangan merupakan bagian paling besar dalam pembiayaan aktivitas pemerintah daerah, dan pelaksanaannya secara teknis diatur dalam (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019).

Strategi pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah pada program otonomi daerah akan meningkatkan tanggung jawab pengelolaan program pada pemerintah daerah. Program kerja yang sebelumnya ada dalam kebijakan pemerintah pusat, kini didelegasikan secara langsung kepada pemerintah daerah. Hal ini jelas berdampak pada peningkatan kebutuhan anggaran pemerintah daerah dalam mendanai program kerja yang meningkat.

Dalam menciptakan sistem otonomi dan desentralisasi fiskal yang proporsional, demokratis, adil, dan transparan berdasarkan pada pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 diproklamasikan. Penyempurnaan pada peraturan ini antara lain, penegasan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sesuai asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Perimbangan keuangan dilakukan secara desentralisasi, yang dicirikan sebagai kewenangan pada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah yang dilakukan berdasarkan prinsip efektif, efisien, partisipatif, terbuka serta akuntabilitas (Saputra & Mahmudi, 2012).

Pemerintah pusat mengalokasikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada pemerintahan daerah, antaranya dalam bentuk dana perimbangan untuk menekan kesenjangan. Dana perimbangan juga disebut transfer yang merupakan konsekuensi keuangan dan ekonomi daerah yang tidak konsisten. Pembagian dana perimbangan pada pemerintah daerah

dilakukan secara adil, proporsional, demokratis, transparan, serta bertanggung jawab dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan yang sesuai bagi daerah yang telah diberikan dana perimbangan.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa mencakup hal-hal berikut:

1. Dana Transfer Umum, yaitu:
 - a. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber asal pendapatan APBN yang dialokasikan kepada wilayah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam.
 - b. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber berasal pendapatan APBN yang dialokasikan menggunakan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. Dana Transfer Khusus, yaitu:
 - a. Dana alokasi khusus fisik adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah. DAK Fisik terdiri atas DAK regular afirmasi serta penugasan.
 - b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah yang bertujuan untuk membantu mendanai aktivitas khusus non fisik yang merupakan urusan daerah.
3. Dana Insentif Daerah, yaitu dana yang dialokasikan kepada daerah sebagai penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan.

4. Dana Desa, yaitu dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membiaya penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Jamie Boex, (2001) menyatakan bahwa transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sementara itu, Edi Suandi Hamid, (2003) memaknai bahwa dana transfer di Indonesia diwujudkan melalui dana perimbangan berupa transfer Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Pada otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Namun, pemberian dana perimbangan tersebut tidak bertahan lama pemberiannya, tetapi hanya sementara, dimana suatu daerah belum mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Pemerintah daerah diharapkan tidak bergantung melalui dana perimbangan tersebut, mengatur strategi peningkatan pendapatan asli daerah agar dapat meningkatkan kemandirian daerah. Suatu daerah dinyatakan memiliki kemandirian, dilihat dari tingginya proporsi pendapatan asli daerahnya.

Dana perimbangan yang memiliki sumber fiskal dengan jumlah yang cukup besar, namun kebutuhannya kecil, umumnya akan mendapatkan transfer DAU yang kecil. Sementara, daerah dengan sumber fiskal yang umumnya kecil, namun kebutuhannya besar, akan mendapatkan transfer DAU yang cukup besar. Dengan demikian, ketentuan penerimaan DAU melihat pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan yang anggarannya telah

tercantum di APBD setelah dikurangi dengan belanja pegawai (Machfud et al., 2020).

Penganggaran DAU yang ideal akan langsung meningkatkan kesejahteraan, mengingat pemerintah dapat memperbaiki kualitas program bantuan masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan porsi DAU yang lebih tinggi untuk program pengentasan kemiskinan. Sebagai pendapatan terbesar di APBD, DAU harus dimaksimalkan mendukung urusan daerah yang menjadi kepentingan masyarakat.

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang ditransfer kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat dengan tujuan agar daerah tersebut dapat memberikan sarana dan prasarana fisik sebagai tujuan negara dalam meningkatkan kemampuan ekonomi dan fasilitas publik antar daerah. DAK pada dasarnya berdampak yang signifikan bagi pelayanan-pelayanan yang telah menjadi hak dasar bagi setiap daerah (Achmat Subekan, 2012). Semakin tinggi penerimaan DAK, pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk kegiatan-kegiatan khusus yang juga menjadi target nasional (Basyir et al., 2015). DAK yang sangat diawasi tentunya akan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial dan lain-lain. Jika program-program khusus meningkat dari tahun ke tahun, itu secara langsung dapat menurunkan tingkat kemiskinan, karena masyarakat memiliki sarana dalam memperbaiki kualitas hidupnya.

Dana Bagi Hasil sebagai dana yang berasal dari penerimaan APBN serta bagian dari dana transfer yang dianggarkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk merealisasikan program pemerintahan mereka sendiri. Ada dua macam DBH yang dialokasikan kepada daerah bersumber dari pendapatan negara, yaitu DBH bukan pajak (sumber daya

alam) dan DBH pajak. DBH dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai urusan pemerintahan tentunya dengan mengedepankan kepentingan publik (Riry Isramiwarti et al., 2017). DBH dapat memperluas anggaran yang digunakan untuk perbaikan kualitas tenaga kerja, fasilitas publik dan peningkatan program ekonomi di daerah.

Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal dan mendukung tercapainya keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terdapat tujuan lainnya pada pemberian dana perimbangan ini dimaksudkan agar tercapai dan terjamin standarisasi terhadap pelayanan publik di daerah (Andyka Arief Pratomo, 2015). Pada penyempurnaan prinsip-prinsip, mekanisme, serta penambahan persentase beberapa komponen dana perimbangan diharapkan daerah dapat menaikkan fungsi pemerintahan daerah sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Sehingga dana perimbangan diharapkan bisa menaikkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian hak kepada daerah untuk dapat mengelola keuangan agar bisa mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN peruntukannya ditransfer melalui APBD kabupaten/kota yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan sesuai pasal 1 ayat 32 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Menurut Lili, (2018), dana desa adalah dana yang diperoleh desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD kabupaten/kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat perdesaan.

Dana desa adalah salah satu isu penting dalam undang-undang desa, perhitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu penting tersebut, para senator mensurvei bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disalurkannya dana desa merupakan bentuk komitmen negara untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi pemerintahan yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya dana desa, dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sedangkan motivasi alokasi dana desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur perdesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.

4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Peningkatan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Roberto et al., (2015), menyatakan bahwa dalam pengelolaan dana desa harus sesuai dengan prinsip dana desa, yaitu:

1. Segala aktivitas yang dibiayai dana desa diprogramkan, diimplementasikan serta dimonitoring dengan transparan sesuai prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
2. Segala aktivitas wajib akui menurut manajerial, umum serta undang-undang.
3. Dana desa dilakukan dilaksanakan melalui dasar ekonomis, teratur serta terarah.
4. Aktivitas yang didanai oleh dana desa sungguh transparan guna menambah prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal mencukupi kebutuhan pokok, memperkuat organisasi desa dan aktivitas lainnya yang diperlukan oleh warga masyarakat yang diputuskan lewat musyawarah.
5. Dana Desa wajib ditulis di APBDesa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Menurut R. N. Sari et al., (2008), menyatakan faktor penghambat pengelolaan dana desa yaitu:

1. Rendahnya sinkronisasi antara perencanaan di tingkat desa dan kecamatan.
2. Jumlah dana desa sebagai penunjang operasional administrasi pemerintah masih terbatas.
3. Kurangnya intensitas sosialisasi dana desa pada masyarakat.

Pengelolaan dana desa pada penelitian ini diukur menggunakan indikator milik (Harjono et al., 2014) yaitu:

1. Pengalokasian sumber daya. Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan dengan menyeluruh tanpa ada fokus kepada pihak-pihak yang spesifik.
2. Operasional kegiatan mendukung efisiensi dan efektifitas. Pengelolaan dana desa dilakukan secara efektif dan efisien, semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diinginkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Presiden Jokowi berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, perbatasan, dan desa yang pembangunannya bersumber dari dana desa. Oleh karena itu, tidak hanya jalan tol, bandara, atau pelabuhan saja, namun infrastruktur skala kecil oleh masyarakat desa yang sangat dibutuhkan. Pemanfaatan dana desa dalam rangka percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa diarahkan guna mendukung pembangunan ekonomi dan sektor prioritas.

e. Anggaran Infrastruktur

Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi (NS Grigg, 1988). Infrastruktur merupakan

bagian dari sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam suatu sistem.

Infrastruktur berperan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Infrastruktur yang memadai sangat diperlukan, seperti infrastruktur jalan dan jembatan. Terbatasnya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menghambat laju investasi. Untuk membantu pemerintah daerah dalam pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pemerintah pusat memberikan bantuan keuangan yang diberikan melalui alokasi khusus untuk sektor infrastruktur atau dana alokasi khusus non reboisasi untuk sektor infrastruktur. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan jenis transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada daerah yang bersifat *specific grant* (bantuan spesifik).

Sedangkan menurut William J. Doane et al., (1994) menyatakan pondasi atau rancangan kerja yang mendasari pelayanan pokok, fasilitas dan institusi dimana bergantung pertumbuhan dan pembangunan dari suatu area, komunitas dan sistem infrastruktur meliputi variasi yang luas dari jasa, institusi dan fasilitas yang mencakup system transportasi dan sarana umum untuk membiayai system, hukum dan penegakan hukum pendidikan dan penelitian.

Kemudian Rutherford, (2002) memberikan pengertian yang lebih luas bahwa infrastruktur juga merupakan pelayanan utama dari suatu negara yang membantu kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat sehingga dapat berlangsung yaitu dengan menyediakan transportasi dan juga fasilitas pendukung lainnya. Sedangkan Scruton, (2007) infrastruktur merupakan elemen struktural ekonomi yang memfasilitasi arus barang dan jasa antara pembeli dan penjual.

Dalam hubungan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi, beberapa ekonom juga memberikan pendapatnya mengenai infrastruktur. Soedibjo, (2015) mendefinisikan infrastruktur sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Tanpa infrastruktur, kegiatan produksi pada berbagai sektor kegiatan ekonomi (*industry*) tidak berfungsi. Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, (2006) juga mendefinisikan infrastruktur sebagai salah satu faktor penting yang menentukan pembangunan ekonomi.

Peningkatan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pengaturan mendasar dari 7 (tujuh) arah kebijakan umum pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Mempercepat pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi (pertumbuhan) dan mencapai keseimbangan pembangunan (pemerataan). Peningkatan pembangunan infrastruktur tergantung pada aksesibilitas infrastruktur yang terbatas dan tidak memadai. Kondisi ini dipandang sebagai ujian dalam memanfaatkan peluang peningkatan investasi karena mahalnya biaya logistik dan ujian atas masalah kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Lagi pula, dengan melihat kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indonesia, kondisi *existing* selama 30 tahun (1982-2012) menjelaskan bahwa kontribusi PDRB Kawasan Barat Indonesia (Sumatera, Jawa, dan Bali) sangat tinggi mencapai 80% produk domestik bruto, sedangkan kontribusi Kawasan Timur Indonesia sisanya sekitar 20%. Satu kondisi lagi menyatakan bahwa 122 kabupaten merupakan daerah tertinggal dan terdapat kesenjangan pembangunan antara wilayah desa-kota memberikan dampak dan beban pada kehidupan sosial masyarakat secara umum dan wilayah perkotaan khususnya karena urbanisasi.

Menurut pandangan regional, pemerintah menganggap bahwa percepatan pembangunan infrastruktur memiliki peranan penting dan strategis, serta isu krusial dalam peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat (Kemenkeu DJPK, 2020). Penilaian ini tergantung pada asumsi wujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas adalah dengan ketersediaan infrastruktur publik yang memadai (Helmizar et al., 2020). Dalam implikasi yang memadai yaitu:

“Infrastruktur akan mendukung mobilitas ekonomi dan sosial, serta memperkuat konektivitas antar daerah; meningkatkan produksi dan stock untuk mendukung swasembada dan ketahanan pangan; mengelola dan mengembangkan potensi daerah menjadi kekuatan ekonomi riil; mendukung aktivitas peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan pengentasan kemiskinan; serta mengurangi ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat”.

Demikian pula, aksesibilitas infrastruktur publik di Indonesia juga dinilai tertinggal dibandingkan dengan negara-negara yang sama-sama mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998, sebenarnya Indonesia pada dasarnya mengalami ketertinggalan (*backlog*). Oleh sebab itu, dengan tingkat ketidakseimbangann, tren kemiskinan berkurang, dan masalah yang ada serta tantangan yang dihadapi dimasa datang.

Pemerintah pusat melalui RPJMN 2015-2019 telah menempatkan perhatian utamanya untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, yang bertujuan untuk lebih meningkatkan infrastruktur dan ketersediaan energi; meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha; serta tata kelola birokrasi yang lebih efektif dan efisien. Khususnya dalam usaha peningkatan infrastruktur, prioritas diarahkan pada upaya meningkatkan konektivitas nasional, sehingga integrasi domestik ini dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan kelancaran arus barang dan jasa antar daerah di Indonesia.

Ini jelas membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah melalui kebijakan yang tidak membuat ekonomi biaya yang signifikan. Dengan demikian, kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang tepat seharusnya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang mempertimbangkan kesamaan dengan arah pengembangan sektor lainnya maupun pengembangan wilayah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang lebih luas sangat diperlukan. Kesamaan ini diekspresikan dalam langkah strategis berupa rencana dan program investasi infrastruktur.

Aksesibilitas anggaran infrastruktur sangat dibutuhkan oleh suatu daerah untuk mendukung produktivitas daerah dan menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai bidang. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu perspektif penting dan esensial untuk mempercepat proses pembangunan nasional dan daerah. Salah satu metode untuk mendukung ekspansi PDRB adalah dengan menambah belanja daerah untuk infrastruktur. Anggaran infrastruktur adalah anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah untuk pengadaan infrastruktur dalam suatu daerah. Salah satu elemen yang mendorong produktivitas suatu daerah adalah aksesibilitas infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja, meningkatkan konsumsi masyarakat dan pemerintah, serta memicu kegiatan produksi. Aksesibilitas fasilitas pelayanan publik membuat masyarakat lebih dinamis dan bersemangat dalam bekerja dan dengan fasilitas yang baik akan meningkatkan jumlah investasi di setiap daerah yang mempercepat pembangunan ekonomi sehingga pada akhirnya akan mengurangi tingkat kesenjangan yang ada. Pemerintah daerah memiliki

tugas untuk menangani dan mengelola anggaran untuk sektor infrastruktur secara tepat dan akurat karena aksesibilitas infrastruktur merupakan faktor pendukung untuk memperlancar kegiatan perekonomian suatu daerah.

The World Bank, (2011) menyatakan bahwa dari *perspektif governance*, perbaikan pelayanan publik dan pengurangan kemiskinan dapat tercapai dengan peningkatan efisiensi alokasi melalui penyesuaian secara lebih baik pelayanan publik dan efisiensi produksi melalui peningkatan akuntabilitas, responsivitas. Pembiayaan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan lain-lain harus dilihat dari korelasi belanja pemerintah dengan total belanja barang publik. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh suatu daerah dapat dibangun melalui pembiayaan infrastruktur. Pengaruh modal publik atau infrastruktur berbeda-beda di setiap negara, daerah atau sektor tergantung pada kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur itu sendiri.

Semakin layak kondisi infrastruktur suatu wilayah, semakin tinggi pula mobilitasnya. Ketepatan dalam pengadaan infrastruktur mengambil peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu daerah. Daerah dengan akses terbatas mengalami tingkat harga yang lebih besar secara fundamental dan kekurangan pasokan sumber daya regional dari daerah dengan akses yang lebih baik. Pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas umum secara langsung akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pengalokasian Dana Transfer Umum untuk belanja infrastruktur tahun anggaran 2016 ditetapkan minimal 15% untuk belanja modal dan belanja barang/jasa yang langsung terhubung dengan fasilitas

pelayanan publik. Sementara itu, untuk tahun anggaran 2017 hingga 2019, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang APBN setiap tahun, porsi DTU untuk belanja infrastruktur telah meningkat sekitar 25%. Penetapan tarif bersifat mandatory, yang pemanfaatannya dikoordinasikan pada program-program yang langsung berkaitan dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar wilayah.

2.2 Keterkaitan Antar Variabel

2.2.1 Dana Perimbangan dan Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi di mana pendapatan tahunan di suatu wilayah tidak dapat memenuhi standar minimal yang diperlukan setiap individu untuk dapat hidup secara layak di wilayah tersebut. Masalah kemiskinan menjadi masalah besar di setiap negara, hampir semua negara menghadapi masalah kemiskinan. Badan Pusat Statistik, (2018) menyatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi yang menggambarkan individu yang mengalami disabilitas dalam hidupnya berupa kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar, baik pangan maupun non pangan yang tidak dapat dipenuhi oleh manusia karena tidak memiliki pilihan untuk hidup secara layak, mulai dari kebutuhan pokok atau dengan kata lain kemiskinan adalah kegagalan untuk mengkonsumsi kebutuhan yang paling sedikit, tidak adanya sandang, pangan dan papan untuk menopang kehidupan.

Pengentasan kemiskinan dapat dicapai melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pemerataan pendapatan antar penduduk, dan distribusi kebijakan yang tepat oleh pemerintah tercermin dalam penganggaran pendapatan dan belanja pemerintah yang terkoordinasi pada masyarakat miskin (*pro-poor budgeting*). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berpihak pada masyarakat dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu pendekatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat mengatasi kemiskinan rakyat pada wilayahnya melalui cara pengalokasian APBD yang tepat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan.

Kehadiran mediasi pemerintah atau peran pemerintah dalam perekonomian suatu negara, akan meningkatkan perkembangan moneter, melalui kebijakan fiskal, misalnya, perpajakan maupun pengeluaran pemerintah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan membawa penurunan tingkat kemiskinan daerah setempat. Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merupakan salah satu pendekatan anggaran pemerintah (*budget policy*) yang dapat mempengaruhi perekonomian bangsa, salah satunya hasil *effect* (perubahan hasil). *Output effect* adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam memutuskan pendapatan dan pengeluaran untuk pengeluaran pemerintah, dalam memberikan barang publik dan menyiapkan layanan pada masyarakat dengan tujuan mengelola roda ekonomi.

Dana perimbangan adalah dana yang dianggarkan untuk pemerintah daerah yang tercantum dalam APBN, yang berarti untuk pemerataan kemampuan keuangan antara pusat dan daerah yang akan digunakan untuk mendukung urusan pemerintah, salah satunya adalah mengurangi tingkat kemiskinan. Setelah itu, dana perimbangan akan ditransfer dari pemerintah pusat untuk diseminasi pendapatan dan mendukung program dan kegiatan di daerah sehubungan dengan pelaksanaan desentralisasi.

Dana perimbangan agar sesuai dengan kebijakan yang direncanakan dengan membantu pemerintah meningkatkan program dan realisasi kegiatan ekonomi. Pengelolaan dana perimbangan yang maksimal oleh pemerintah pasti akan berdampak positif bagi pengurangan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Selanjutnya anggaran tersebut akan dialokasikan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memperluas kesempatan kerja, bantuan UMKM, pelatihan dan lain-lain, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik (Teja Rinanda & Subambang Harsono, 2020).

Salah satu unsur dalam mengurangi tingkat kemiskinan di daerah adalah pengelolaan dana perimbangan untuk memenuhi perekonomian daerah. Akibatnya, dana perimbangan menjadi anggaran yang vital karena jumlahnya yang sangat besar dan terus meningkat dan menjadi pendorong utama dalam setiap kegiatan pemerintah daerah. Jika anggaran dimanfaatkan secara optimal, maka masalah kemiskinan dapat teratasi dengan cepat (M. L. Anwar et al., 2016). Demikian pula, dana perimbangan yang merupakan instrumen pendapatan daerah juga mempengaruhi efektivitas, efisiensi, dan kapabilitas program daerah. Jika jumlahnya terus meningkat, jumlah pendapatan dan belanja daerah untuk penanggulangan kemiskinan juga akan meningkat.

Pengalokasian dana perimbangan sesuai tujuannya jelas merupakan tugas daerah karena pemerintah daerah tidak bisa bergantung pada PAD, yang masih jauh di bawah dana perimbangan. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan harus melalui proram yang kuat yang mencakup semua lapisan masyarakat. Selain itu, penurunan tingkat kemiskinan harus didukung secara maksimal dari kapasitas dana perimbangan (Achmat Subekan, 2012).

Melihat kondisi kemiskinan yang terjadi di Indonesia, tentunya pemerintah harus merencanakan dan menjalankan strategi yang ideal untuk

mengurangi tingkat kemiskinan. Dana perimbangan telah dibuat secara fungsional oleh pemerintah daerah dalam jumlah tertentu. Pada akhirnya, pengelolaan dana perimbangan yang efektif akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Pengoptimalan anggaran tersebut, pemerintah daerah diharapkan untuk mengkoordinasikan program-program tertentu dengan tujuan akhir meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Dana perimbangan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari APBD untuk mengatasi kemiskinan. Dengan meningkatnya dana perimbangan, tingkat kemiskinan akan menurun. Dengan pendapatan transfer, daerah dapat mendukung program ekonomi yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat.

2.2.2 Dana Desa dan Tingkat Kemiskinan

Dana desa memiliki tujuan untuk meningkatkan kegiatan perekonomian dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemberian dana desa memberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan dan operasional pemerintahan yang diarahkan pada tujuan tersebut kepada pemerintah desa. Pemberian dana desa diharapkan pemerintah desa dapat memprioritaskan pada pemberdayaan serta kemajuan daerah setempat. Dengan pemberian dana desa kepada pemerintah desa, dipercaya akan meningkatkan kualitas hidup serta pengentasan kemiskinan daerah setempat. Dana desa dapat digunakan untuk berbagai program kegiatan pemberdayaan masyarakat, misalnya, pelatihan dan pembinaan usaha kecil, menciptakan hortikultura dan peternakan masyarakat atau membentuk BUMDes sebagai peningkatan usaha masyarakat.

Pemberian dana desa sebagai wujud pemenuhan hak desa secara keseluruhan agar menyelenggarakan otonominya untuk berkembang dan berkreasi. Tugas pemerintah desa dalam memberikan pelayanan, kesejahteraan

masyarakat dan mempercepat pembangunan serta pertumbuhan daerah-daerah vital perlu ditingkatkan, guna mengembangkan daerah-daerah yang masih tertinggal. Penelitian ini di dukung oleh penelitian Krisna et al., (2019) yang menyatakan bahwa dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dana desa memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan. Setiap ekspansi dana desa akan mengurangi angka kemiskinan. Hasil ini menunjukkan bahwa pemberian dana desa ke pemerintah desa dapat menjadi cara yang tepat untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Dana desa yang diberikan secara langsung berhubungan dengan masalah utama kemiskinan desa untuk mengurangi angka kemiskinan di desa. Dana desa digunakan dalam program pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga dana yang dianggarkan pemerintah desa memberikan dorongan kepada masyarakat miskin untuk bangkit dalam memutus mata rantai kemiskinan. Pemanfaatan dana desa untuk pembangunan desa, memberikan kemudahan dan kelancaran bagi masyarakat miskin dalam memperoleh pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Dana desa digunakan untuk pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan dengan tujuan agar masyarakat miskin bisa mendapatkan akses dengan mudah. Selain itu, dalam pembinaan masyarakat desa, penerima manfaat dana desa telah menetapkan hal-hal mendasar dari wilayah setempat dengan tujuan agar kehidupan mereka dapat dipertahankan melalui kegiatan pembinaan masyarakat seperti penyuluhan hidup sehat, penerapan hunian sehat dan pembinaan lainnya. Pembinaan ini dapat mempengaruhi mentalitas dan cara berperilaku orang miskin melalui anggaran dana desa sehingga masyarakat dapat diangkat dari kemiskinan. Dukungan dana desa di bidang pemberdayaan

masyarakat dapat mengurangi kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat memberikan akses dan pengembangan potensi desa dan masyarakat sehingga mereka dapat menciptakan produk dan karya yang dapat meningkatkan daya dukung desa dalam mengurangi kemiskinan. Masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan potensi yang ada dengan tujuan dapat memberikan jalan keluar dari kemiskinan.

Melalui dana desa, diyakini bahwa pembangunan daerah secara umum dapat ditingkatkan dan secara bersama ketimpangan pembangunan antar wilayah juga akan berkurang. Alokasi dana secara merata dan sangat terarah serta pengelolaan jenis-jenis pendapatan secara ideal, efisien dan efektif dalam pemanfaatan anggaran belanja merupakan hal utama yang harus terus difokuskan. Pemerintah memiliki situasi yang vital dalam mewujudkan pemerataan distribusi, karena menciptakan kesejahteraan di masyarakat adalah kewajiban seluruh pengamat ekonomi. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai penjamin terciptanya distribusi yang adil serta menjadi fasilitator pembangunan manusia dan menciptakan kesejahteraan masyarakat Savarita Pitri, (2018), sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah yang masih tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Selanjutnya, dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Ketika dana desa meningkat, kinerja fiskal dan ekonomi regional serta pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat sehingga akan mengurangi angka kemiskinan.

Hal ini sesuai dengan penelitian Setianingsih, (2017) menunjukkan bahwa variabel dana desa berpengaruh negatif terhadap kemiskinan sebesar 0,398%. Artinya bahwa dengan bertambahnya dana desa sebesar 1% maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,398%. Penelitian Azwardi & Sukanto, (2014) menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif antara Alokasi

Dana Desa terhadap kemiskinan. Penelitian H. S. Putra, (2018), menunjukkan peningkatan dana desa berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Begitu juga penelitian Krisna et al., (2019); Wahyuddin et al., (2019) menunjukkan hasil bahwa dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Namun, tidak sesuai dengan penelitian Harmiati et al., (2019); Lalira et al., (2018); Rimawan & Aryani, (2019) menunjukkan hasil yang berbeda, dana desa tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

2.2.3 Anggaran Infrastruktur dan Tingkat Kemiskinan

Pemerintah pusat berharap dengan pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab, maka pemerintah daerah memiliki peluang yang lebih besar dalam penanggulangan kemiskinan. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan pada daerah setempat, karena lebih dekat dan lebih praktis untuk memantau serta mengevaluasi proyek apa yang selaras dengan potensi daerah yang ada untuk mengurangi kemiskinan di daerahnya. Kemiskinan adalah kewajiban bersama baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama pemerintah daerah untuk membantu proses peningkatan taraf hidup masyarakat dalam suatu pemerintahan, untuk segera mencari jalan keluar untuk mengatasi tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.

Aksesibilitas infrastruktur merupakan salah satu elemen penting yang mendukung masyarakat modern. Setiap lini usaha membutuhkan jaminan pasokan energi, air, komunikasi dan transportasi untuk melakukan kegiatan produksi. Jika tidak dapat diakses, efisiensi negara akan lebih rendah dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur umumnya dianggap sebagai salah satu variabel kunci yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

dan memfasilitasi pengurangan ketimpangan dan kemiskinan, terutama di negara-negara berkembang (Tusk Advisory, 2018).

Laporan Indonesia *Economic Quarterly World Bank* (2019) mengungkapkan bahwa infrastruktur Indonesia yang rendah menjadi salah satu penghambat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Posisi Indonesia rendah jika dibandingkan dengan negara lain mengenai kualitas infrastruktur dan penyediaan infrastruktur yang kurang, sehingga menjadi penghalang bagi organisasi tertentu untuk melakukan aktivitas serta berinvestasi. Kembali ke hal tersebut, pemerintah fokus pada penciptaan infrastruktur sebagai salah satu prioritas nasional.

Infrastruktur sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi daerah. Tim LPEM-PSEKP-PSP, (2004) menyatakan bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk mengurangi kemiskinan adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dasar yang mendesak dalam pembangunan jalan, jembatan, irigasi, penyediaan air bersih, sanitasi, serta penyediaan energi listrik yang terkoordinasi akan semakin mengembangkan kondisi pembangunan daerah serta nasional.

Sejalan yang dikemukakan oleh D Friawan, (2008) bahwa infrastruktur sangat mendesak dalam suatu integritas ekonomi, terutama pertama, aksesibilitas infrastruktur baru adalah motor utama pembangunan ekonomi. Kedua, untuk memperoleh manfaat penuh dari integrasi, aksesibilitas jaringan infrastruktur sangat diharapkan dalam memfasilitasi kegiatan perdagangan dan investasi. Ketiga, perhatian terhadap peningkatan infrastruktur juga penting untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara. Dengan peningkatan infrastruktur, diharapkan dapat memperlancar mobilitas aktivitas ekonomi antar daerah yang dengan demikian akan mengundang investor untuk

menanamkan modalnya ke daerah tersebut. Ini akan menciptakan lapangan kerja baru sebab munculnya aktivitas baru. Pada akhirnya, peningkatan infrastruktur akan memperbaiki kondisi pembangunan. Kondisi pembangunan yang membaik akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan.

Perbaikan infrastruktur akan meningkatkan pengembangan investasi dan pertumbuhan ekonomi, karena investasi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Menurut Sukwika, (2018), investasi memegang peranan penting dalam menentukan penyerapan tenaga kerja. Infrastruktur yang baik juga akan mendukung peningkatan pendapatan masyarakat, karena peningkatan aktivitas ekonomi sebagai akibat dari mobilitas faktor produksi dan aktivitas perdagangan yang lebih tinggi. Sehingga investasi tidak dapat dipisahkan dari aksesibilitas infrastruktur yang merupakan pilar pembangunan berkelanjutan. Melihat kebutuhan infrastruktur dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, para ahli infrastruktur ingin agar dalam mendorong pembangunan infrastruktur, pemerintah berperan penting dalam sektor infrastruktur dengan menjaga keberlanjutan investasi pembangunan infrastruktur sehingga infrastruktur dapat digarap baik secara kuantitas maupun kualitas.

Untuk mempercepat penyediaan infrastruktur, pemerintah berperan dalam pemberian remunerasi berupa kerjasama penanaman modal, subsidi, penjaminan, dan penghapusan pajak sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Infrastruktur memiliki sifat eksternal positif yang tinggi, karena aksesibilitas infrastruktur akan sangat mempengaruhi dinamika pembangunan

serta pembangunan sektor ekonomi, mempertinggi produktivitas daerah, dan menaikkan peningkatan tingkat hidup masyarakat dalam jangka panjang. Infrastruktur merupakan penentu kelancaran serta percepatan pembangunan. Aksesibilitas infrastruktur akan mendorong kemajuan suatu daerah, karena semakin cepat dan besar pembangunan ekonomi yang akan didorong, semakin banyak pula fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan.

Lagi pula, infrastruktur yang dibatasi jelas membuat penggunaan potensi serta sumber daya ekonomi menjadi tidak ideal, bahkan sulit berkembang ke tingkat yang diharapkan. Kondisi ini mengharuskan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk membangun serta menyediakan infrastruktur, dan bagi pemerintah pusat dan daerah agar fokus pada optimalisasi anggaran belanja urusan wajib (*mandatory spending*) dalam upaya untuk memperluas akses penduduk pada pendidikan dan kesehatan. Mengingat bahwa pelaksanaan perekonomian memerlukan sarana dan prasarana yang memuaskan, maka struktur belanja pemerintah untuk infrastruktur harus terus diupayakan dengan mempertimbangkan dampak perbaikan pada pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Indonesia.

2.2.4 Inflasi dan Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan suatu bangsa antara lain disebabkan oleh inflasi sebagai akibat dari proses pembangunan ekonomi. Inflasi menggambarkan kecanggungan dalam pasokan uang beredar dengan volume barang dan jasa yang dapat diakses dalam perekonomian. Inflasi merupakan kecenderungan biaya yang naik secara keseluruhan dan konsisten, atau dapat juga dikenal sebagai efek ketidakteraturan antara berapa banyak uang tunai yang tersedia untuk digunakan dan berapa banyak tenaga kerja dan produk yang dapat diakses.

Seperti yang ditunjukkan dalam teori Keynes, inflasi terjadi dengan alasan bahwa masyarakat ingin hidup melewati batasan kemampuan keuangannya. Dengan kata lain, proses perebutan bagian rezeki diantara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian lebih besar daripada yang dapat disediakan masyarakat sehingga proses perebutan ini pada akhirnya berubah menjadi keadaan di mana permintaan masyarakat melampaui dari yang dapat diakses (*inflationary gap*).

Pemicu inflasi, baik dari sisi permintaan maupun biaya, sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang menimpa negara tersebut. Jika suatu negara dilanda krisis produksi, penurunan volume produksi tidak dapat dimbangi dengan permintaan, sehingga ada peluang harga untuk naik. Tahap ini akan mendorong naiknya harga-harga barang lain yang akhirnya mendorong naiknya inflasi. Keadaan ini akan menurunkan daya beli pada masyarakat yang berpenghasilan tetap dan rendah, yang dengan demikian dapat meningkatkan kemiskinan. Demikian pula, krisis dana desa yang ditandai dengan penurunan dana desa mata uang asing pada awalnya akan meningkatkan harga barang impor serta bahan baku yang tidak dapat disubstitusikan secara lokal.

Kejadian ini meningkatkan biaya produksi yang berdampak pada kenaikan inflasi di suatu negara. Dengan asumsi bahwa produk ini dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, kenaikan inflasi akan meningkatkan harga produk yang ditawarkan sehingga respon dengan daya beli yang rendah. Selain itu, akan menurunkan permintaan sehingga berpotensi meningkatkan kemiskinan. Akhirnya, jika terjadi penurunan modal internasional yang masuk ke suatu negara, secara umum hal itu akan menurunkan total investasi domestik yang ditanamkan. Sesuai prinsip ekonomi makro, keterbatasan investasi akan mengurangi produksi barang dan jasa sehingga memiliki peluang untuk

meningkatkan harga barang-barang tersebut yang berujung pada naiknya inflasi. Dengan asumsi bahwa inflasi meningkat, itu pasti akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga menaikkan angka kemiskinan.

Di Indonesia variabel inflasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kemiskinan. Dengan asumsi bahwa inflasi meningkat, kemiskinan pun turut meningkat. Sebaliknya, dengan asumsi inflasi berkurang, angka kemiskinan pun turut berkurang. Hal ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa inflasi akan meningkatkan biaya produksi yang menyebabkan naiknya harga barang dan jasa. Kenaikan harga ini menyebabkan kemampuan masyarakat untuk membeli berkurang yang berujung pada peningkatan kemiskinan.

2.2.5 Investasi dan Tingkat Kemiskinan

Investasi telah dianggap sebagai sumber penting bagi pembangunan ekonomi. Para pakar menilai bahwa aliran PMA serta PMDN dapat mengisi kesenjangan antara investasi yang diinginkan dan mengaktifkan dana investasi domestik. Kemudian, PMA juga dapat meningkatkan pendapatan pajak dan keterampilan manajemen, teknologi, serta tenaga kerja di negara tuan rumah. Dengan demikian, PMA dapat membantu tuan rumah keluar dari lingkaran kemiskinan serta keterbelakangan.

Investasi mempunyai tujuan untuk mendapatkan atau meningkatkan penghasilan dan keuntungan/laba di masa mendatang. Investasi adalah komitmen untuk mengalokasikan berbagai aset pada satu atau lebih yang diharapkan mampu memberikan *return* (keuntungan) dimasa mendatang.

Investasi meliputi penambahan stok modal atau barang untuk suatu negara, seperti bangunan, peralatan produksi, dan persediaan barang dalam waktu satu tahun atau kurang. Investasi merupakan langkah mengorbankan konsumsi di waktu mendatang (Paul Samuelson & Nordhaus William D, 2004).

Investasi atau pengeluaran untuk membeli barang modal dan peralatan produksi, dipisahkan menjadi 4 bagian, yaitu: investasi pada perusahaan swasta, pengeluaran untuk membangun tempat tinggal, perubahan dalam inventaris (*inventory*) perusahaan dan investasi oleh pemerintah.

Investasi pada dasarnya adalah awal dari kegiatan pembangunan ekonomi. Investasi dapat dibuat oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Investasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk jangka panjang dapat menaikkan standar hidup masyarakatnya (N. Gregory Mankiw, 2000).

Investasi pada literatur umumnya dipergunakan untuk merujuk pada peningkatan persediaan modal (T. Reungsri, 2010). Perbedaan dalam literatur termasuk investasi modal tetap, investasi modal manusia dan pembelian aset keuangan seperti saham dan obligasi memakai istilah investasi. Kualifikasi lebih lanjut dibuat dengan peningkatan stok modal publik serta investasi swasta.

Dilihat dari jenisnya, investasi dibedakan menjadi dua jenis, lebih spesifiknya: pertama, investasi yang dilakukan oleh pemerintah atau lebih dikenal dengan *government expenditure*. Umumnya, investasi yang dibuat oleh pemerintah tidak ditujukan untuk menghasilkan keuntungan; kedua, investasi yang dilakukan oleh pihak swasta. Investasi pada awalnya terdiri dari 2 macam, yaitu: PMA (Penanaman Modal Asing), jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari luar negeri memiliki beberapa manfaat antara lain bersifat jangka panjang, berkontribusi besar terhadap alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru, sedangkan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari dalam

negeri, investasi sebagai wadah dimana dana ditempatkan dengan harapan dapat memelihara, meningkatkan *value* serta memberikan hasil yang positif.

Investasi yang dilakukan oleh swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan mendapatkan tambahan pendapatan. Jika pendapatan meningkat, konsumsi turut meningkat dan meningkat pula *effective demand*. Investasi yang muncul disebabkan oleh penambahan permintaan yang sumbernya terletak pada bertambahnya pendapatan disebut *induced investment*. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu teori ekonomi yang banyak digunakan dalam dunia investasi adalah teori ekonom John Maynard Keynes yang juga disebut sebagai pencetus Keynesianisme. Teori Keynes menggambarkan investasi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan cara masyarakat berperilaku saat itu. Menurut teori ekonomi klasik, ada 3 variabel untuk menentukan investasi, khususnya biaya, pengembalian serta harapan dan peluang. Sementara itu, berdasarkan teori investasi menurut Keynes, keputusan investasi diambil dengan membandingkan *Marginal Efficiency of Capital* dengan tingkat bunga riil. MEC adalah tingkat pengembalian ketika suatu proyek mencapai titik impas (*break even point*) atau keuntungan yang diharapkan dari investasi. Ketika *value* MEC menjadi lebih menonjol daripada tingkat bunga riil, maka penanaman modal pada aset investasi yang mendapatkan penghasilan tidak ada lagi. Teori investasi menurut Keynes juga menyatakan bahwa jumlah atau banyaknya investasi tidak hanya tergantung pada pengembalian atau satu unsur saja, tetapi pada saat yang sama juga dipengaruhi oleh biaya modal atau tingkat bunga. Investasi

seharusnya produktif di mana *value* MEC dengan biaya modal berada pada level yang sama.

Dalam Teori Harrod-Domar mengemukakan bahwa kegiatan investasi dipandang sebagai salah satu faktor penting dan memainkan dua bagian secara bersamaan yang membawa pengaruh pada perekonomian khususnya pertama, investasi memiliki hubungan positif dengan pendapatan negara, akibatnya makin mudah proses investasi maka makin banyak kegiatan investasi yang dilakukan dan makin tinggi pula pendapatan yang dihasilkan oleh suatu negara. Kedua, investasi dapat memperluas kapasitas produksi ekonomi dengan cara meningkatkan stok modal. Pembentukan modal ini dipandang sebagai pengeluaran yang akan memperluas permintaan kebutuhan di seluruh daerah setempat. Dari kedua hal tersebut dapat diartikan bahwa investasi dapat mempengaruhi permintaan serta penawaran. Dalam jangka panjang, investasi mempengaruhi agregatif serta penawaran agregatif melalui perubahan kapasitas produksi.

Teori Harrod-Domar menekankan bahwa sangat penting menyisihkan sebagian pendapatan negara untuk membiayai dan memperbaiki barang-barang (bangunan, material, peralatan dan lain-lain) yang mengalami kerusakan (Kresna, 2020). Namun untuk mengembangkan perekonomian diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan modal. Dengan asumsi mengharapkan bahwa ada hubungan ekonomis langsung antara ukuran persediaan modal (K) dan output total (Y), misalnya, dengan asumsi bahwa 3 rupiah modal diharapkan memberikan hasil (kenaikan 1 rupiah), kemudian, pada saat itu, setiap tambahan bersih terhadap persediaan modal (investasi baru) akan menghasilkan ekspansi output total sesuai rasio modal-output. Jika kita menetapkan $COR = k$, proporsi kecenderungan untuk menabung (MPS) = s ,

merupakan proporsi tetap dari output total, dan investasi ditentukan oleh tingkat tabungan. Kekurangan dari teori Harrod-Domar ini yaitu 1) MPS (*marginal propensity to save*) dan ICOR (*incremental capital output ratio*) yang konsisten padahal sebenarnya kedua hal ini dapat berubah dalam jangka panjang, 2) mengabaikan perubahan dalam harga meskipun fakta bahwa perubahan harga umumnya terjadi kapan pun, dan 3) suku bunga yang dianggap tidak berubah.

Pengaruh *crowding-in* dapat muncul dalam berbagai cara, misalnya investasi publik pada infrastruktur seperti jalan, jalan raya, pendidikan, dan kapasitas pembangkit untuk mengurangi biaya produksi pada sektor swasta. Hal ini dapat terjadi dengan mengurangi biaya operasi dan memungkinkan penggantian yang efisien berasal investasi biaya tinggi/minimal untuk investasi yang lebih murah/lebih produktif, dapat meningkatkan tingkat pengembalian modal swasta yang diperlukan sehingga mengakibatkan peningkatan pada sektor investasi swasta, karena asumsi manfaat yang diperluas. Misalnya, jaringan jalan yang lebih baik bisa mengurangi biaya pembangunan pabrik swasta baru atau pengangkutan alat berat (Ingratubun, 2019).

Jika terjadi *crowding-out*, setiap pengaruh positif investasi publik terhadap investasi swasta membawa dampak yang merugikan. Di sini masalah di mana investasi publik melalui peningkatan perpajakan distorsi. Distorsi pajak memberikan motivasi untuk menghindari pajak serta mengurangi laju keuntungan yang diharapkan dari proyek investasi. Ini mengurangi aliran dana investasi yang tersedia untuk investasi sektor swasta dan mengarah pada peningkatan biaya pinjaman melalui suku bunga tinggi dalam perekonomian domestik. Namun, saluran yang tepat terjadi dimana, hasil bersihnya adalah investasi publik berdampak buruk pada investasi swasta yang mengarah ke efek *crowding-out* (S Boopen & A.J. Khadaroo, 2006).

Keuntungan lain dari investasi dapat mencakup inovasi baru, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia, serta donasi untuk integrasi perdagangan internasional, menaikkan investasi domestik, serta meningkatkan pajak yang dihasilkan oleh FDI. Hal ini dituntut untuk memberikan kontribusi pada perekonomian dan penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang merupakan sarana untuk pengentasan kemiskinan. Bagaimanapun, pengaruh FDI dan PMDN pada kemiskinan dan pengangguran bergantung pada banyak variabel termasuk kebijakan negara, kualitas pasar energi kerja, iklim ekonomi, dan investasi itu sendiri.

Investasi asing, baik langsung maupun tidak langsung, hanya dapat memengaruhi penurunan kemiskinan dan pengangguran. Efek tidak langsung FDI pada penurunan kemiskinan dan pengangguran adalah melalui pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi peningkatan tingkat hidup karena peningkatan produk domestik bruto, peningkatan teknologi dan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa FDI sangat penting karena memberikan sumber modal, melengkapi investasi swasta domestik, dan membuka kesempatan kerja baru dan transfer teknologi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara penerima. Efek eksklusif investasi terhadap kemiskinan jelas terlihat melalui ekspansi lapangan kerja dan penurunan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan karena peningkatan permintaan pekerjaan, tenaga kerja serta keselamatan. A. Bende Nabende & Ford JL, (2003) menganalisis informasi dari 5 negara Asia Tenggara dan menemukan korelasi eksklusif yang positif antara FDI dan pertumbuhan ekonomi. Dalam eksplorasinya, ia mengamati bahwa FDI untuk Malaysia, Filipina dan Indonesia berkorelasi positif dengan pertumbuhan, sedangkan Thailand dan

Singapura berkorelasi negatif. Kemudian, pada saat itu, dampak dari tinjauan tersebut merekomendasikan agar FDI mendukung pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN umumnya melalui modal kerja dan SDM.

Penanaman modal asing berkontribusi secara langsung pada pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan secara tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja di berbagai asosiasi. Keluaran tidak langsung yang dibuat oleh mitra asing di negara tuan rumah dapat menjadi signifikan, mungkin lebih menonjol daripada yang direncanakan. Dengan perkembangan produksi internasional, proses penciptaan lapangan kerja oleh mitra asing meningkat. Penciptaan lapangan pekerjaan di negara-negara maju agak terkait dengan model kegiatan ekonomi padat karya yang dikelola oleh perusahaan asing. Ada juga yang mengalami pertumbuhan rendah atau penurunan lapangan kerja disebabkan afiliasi asing (OECD, 1995).

Berdasar pada teori Harrod Domar yang merekomendasikan bahwa terdapat ada hubungan positif antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa tidak adanya minat investasi pada suatu wilayah menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita masyarakat di daerah aktivitas ekonominya tidak produktif. Kemudian, pertumbuhan ekonomi merupakan komponen utama yang berdampak pada penurunan kemiskinan dan pengangguran. Deininger & Squire, (1998); Dollar & Kraay, (2002), menunjukkan bahwa pertumbuhan cenderung menaikkan pendapatan masyarakat miskin secara proporsional dengan pertumbuhan secara keseluruhan. FDI adalah komponen penting untuk meningkatkan pertumbuhan, oleh karena itu harus disepakati bahwa hasil konstruktif dari FDI umumnya akan mengimbangi konsekuensi yang merugikan, yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi serta pengurangan kemiskinan.

Meskipun tidak ada hubungan langsung yang ditemukan antara investasi terhadap pengentasan kemiskinan, dapat dikatakan bahwa ukuran pengaruh investasi pada pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas dan kualitas pekerjaan lebih baik. Dampaknya adalah konsekuensi langsung dari penurunan kemiskinan, tingkat pendapatan masyarakat miskin, dan peningkatan keterampilan.

Umumnya, para ahli sepakat bahwa tingkat investasi berkorelasi positif dengan laju pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, tingkat investasi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas produksi, yang dengan cara ini akan membuka lapangan kerja baru. Dengan demikian, tingkat pengangguran dapat dikurangi dan pendapatan masyarakat akan lebih tinggi.

Investasi memiliki hubungan secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Total output nasional (produk domestik bruto) adalah salah satu faktor yang mempengaruhi investasi, khususnya produk domestik bruto riil/pertumbuhan ekonomi/pendapatan asli positif berpengaruh terhadap pembangunan investasi. Seperti Nizar et al., (2013); Tajuddin, (2014) bahwa produk domestik bruto berpengaruh terhadap investasi. FDI, investasi pemerintah dan tenaga kerja menunjukkan ekspansi dalam pertumbuhan ekonomi yang akan meningkatkan kenaikan investasi dalam perekonomian.

Penghimpunan modal akan berhasil jika sebagian pendapatan yang disimpan dan diinvestasikan untuk meningkatkan produk (*output*) dan pendapatan di masa mendatang. Untuk mencapai ini, pengalihan sumber daya dari arus konsumsi dan pengalihannya ke investasi pada bentuk "*capital formation*" untuk mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi. Investasi di bidang pengembangan sumber daya manusia akan meningkatkan kapasitas SDM, sehingga mereka menjadi spesialis yang berbakat yang dapat memperlancar

kegiatan yang bermanfaat. Investasi pada peningkatan sarana maupun prasarana berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan upaya penurunan kemiskinan.

2.2.6 Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan

The World Bank, (2011) pada *World Development Report* menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam upaya penurunan kemiskinan dan pencapaian tujuan pembangunan global. Pembangunan ekonomi akan membuka kesempatan kerja yang lebih luas untuk daerah setempat, termasuk penduduk miskin. Dalam agenda 21 United Nations Conference on Environment & Development, (1992) dinyatakan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi pada negara-negara berkembang adalah bentuk pengentasan kemiskinan langsung melalui penciptaan kesempatan kerja serta program peningkatan pendapatan masyarakat dan menekankan lebih tegas bahwa pengentasan kemiskinan tidak mungkin dilakukan bila ekonomi tidak bertumbuh.

Indonesia adalah salah satu negara yang menerima bahwa dengan membangun pertumbuhan ekonomi yang tinggi (terutama di masa orde baru) kemiskinan dapat dikurangi dimana tingkat pertumbuhan ekonomi telah mencapai 7%, namun hasilnya jauh dari harapan, tingkat kemiskinan masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan adalah masalah klasik dalam pembangunan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat utama dalam mengatasi masalah kemiskinan, karena pertumbuhan dapat menaikkan pendapatan warga miskin secara proporsional melalui pertumbuhan secara keseluruhan (Dollar & Kraay, 2002). Meskipun secara awam pertumbuhan ekonomi berguna bagi pengentasan kemiskinan, pada beberapa negara tidak

demikian, bahwa pertumbuhan diarahkan buat mengurangi kemiskinan (The World Bank, 2011).

Ada tiga metode dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Pertama-tama, pendekatan pendapatan adalah untuk mengkuantifikasi pendapatan yang dihasilkan di suatu negara dengan alasan bahwa semua pendapatan dibayar oleh perusahaan untuk unsur produksi. Kedua, pendekatan pengeluaran adalah mengukur pengeluaran akhir pada barang dan jasa yang mewakili jumlah yang dibayarkan untuk pemanfaatan sumber daya seperti upah, sewa dan keuntungan. Ketiga, dengan pendekatan produksi, di mana pertumbuhan ekonomi ditentukan sebagai jumlah semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.

Kemajuan ekonomi merupakan hal yang penting dalam kemajuan suatu negara. Umumnya, pembangunan ekonomi mencakup pertumbuhan ekonomi (output dan sumber daya) dan pertumbuhan ekonomi yang serius, khususnya peningkatan produktivitas, implementasi inovasi, dan membuka lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang merata. Akibatnya, banyak faktor yang berbeda dapat menentukan pertumbuhan ekonomi antar negara (R Ginevicius & v Podvezko, 2006; Toma Lankauskiene & Manuela Tvaronaviciene, 2011).

Beberapa penelitian observasional, dengan pendekatan *time series* (data pada setiap negara) dan data *cross section* antar negara, beberapa penelitian memberikan hasil yang berbeda. Ada beberapa pendapat yang bertentangan dengan hubungan antara kedua ide tersebut. Beberapa ahli mengatakan bahwa kemiskinan dapat dikurangi dengan membangun pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi pada kenyataannya, beberapa ahli melakukan penelitian menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi

justu menaikkan angka kemiskinan. Menurut Deininger & Squire, (1998), bahwa ada hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi suatu negara menggunakan peningkatan angka kemiskinan. Tetapi, studi yang dilakukan oleh Bank World, (1990); M. Ravallion, (1995) menunjukkan tidak ada korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan.

Kajian empirikal ini pada dasarnya menguji hipotesis Kuznets, di mana hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi memberikan hubungan negatif, sedangkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan ekonomi adalah hubungan positif. Hubungan ini dari Kuznets dikenal sebagai kurva U terbalik. Kedua penelitian yang mempunyai hasil bertentangan justru memperkuat hipotesis Kuznets dengan menggunakan kurva U terbalik. Kuznets melihat bahwa pola hubungan positif kemudian menjadi negatif, menunjukkan arah distribusi pendapatan yang transformatif ekonomi perdesaan (rural) ke ekonomi perkotaan (urban) atau ekonomi modern.

Ada perbedaan penilaian pada pertumbuhan ekonomi yang *pro-poor*. Beberapa menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menguntungkan penduduk miskin secara proporsional dalam arti peningkatan pendapatan penduduk miskin lebih besar daripada penduduk tidak miskin (Pernia, 2003). Pendapat lain menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bekerjasama eksklusif menggunakan pengurangan kemiskinan absolut (Ravallion, 2004).

Menurut Kuznets, (1971) pertumbuhan ekonomi ialah peningkatan kapasitas jangka panjang negara yang bersangkutan buat menyediakan banyak sekali barang ekonomi pada penduduknya. Peningkatan kapasitas tersebut ditentukan atau ditingkatkan pada kemajuan atau penyesuaian teknologi, kelembagaan serta ideologis terhadap berbagai tuntutan situasi yang terdapat. Kuznets, (1955) dalam artikelnya yang berjudul *Economic Growth and Income*

Inequality dan diterbitkan dalam jurnal *The American Economic Review*, menggambarkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembagian pendapatan.

Model Solow-Swan mengungkapkan bahwa pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, kemajuan teknologi dan hasil saling interaksi satu sama lain selama waktu yang digunakan pada proses pertumbuhan ekonomi. Dalam model Solow-Swan neo-klasik, jenis produksi yang lebih umum digunakan, yang dapat mengakomodasi banyak sekali kemungkinan substitusi antara modal serta tenaga kerja (Diana et al., 2017). Pertumbuhan ekonomi sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan suatu negara untuk meningkatkan aktivitas produksinya yang tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan negara yang bersangkutan, tetapi di sisi lain masih ditentukan oleh mobilitas energi kerja serta gerak modal antar negara.

Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk menggambarkan pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya, memisahkan daerah berdasarkan dua indikator mendasar, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita daerah. Dengan memutuskan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita menjadi sumbu horizontal, daerah-daerah yang diamati dibagi menjadi empat kelompok, khususnya: daerah-daerah dengan pertumbuhan cepat maju dan cepat tumbuh, daerah maju tapi tertekan, daerah yang cepat berkembang dan daerah yang agak tertinggal.

Elastisitas penanggulangan kemiskinan dilihat dari hubungan antara persentase tingkat penurunan penduduk miskin dengan persentase tingkat pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini digunakan untuk melihat seberapa jauh kemampuan pembangunan ekonomi untuk mengurangi dan menurunkan

persentase penduduk miskin. Meningkatnya elastisitas pengentasan kemiskinan menyiratkan semakin tinggi hubungan antara pembangunan ekonomi yang sesuai dengan dinamika persentase penduduk miskin. Nilai elastisitas positif berarti ada hubungan yang berlawanan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan kemiskinan. Makin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka tingkat kemiskinan akan makin cepat turun.

Pertumbuhan ekonomi yang tampak pada produk domestik bruto atau PDRB merupakan salah satu indeks dalam menurunkan kemiskinan (*poverty*). Dengan peningkatan PDRB, dapat mendorong pendapatan masyarakat yang berdampak positif khususnya penurunan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi menurut Kuznet mencerminkan ikatan jaringan yang mempengaruhi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi secara perlahan mempengaruhi penurunan kemiskinan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tampak pada produk domestik bruto atau PDRB berdampak negatif terhadap kemiskinan (*neediness*).

Pertumbuhan ekonomi harus terlihat, salah satunya adalah ekspansi PDRB tanpa melihat apakah kenaikannya tinggi atau rendah, pertumbuhan ekonomi juga tidak perlu diukur berdasarkan pertumbuhan PDRB secara merata, namun penting untuk melihat sejauh mana distribusi pendapatan yang diperoleh tersebar ke semua lapisan masyarakat.

Ekspansi PDRB selama proses pertumbuhan ekonomi merupakan persyaratan untuk menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi, sehingga dengan asumsi PDRB meningkat itu akan mencerminkan kesejahteraan dalam suatu masyarakat. Namun, jika proses pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh kesempatan kerja yang cukup, akan berdampak pada ketimpangan pendapatan, penduduk miskin meningkat, dan kemiskinan pada akhirnya dapat mengubah

pola hidup masyarakat dalam menyesuaikan pendapatan yang didapatkannya. PDRB merupakan salah satu parameter pertumbuhan ekonomi daerah yang berhubungan negatif dengan kemiskinan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan.

2.2.7 Ketimpangan Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan

Menurut Hightower, (2018), ketimpangan pendapatan berpedoman pada sejauh mana pendapatan di distribusikan secara merata pada antara penduduk. Ketimpangan pendapatan dapat dicirikan sebagai kesenjangan antara kaya dan miskin. Dalam hasil eksperimen, hubungan antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan adalah positif, dengan asumsi bahwa meningkatnya kemiskinan maka ketimpangan pendapatan juga akan meningkat begitupun sebaliknya. Kemiskinan merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan pendapatan.

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia merupakan problem dan topik yang serius, namun sekali lagi, isu ketimpangan ini ternyata kurang terkenal dibandingkan isu kemiskinan, meskipun faktanya ketimpangan pendapatan dan kemiskinan merupakan dua hal yang sama-sama pentingnya, di mana satu sama lain merupakan sebuah solidaritas yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dapat menghambat laju pertumbuhan perekonomian. Selain itu, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan akan mempengaruhi kerawanan sosial, ketidakpastian dan kerentanan kemanusiaan seperti kesehatan yang rendah, kelaparan, dan gizi buruk.

Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan untuk setiap orang dalam suatu daerah yang dipengaruhi oleh efisiensi mereka. Ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan dampak sosial secara negatif seperti

kecemburuan sosial dan menghambat mobilitas sosial (Saifuddin, 2014; Szeles & Monica Raileanu, 2013).

Perspektif umum tentang ketimpangan adalah bahwa ketimpangan merupakan kondisi positif dan motivator yang layak dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam perdebatannya bahwa pengusaha serta individu berpendapatan tinggi akan meningkatkan tabungan, tabungan yang tinggi akan meningkatkan investasi serta bertumbuhnya perekonomian. Selain itu, sistem *stream down impact* berjalan, khususnya melalui program pemungutan dan apropriasi pajak. Perdebatan dengan negara-negara berkembang *trickle down effect* sudah terjadi cukup lama, sementara itu, keadaan ketimpangan pendapatan di negara-negara berkembang mengharapakan masalah tersebut segera berakhir, untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Myrdal dalam gagasannya bahwa pembangunan ekonomi membawa siklus yang membuat kondisi menjadi sirkuler, di mana orang kaya mendapat semakin banyak keuntungan, dan orang-orang yang tertinggal menjadi semakin terhambat. Dampak balik secara umum akan semakin besar dan dampak penyebaran semakin kecil. Semakin agregat pola ini, semakin memperburuk ketimpangan global dan menyebabkan ketimpangan regional di negara terbelakang. Myrdal mencirikan dampak balik sebagai semua perubahan yang tidak menguntungkan dari ekspansi suatu ekonomi di suatu daerah. Myrdal memasukkan dampak migrasi, perpindahan modal, dan perdagangan secara radial dampak yang timbul dari proses sebab akibat sirkuler antara faktor-faktor baik non ekonomi maupun ekonomi. Dampak penyebaran tersebut mengacu pada antusiasme peningkatan yang menyebar dari titik fokus pengembangan ekonomi ke berbagai daerah. Menurut Myrdal, adalah kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara terbelakang (Jhingan M.L., 1993).

Ketimpangan regional berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan berpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah lain tetap terlantar. Penyebab keadaan ini, menurut Myrdal ialah peranan bebas kekuatan pasar, yang cenderung memperlebar dibandingkan mempersempit ketimpangan regional (M.L. Jhingan, 2007). Myrdal juga mengemukakan bahwa perpindahan modal juga cenderung meningkatkan ketimpangan wilayah. Di wilayah maju permintaan yang meningkat akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang.

Teori Median Voter Theorem Kebijakan yang diputuskan oleh pemerintahan yang baik (*benign government*) yaitu dengan memaksimalkan fungsi kesejahteraan sosial masyarakat (*social welfare function*). Lebih jauh perilaku pemerintahan yang baik memberikan arahan tentang interaksi politik yang dapat dimodelkan mirip dengan pengambilan nilai yang pasti dari variabel kebijakan (seperti tingkat pajak). Analisis kunci dalam literatur ekonomi politik adalah "*Median Voter Theorem*", secara mudah mengikuti: (1) preferensi dari banyak orang sebagai variabel kebijakan (misal: tarif pajak proporsional) berubah secara monoton berpengaruh terhadap distribusi yang berhubungan dengan populasi (misal: pendapatan mereka). (2) satu orang satu suara (dengan bobot yang sama), selanjutnya preferensi pemilih menempati posisi tengah (median) dalam distribusi yang akan memberikan keluaran dalam proses pemungutan suara (T. Persson & G. Tabellini, 1994).

Jika pemerintah menghendaki dampak bersih dari pajak dan kebijakan pengeluaran untuk redistribusi, selanjutnya sangat mudah untuk menunjukkan referensi untuk nilai T akan menurun secara monoton terhadap pendapatan. Jika salah satu ukuran kesenjangan adalah jarak antara median dan mean pemilik, selanjutnya diberikan rata-rata pendapatan, pemilih akan setuju untuk mengikuti kesenjangan yang lebih besar, sehingga secara gampang pemilih akan memilih tingkat pajak yang tinggi. Jika ditambahkan dampak dari pajak yang terdistorsi yang akan mendekat disinsentif dari usaha untuk meningkatkan pajak atau menabung, sehingga model dapat menjawab mengapa besarnya kesenjangan pendapatan menurunkan pertumbuhan ekonomi (A. Alesina & Rodrik D, 1994; T. Persson & G. Tabellini, 1994).

Kebijakan pemerataan hasil pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidaklah mudah. Dalam hal ini, Kuznets, (1955) telah meneliti korelasi antara distribusi pendapatan relatif serta taraf pendapatan per kapita, dengan menggunakan data *cross section* dan data observasi pada setiap negara (*time series*). Penelitian tersebut menemukan hubungan antara ketimpangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita pada bentuk U terbalik. Di awal proses pembangunan, ketimpangan distribusi pendapatan meningkat sebagai dampak dari proses urbanisasi dan industrialisasi.

Pada akhir proses pembangunan, ketimpangan pendapatan menurun, yaitu waktu sektor industri pada perkotaan telah mampu menyerap sebagian besar energi kerja yang berasal dari perdesaan (sektor pertanian) atau ketika pangsa pertanian pada produksi atau peningkatan pendapatan lebih kecil. Sehingga menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan lebih tinggi, ketimpangan akan berkurang. Implikasi lebih lanjut dari hipotesis Kuznets

jelas bahwa jika pada tahap awal pertumbuhan akan membentuk ketimpangan, maka kemiskinan akan membutuhkan waktu beberapa tahun untuk menurun pada negara-negara berkembang (Adams & Richard H. Jr., 2003).

Ketimpangan pendapatan bisa berdampak positif bagi pembangunan ekonomi, yaitu mampu mendongkrak kinerja antara lain memberikan dukungan investasi bagi sumber daya manusia, mendorong pengambilan keputusan yang berisiko, dan pengambilan keputusan investasi. Sisi negatifnya, ketimpangan membentuk demotivasi, ketegangan sosial, serta gangguan keamanan, serta penurunan permintaan yang bisa merusak pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.

Disparitas yang diperkirakan oleh koefisien rasio gini dinyatakan tinggi jika berada pada cakupan 0,5-0,7, sedang dengan asumsi berada pada cakupan 0,36-0,49 dan rendah dengan asumsi berada pada cakupan 0,2-0,35. Kurva Lorenz merupakan kurva yang menggambarkan fungsi distribusi pendapatan kumulatif. Apabila kurva Lorenz tidak diketahui, maka pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan dilakukan dengan memakai koefisien rasio gini yang dikembangkan oleh (Corrado Gini, 1921).

Tingkat ketimpangan pendapatan menurut Bank Dunia terpusat dalam kelompok 40% dari penduduk berpendapatan rendah, dengan kriteria sebagai berikut: a) dengan asumsi tingkat pendapatan yang di dapat kelompok tersebut di bawah 12%, itu berarti bahwa tingkat ketimpangan pendapatan kriteria “tinggi”; b) dengan asumsi bahwa kelompok tersebut mendapat 12-17% dari jumlah pendapatan, itu berarti bahwa tingkat ketimpangan pendapatan kriteria “sedang”; c) dengan asumsi bahwa kelompok tersebut mendapat lebih dari 17% dari jumlah pendapatan, itu menyiratkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan kriteria “rendah”.

Selain pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan kesempatan kerja, ketimpangan pendapatan adalah indikator penting pembangunan di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu bisa mengurangi kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan kesempatan kerja. Kinerja pembangunan ekonomi yang sudah baik, belum tentu dinikmati oleh seluruh lapisan penduduk, karena tidak meratanya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Disparitas atau ketimpangan yang semakin berkurang telah menjadi komitmen untuk kesejahteraan masyarakat, baik di Indonesia maupun di seluruh negara yang merupakan negara kesatuan. Pemahaman tersebut telah diakui sebagai tujuan kesepuluh dari SDGs, khususnya mengurangi disparitas di dalam dan antar negara. Negara-negara berusaha untuk memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan pendapatan, termasuk menghapuskan diskriminasi pada aturan-aturan, regulasi dan kegiatan yang sesuai dengan pelaksanaannya. Penekanan masalah ketimpangan terutama pendapatan menjadi krusial dan patut menjadi perhatian pada pembangunan suatu negara.

J. Yang & M. Qiu, (2016) kemampuan bawaan dan investasi keluarga dalam pendidikan awal memainkan peran penting dalam menjelaskan ketimpangan pendapatan dan mobilitas pendapatan antar generasi. Pendidikan lanjutan terbingkai dari berapa lama mereka menempuh pendidikan atau di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sedangkan orang-orang yang berpendidikan akan jauh lebih berkualitas dari orang-orang yang tidak berpendidikan. Dengan cara ini, peningkatan pendidikan pada masyarakat menjadi hal yang sangat fundamental. Pemenuhan pendidikan yang tinggi membuatnya lebih mudah mendapatkan pekerjaan serta dapat meningkatkan pendapatan. Tingginya

pendapatan memungkinkan masyarakat memiliki kehidupan yang lebih baik dan ketimpangan pendapatan yang lebih rendah.

Selanjutnya untuk mengatasi konflik ketimpangan dan kemiskinan serta mendorong pertumbuhan, diharapkan paket kebijakan yang saling melengkapi, yang meliputi empat elemen kebijakan utama yang bertujuan: (1) menghilangkan distorsi harga faktor, (2) mencapai perubahan struktural dalam pemerataan asset, kekuasaan serta akses pendidikan yang disertai dengan kesempatan memperoleh penghasilan, (3) memperbaiki pemerataan pendapatan: bagi golongan ekonomi kuat ditempuh melalui kebijakan perpajakan atas penghasilan dan kekayaannya, sedangkan untuk kelompok ekonomi kuat ditempuh melalui kebijakan perpajakan atas penghasilan serta kekayaannya, sedangkan untuk kelompok ekonomi lemah itu dicapai melalui pemberian tunjangan/subsidi, serta barang dan jasa konsumsi, (4) peningkatan pengembangan teknologi tepat guna dan pembangunan yang menekankan pada penyediaan fasilitas kesehatan, perumahan, pelatihan yang murah, peningkatan fasilitas pertanian, dan penyediaan lapangan (Todaro Michael P & Stephen C. Smith, 2009).

2.3 Penelitian Terdahulu

Amalia et al., (2015), penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Menggunakan data sekunder berupa pengeluaran pemerintah tahun 2007-2012, metode SEM (*Structural Equation Modeling*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah kabupaten, secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, tetapi secara tidak langsung, tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat.

Mardiana et al., (2017), penelitiannya bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan,

dan infrastruktur terhadap tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur. Menggunakan data sekunder pada tahun 2006-2015, alat analisis jalur (*path analysis*), IBM SPSS versi 17.0. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur, anggaran infrastruktur meningkat dan kemiskinan menurun artinya ada dampak dalam hal menurunkan angka kemiskinan namun masih rendah karena masih terjadi ketimpangan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur.

Rai et al., (2019, penelitiannya bertujuan untuk melihat pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Pengumpulan data melalui dokumen yang terdapat di BPS, tahun 2011-2017. Menggunakan analisis jalur. Teori Harrod-Domar dan Teori Adolf Wagner. Hasil analisis menunjukkan pengeluaran pemerintah dan investasi memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Investasi memiliki pengaruh langsung positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pengeluaran pemerintah dan investasi tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

Marisa, (2019), penelitiannya bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, inflasi, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Menggunakan data time series berupa data tahunan dari periode 1997-2017. Teknik analisis dengan pendekatan

kointegrasi dan *Error Correction Model* (ECM) serta model regresi linear berganda. Hasil estimasi menunjukkan variabel pertumbuhan ekonomi secara statistik signifikan dan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Sedangkan variabel pengeluaran pemerintah, inflasi dan pengangguran secara statistik tidak signifikan dalam memengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Lestari, (2014), penelitiannya bertujuan mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung belanja infrastruktur, belanja pendidikan, belanja kesehatan, dana bagi hasil, dan DAU terhadap pertumbuhan ekonomi, ketimpangan wilayah, dan indeks pembangunan manusia. Menggunakan desain ekplanatoris, data kabupaten dan/kota tahun 2006-2011, dengan model *structural equation model* (SEM), menggunakan teori keuangan daerah, teori pertumbuhan ekonomi, teori ketimpangan wilayah, dan pembangunan manusia. Teori-teori mengenai keuangan daerah khusus desentralisasi fiskal yaitu teori desentralisasi fiskal tradisional; model tiebout, dan model oates, desentralisasi fiskal baru; pandangan pro desentralisasi, pandangan kontra desentralisasi, dan pandangan tengah desentralisasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa belanja infrastruktur berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah, negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah, negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Ketimpangan wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Setiyawati & Hamzah, (2007), tujuan penelitiannya adalah untuk menguji secara langsung dan tidak langsung pengaruh penerimaan asli daerah, alokasi dana umum, alokasi dana khusus, dan belanja modal pada pertumbuhan

ekonomi; untuk menguji secara langsung pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran. Data penelitian adalah laporan APBD Jawa Timur dan realisasinya tahun 2001-2005. Hasil penelitian dengan regresi menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan alokasi dana umum berpengaruh langsung signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berpengaruh langsung signifikan pada kemiskinan, dan pengangguran, pendapatan asli daerah dan alokasi dana umum secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan pengangguran. PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAU berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk pengujian secara langsung untuk pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, tetapi pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan berpengaruh positif terhadap pengangguran.

Sianturi, (2019), tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dampak penerapan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan daerah disparitas di 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Menggunakan data sekunder atau "*pooling data*" yang dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, buku dan jurnal terkait pada tahun 2004-2008. Menggunakan metode analisis regresi persamaan simultan dengan model berulang dan kuadrat terkecil, dengan menggunakan metode OLS dengan data panel, atau disebut PLS pada aplikasi *software Eviews* 6.1. Hasil penelitiannya bahwa pertumbuhan ekonomi signifikan dan positif dipengaruhi oleh derajat desentralisasi fiskal, tenaga kerja, dan tingkat aglomerasi di daerah tersebut. Ketimpangan wilayah yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal. Pertumbuhan ekonomi memiliki

pengaruh yang signifikan dan positif terhadap ketimpangan wilayah. Pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal signifikan mempengaruhi ketimpangan wilayah, baik hubungan secara positif maupun negatif.

Ismail & Hakim, (2014), tujuan penelitian ini untuk menganalisis kemiskinan sebagai fungsi dari dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), jumlah penduduk, pendidikan, dan kesehatan. Menggunakan data persentase jumlah penduduk miskin di 8 Kab/kota Prov. Bali pada tahun 2006-2011, model ekonometrika data panel *fixed effect* pada *software Eviews*. Hasil penelitiannya menemukan bahwa Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Bali. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Bali, barangkali dikarenakan desain DAK memang bukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Jumlah Penduduk di Provinsi Bali tidak berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Bali, dikarenakan peningkatan proporsi penduduk produktif sebagai akibat dari arus migrasi yang masuk ke Bali dengan tujuan mencari pekerjaan. Tingkat Pendidikan dan tingkat kesehatan berpengaruh negatif terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Bali.

Sigit & Kosasih, (2020), tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh dana desa terhadap kemiskinan di tingkat kabupaten/kota di Indonesia. Menggunakan data sekunder meliputi data dana desa, PDRB, belanja modal serta jumlah penduduk miskin kab/kota di 33 Provinsi di Indonesia dari Ditjen Perimbangan Keuangan dan BPS, tahun 2015-2017. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan *Fixed Effect Model*. Hasil penelitiannya bahwa variabel dana desa berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin yang menunjukkan bahwa dana desa mampu secara efektif menurunkan jumlah penduduk miskin.

Krisna et al., (2019), tujuan penelitiannya untuk menganalisis pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali. Menggunakan data dana desa, tingkat kemiskinan dan IPM pada BPS Prov. Bali, tahun 2015-2017. Teknik analisis datanya yaitu statistik deskriptif dan path analisis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya bahwa semakin tinggi dana desa maka semakin turun tingkat kemiskinan. Dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya bahwa semakin tinggi dana desa maka akan semakin tinggi kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat artinya semakin tinggi tingkat kemiskinan maka semakin menurun kesejahteraan masyarakat.

Dewi & Novi Irama, (2018), penelitiannya bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alokasi dana desa berpengaruh terhadap kemiskinan di pemerintah desa Provinsi Sumatera Utara menurut kabupaten/kota. Populasi penelitian sebanyak 81 pemerintah desa Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/kota sejak tahun 2014-2016. Sampel yang dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu dengan kriteria yang dimiliki yaitu adanya data laporan APBDes dan tingkat kemiskinan pemerintah desa Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota secara berturut-turut selama 3 tahun berjumlah 81 kabupaten/kota. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan uji regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif secara signifikan dan positif terhadap kemiskinan.

Bitu Lailatul Yasinta, (2018), penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja infrastruktur dan

tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Kalimantan Barat. Menggunakan metode kuantitatif dan data yang digunakan adalah data pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang diwakili dengan belanja daerah menurut fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan persentase penduduk miskin serta indeks pembangunan manusia di Kalimantan Barat dari tahun 2008-2017 bersumber dari DJPK dan BPS Provinsi Kalimantan Barat, serta sumber data keuangan terkait lainnya. Pengujian dilakukan dengan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pendidikan, kesehatan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap variabel IPM, sedangkan belanja infrastruktur berpengaruh tidak signifikan namun memiliki arah positif terhadap variabel IPM, selanjutnya kemiskinan berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel IPM. Artinya kenaikan pada angka kemiskinan akan menurunkan IPM di Provinsi Kalimantan Barat.

Purnomo et al., (2021), penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh infrastruktur ekonomi, infrastruktur pendidikan, dan infrastruktur kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2018. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan persamaan data panel pada aplikasi *evIEWS*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, infrastruktur kesehatan dan infrastruktur pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Implikasi dari penelitian ini adalah pembangunan infrastruktur harus merata dan adil di seluruh wilayah kabupaten kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya pada daerah-daerah yang angka kemiskinannya tinggi.

Wibowo, (2014), penelitiannya bertujuan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah atas pertanian, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan pada 35 Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah. Menggunakan data panel dari tahun 2007-2012 dan data *cross section* sebanyak 35 data mewakili Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang menghasilkan 210 observasi. Metode analisis regresi linear berganda (*pooled least square regression analysis*) dengan pendekatan efek tetap (*fixed effect model*). Berdasarkan hasil estimasi, pengeluaran pemerintah sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan pengeluaran sektor infrastruktur berpengaruh signifikan positif terhadap kemiskinan.

Nugraheni & Priyarsono, (2012), penelitiannya bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja pengelolaan keuangan daerah cukup efektif dalam penyediaan infrastruktur dasar dan apakah penyediaan infrastruktur dasar secara efektif mengurangi angka kemiskinan tahun 2006-2009. Menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis inferensial. Hasil penelitiannya mengonfirmasi hubungan positif antara kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan penyediaan infrastruktur dasar (khususnya jalan dan listrik, namun tidak berlaku untuk air bersih). Adapun hubungan antara penyediaan infrastruktur dasar dengan angka kemiskinan, sesuai harapan, ternyata negatif. Temuan ini memperkuat keyakinan perlunya mendorong lebih kuat lagi pembangunan infrastruktur dasar untuk mengurangi angka kemiskinan.

Anwar, (2013), penelitiannya bertujuan mengetahui hubungan kebijakan pemerintah (inklusi keuangan, suku bunga, dan inflasi) terhadap kemiskinan di Indonesia melalui investasi, permintaan uang, dan pertumbuhan ekonomi. Menggunakan data sekunder dari tahun 2005-2013 dengan menggunakan

analisis *structural equation model* (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Suku bunga berpengaruh tidak signifikan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap tingkat kemiskinan melalui investasi, permintaan uang, dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, baik langsung maupun tidak langsung, melalui investasi, permintaan uang, dan pertumbuhan ekonomi.

Nizar et al., (2013), penelitiannya bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan secara langsung, selanjutnya menganalisis pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, serta bagaimana pengaruh estimasi pertumbuhan ekonomi hasil analisis variabel investasi dan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Menggunakan data sekunder berupa data time series, 1980-2010, yaitu data investasi asing langsung (FDI), investasi pemerintah, tenaga kerja, PDB, dan kemiskinan. Metode analisis *ordinary least square* (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi (PDB) terhadap tingkat kemiskinan secara langsung sangat kecil namun hubungannya negatif dan signifikan. FDI, investasi pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya pengaruh estimasi pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan juga tidak begitu besar namun hubungannya negatif dan signifikan.

Agung Istri Diah Paramita & Bagus Putu Purbadharmaja, (2015), penelitiannya bertujuan untuk menganalisis ada atau tidaknya pengaruh signifikan investasi, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengaruh investasi dan pengangguran terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Menggunakan data sekunder periode 1993-2013,

diuji dengan teknik analisis jalur (*Path Analysis*). Hasil penelitian menyatakan, investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan variabel pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan secara langsung variabel investasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Selanjutnya untuk pengaruh investasi terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan. Untuk pengangguran terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan.

Pangiuk, (2018), penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2009-2013. Menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah rumus pendapatan dan analisis statistik regresi sederhana menggunakan variabel independen yang meliputi pertumbuhan ekonomi terhadap variabel dependen kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi, dimana variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan atau nilai kesatuannya terhadap kemiskinan adalah negatif. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi.

Istiqamah et al., (2018), penelitiannya bertujuan untuk menganalisis: 1) pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan provinsi-provinsi di Indonesia; 2) pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan provinsi-provinsi di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang

meliputi data deret waktu (*time series*) tahun 2010-2016 dan data deret lintang (*cross section*) 34 provinsi di Indonesia. Menggunakan regresi data panel. Hasil analisis menemukan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi menyebabkan meningkatnya ketimpangan pendapatan dan jumlah penduduk miskin provinsi-provinsi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi secara signifikan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan dan jumlah penduduk miskin provinsi-provinsi di Indonesia. Ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak dapat mengurangi ketimpangan pendapatan maupun mengurangi jumlah penduduk miskin.

Nisa et al., (2020), penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan tahun 2009-2018. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemiskinan dan variabel independen adalah ketimpangan pendapatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data times series dan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan.

Ginting, (2015), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah dan menganalisis pengaruh variabel ketimpangan pembangunan antar wilayah, PDRB, investasi dan aglomerasi terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dari tahun 2004-2013, penelitian ini menghasilkan kesimpulan: tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan sejalan dengan semakin menurunnya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Penurunan ketimpangan ini ditunjukkan dengan Indeks Williamson yang semakin menurun untuk Indonesia bagian barat dan timur. Hasil analisa kuantitatif dengan regresi panel data menemukan bahwa

variabel ketimpangan pembangunan dan aglomerasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan variabel PDRB dan investasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Walinono, (2020), penelitiannya bertujuan untuk membahas pengaruh reformasi keuangan dan desentralisasi fiskal terhadap tata kelola keuangan di Bone, Indonesia tahun 2010-2019. Analisis kinerja keuangan dapat dilakukan dengan melihat rasio derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, kemandirian daerah, efektivitas ROI, efisiensi ROI, dan kompatibilitas belanja langsung untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan pada *human development index* (HDI). Penelitian ini menerapkan metode statistik deskriptif dengan mendeskripsikan dan menjelaskan data yang dikumpulkan yaitu status/tingkat variabel yang diamati berupa rasio atau persentase, tabel atau diagram grafik, dan dengan menggunakan beberapa alat analisis uji asumsi klasik, regresi linier berganda, dan uji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kesesuaian belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bone. Sementara rasio regional desentralisasi keuangan, ketergantungan keuangan daerah, kemandirian daerah, efektivitas ROI, dan Efisiensi ROI tidak signifikan berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bone.